BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang :

a. bahwa implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dengan sasaran terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara;
b. bahwa Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan penjabaran arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194l, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 787);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETA JALAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Menetapkan program dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila pada kementerian/lembaga sebagai Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan subkegiatan pembinaan ideologi Pancasila pada pemerintah daerah provinsi sebagai Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan:
a. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sejak awal tahun 2025; dan
b. subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan pada tahun 2026.

KEEMPAT : Program dan kegiatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU serta subkegiatan pada pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengendalian dan evaluasi.

KELIMA : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT membentuk Tim Koordinasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan struktur organisasi, uraian tugas, dan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Pengendalian dan evaluasi atas Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila atas:
a. program dan kegiatan kementerian/lembaga setiap tahun dan dimulai pada tahun 2026; dan
b. subkegiatan pemerintah daerah provinsi setiap tahun dan dimulai pada tahun 2027.

KETUJUH : Pembiayaan atas kegiatan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

MATRIKS PETA JALAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 2025-2029 KEMENTERIAN/LEMBAGA

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
ISU PENYELENGGARAAN NEGARA										
Terinternalisasi dan terinstitusionalisasi nya nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia	Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila	Penyusunan Naskah Akademik kebijakan Mahkamah Agung	Jumlah Naskah Akademik kebijakan Mahkamah Agung yang disusun	41					Mahkamah Agung	
		Perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung (PERMA SEMA, SK KMA, SK SEKMA)	Jumlah Dokumen Perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan	41					Mahkamah Agung	
		Pemenuhan Penerjemahan Kebijakan Mahkamah Agung	Jumlah dokumen kebijakan Mahkamah Agung yang telah diterjemahkan	1					Mahkamah Agung	
		Penyusunan Pedoman atau Panduan Kebijakan Mahkamah Agung	Jumlah pedoman atau panduan kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan						Mahkamah Agung	
		Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan melalui penyelarasan dengan nilai-nilai Pancasila	Persentase Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan melalui penyelarasan dengan nilai-nilai	81%	82%	83%	84%	85%	Kementerian Hukum	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Pancasila yang selesai diharmonisasi							
		Penyusunan Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia	Rekomendasi Kebijakan	2	15	20	23	25	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM di tingkat Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	0	0	0	0	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Legislasi dan Litigasi	Layanan Hukum (Layanan)	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Layanan Bantuan Hukum (Layanan)	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Usulan Rekomendasi	1 Usulan Rekomendasi	1 Usulan Rekomendasi	1 Usulan Rekomendasi	1 Usulan Rekomendasi	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	K/L terkait, DPMPTSP Provinsi
		Penyusunan Regulasi Tentang Rencana Induk	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Target: 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Penyelarasan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Target: 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Pelatihan penyusun regulasi internal	Modul pelatihan integrasi nilai Pancasila						Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pelatihan aparat penegak hukum	SDM terlatih						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum yang bertentangan/yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila	Rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum	5 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan	Badan Pembnaan Ideologi Pancasila	
	Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan	Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan						Mahkamah Agung	
		Meningkatnya tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh K/L/D	72%	73%	74%	75%	76%	Kementerian Hukum	Badan Pembinaan Hukum Nasional
		Fasilitasi dan Pembinaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia	Lembaga	0	0	300	510	830	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	85	85	87	87	89	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Hukum
		Sinkronisasi regulasi bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait ekonomi kreatif telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Target: 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait ekonomi kreatif telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila	Presentase pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait ekonomi kreatif telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Target : 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Pencegahan Maladministrasi	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	46	43	43	43	43	Ombudsman	
		Pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan/selaras dengan nilai-nilai Pancasila	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	Badan Pembnaan Ideologi Pancasila	
	Meningkatkan pemahaman dan/atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan	Jurnal dan Publikasi Kebijakan Mahkamah Agung	Jumlah Jurnal yang diterbitkan						Mahkamah Agung	
			Jumlah Kegiatan Publikasi Kebijakan Mahkamah Agung						Mahkamah Agung	
		Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung	Jumlah Kegiatan Bimbingan teknis terkait Kebijakan Mahkamah Agung yang dilaksanakan						Mahkamah Agung	
			Jumlah Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung yang dilaksanakan						Mahkamah Agung	
		Publikasi Media dan MA *Goes to Campus*	Jumlah Kegiatan publikasi mengenai pencapaian dan kinerja Mahkamah Agung kepada Masyarakat melalui media digital Mahkamah Agung						Mahkamah Agung	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Meningkatnya kualitas Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan Pembinaan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	Kementerian Hukum	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
		Pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi dan PIMPASA	Terbentuknya Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa)	510 Desa Binaan	520 Desa Binaan	530 Desa Binaan	540 Desa Binaan	550 Desa Binaan	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Forkopimda
		Legislasi dan Litigasi	Layanan Hukum (Layanan)	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Layanan Bantuan Hukum (Layanan)	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Layanan Hukum	Tersusunnya peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dan tersedianya Advokasi Hukum di bidang Kelautan dan Perikanan (Layanan)	6	6	6	6	6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Hukum
		Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik	30 Lembaga	35 Lembaga	40 Lembaga	45 Lembaga	50 Lembaga	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi	
		Sosialisasi Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan sosialisasi. Target: 1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Pelaksanaan koordinasi dan diskusi terhadap peraturan perundang-undangan terkait ekonomi kreatif	persentase pelaksanaan koordinasi dan diskusi terhadap peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			terkait ekonomi kreatif. Target: 1							
		Publikasi Regulasi Bidang ekonomi kreatif	Jumlah Regulasi. Target: 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Advokasi pembinaan Ideologi Pancasila terhadap organisasi sosiali dan politik serta komponen masyarakat lainnya	rekomendasi hasil advokasi pembinaan Ideologi Pancasila	9 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan	Badan Pembnaan Ideologi Pancasila	
		Advokasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah	rekomendasi hasil advokasi pembinaan Ideologi Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan	Badan Pembnaan Ideologi Pancasila	
Terinternalisasi dan terinstitusionalisasi nya nilai-nilai Pancasila dalam sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan penyelenggara negara	Menyusun standar kompetensi, kualifikasi, dan orientasi ideologi dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan penyelenggara negara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	Perencanaan dan Rekrutmen Pegawai	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengadaan CPNS						Mahkamah Agung	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengadaan Calon Hakim						Mahkamah Agung	
		Perencanaan dan Pengembangan Kompentesi Pegawai	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai						Mahkamah Agung	
		Penilaian Kompetensi Pegawai	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai						Mahkamah Agung	
			Modul Penilaian kompetensi pegawai						Mahkamah Agung	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Fit and Proper Test Pimpinan Pengadilan	Jumlah Hakim yang telah mengikuti *Fit and Proper Test* jabatan Ketua dan Wakil Pengadilan						Mahkamah Agung	
			Jumlah Pegawai yang telah mengikuti *Fit and Proper Test* jabatan Sekretaris Pengadilan						Mahkamah Agung	
		Promosi dan Mutasi Pegawai Teknis dan non Teknis	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti proses penempatan secara transparan dan berdasarkan kriteria yang jelas						Mahkamah Agung	
			Jumlah Pegawai yang telah mengikuti proses seleksi dan promosi jabatan secara transparan dan berdasarkan kriteria yang jelas						Mahkamah Agung	
		Penguatan HAM bagi K/L/D Aparatur Negara	Orang	0	595	595	595	595	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	8	8	8	8	8	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rancangan Peraturan tentang JF Binaan Komdigi (Rancangan Peraturan)	2	4	2	2	2	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rancangan Regulasi Tentang Manajemen Jabatan (Rancangan Peraturan)	2	3	2	1	2	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pengelolaan Organisasi dan SDM	Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi KKP	80	81	82	83	84	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Rekomendasi Kebijakan Penataan Jabatan ASN	1 Rekomendasi					Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Peraturan Pemerintah terkait Pemberian Penghargaan dan Pengakuan bagi Pegawai ASN		1 PP	1 PP			Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Rekomendasi Kebijakan Manajemen Talenta dan Karier Pegawai ASN	1 Rekomendasi					Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	1 Rekomendasi					Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Rekomendasi Kebijakan Penguatan Budaya Kerja Pegawai ASN dan Peningkatan Citra Institusi ASN	1 Rekomendasi					Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Peraturan Menteri tentang Kompetensi ASN		1 Rekomendasi				Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Peraturan Menteri PANRB terkait Manajemen Talenta		1 Rekomendasi				Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan dan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Pengadaan Pegawai ASN Nasional (PN)						dan Reformasi Birokrasi	
		Pelaksanaan Pembekalan CASN	Jumlah Pelaksanaan Pembekalan CASN. Target: 1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kemen Ekraf/ Badan Ekraf	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas. Target: 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Program Profesionalisme SDM Polri	Penyusunan Kurikulum Pemberian Mata Pelajaran Kewiraan pada Kegiatan Diktuk Polri (Akpol, Sipss dan Ba/Ta	100%	100%	100%	100%	100%	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Persentase K/L/D yang Menerapkan Manajemen Talenta	8,92%	20%	35%	45%	54%	Badan Kepegawaian Negara	
			Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya	7,95%	9,88%	11,83%	13,80%	15,78%	Badan Kepegawaian Negara	
			Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai kewenangan BKN	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian Negara	
		Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Dokummen Rinduk	1					Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Seluruh K/L

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Kerjasama lintas Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	Dokumen Kerjasama	5 K/L, 2 Mitra, 5 Pemda	44 K/L, 5 Mitra, 10 Pemda	44 K/L. 10 Mitra, 10 Pemda	44 K/L, 10 Mitra, 10 Pemda	44 K/L, 10 Mitra, 10 Pemda	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	K/L, Mitra dan Pemda
		Kajian dan Telahaan Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi peningkatan kapasitas Pemda dalam mengimplementasikan Rinduk (Prov/Kab/Kot)	38 Pemda	130 Kab Kota	130 Kab Kota	130 Kab Kota	124 Kab Kota	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Ideologi Pancasila bagi pegawai dan penyelenggara negara	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim	Jumlah Hakim yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga						Mahkamah Agung	
			Jumlah Hakim yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator						Mahkamah Agung	
			Jumlah Hakim yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Terpadu						Mahkamah Agung	
			Jumlah Hakim yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu						Mahkamah Agung	
			Jumlah Modul Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi						Mahkamah Agung	
		Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Fungsional	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Fungsional						Mahkamah Agung	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis di Pengadilan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Panitera dan Panitera Pengganti						Mahkamah Agung	
			Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jurusita dan Jurusita Pengganti						Mahkamah Agung	
		Bimbingan Teknis Penanganan Perkara	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara						Mahkamah Agung	
			Jumlah Kegiatan Bimbingan teknis terkait Penangan Perkara berbasis Keadilan Restoratif						Mahkamah Agung	
			Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum						Mahkamah Agung	
		Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik						Mahkamah Agung	
			Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik						Mahkamah Agung	
		Penguatan HAM bagi K/L/D Aparatur Negara	Orang	0	595	595	595	595	Kementerian Hak Asasi Manusia	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai Kemendikdasmen yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dasar	679	679	679	679	679	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal
		Pengelolaan Organisasi dan SDM	Pengembangan Kompetensi SDM Komdigi Bidang Digital (Orang)	150	450	475	500	525	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital	Pelatihan Aparatur Digital (Orang)	-	20	20	20	20	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang Digital (Orang)	100	160	160	160	160	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Dukungan Manajemen	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan internal	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	Kementerian Pertanian	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (Nilai)	82	82,5	83	83,5	84	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pelatihan Ideologi Pancasila Bagi Pegawai di Lingkungan Kemen Ekraf/ Badan Ekraf	Jumlah Pelatihan Ideologi Pancasila Bagi Pegawai di Lingkungan Kemen Ekraf/ Badan Ekraf. Target: 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Program Profesionalisme SDM Polri	Pembinaan Personel Guna Penanggulangan Dan Pencegahan Radikalislme Dan Intoleransi	100%	100%	100%	100%	100%	Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Program Profesionalisme SDM Polri	Peningkatan Pemahaman dan Penghayatan Nilai Pancasila tertuang dalam mata pelajaran Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam implementasi pembentukan karakter bangsa pada jenis pendidikan pengembangan umum (Dikbangum)	15 giat (100%)	17 giat (100%)	18 giat (100%)	18 giat (100%)	18 giat (100%)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Pendidikan pimpintan tingkat nasional baik pada program pendidikan regular angkatan (PPRA), program pendidikan singkat angkatan (PPSA), maupun Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA)	Jumlah peserta dari Pendidikan Kader Pimpinan Tingkat Nasional baik PPRA, PPSA maupun P3DA yang memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Pancasila						Lembaga Ketahanan Nasional	
		Pelatihan untuk Pelatih (training of trainer/ToT) kebangsaan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan dialog wawasan kebangsaan	Jumlah peserta dari ToT Kebangsaan, Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai), dan Dialog Wawasan Kebangsaan memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Pancasila memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari						Lembaga Ketahanan Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Empat Konsensus Dasar Pancasila							
		Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN	Jumlah Peserta Pelatihan manajerial yang mendapatkan Akses terhadap Pembelajaran Ideologi Pancasila	12.500 Peserta	12.600 Peserta	12.600 Peserta	12.650 Peserta	12.650 Peserta	Lembaga Administrasi Negara	K/L/D
			Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CASN yang mendapatkan Akses terhadap Pembelajaran Ideologi Pancasila	720 Peserta	720 Peserta	720 Peserta	720 Peserta	720 Peserta	Lembaga Administrasi Negara	K/L/D
		Pelaksanaan sertifikasi pengajar diklat pembinaan ideologi Pancasila	pengajar diklat pembinaan ideologi Pancasila yang disertifikasi	250 orang	704 orang	774 orang	851 orang	963 orang	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
		Pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila	lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang disertifikasi	15 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
		Pelaksanaan diklat pembinaan ideologi Pancasila	Peserta diklat pembinaan ideologi Pancasila	11.568 orang	9.984 orang	10.982 orang	12.080 orang	14.288 orang	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
Terinternalisasi dan terinstitusionalisasi nya nilai-nilai Pancasila dalam budaya birokrasi publik dari tingkat pusat sampai daerah	Menciptakan budaya kerja di seluruh lingkungan organisasi birokrasi publik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perkara	Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perkara yang disusun						Mahkamah Agung	
		Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Pengadilan untuk	Jumlah Satuan Kerja Pengadilan yang mendapat predikat WBK, WBBM						Mahkamah Agung	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		mencapai pelayanan prima								
		Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal yang disusun						Mahkamah Agung	
		Fasilitasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI bagi aparatur	Jumlah Orang	180 Orang	3000 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	Kementerian Dalam Negeri	
		Penguatan HAM bagi K/L/D Aparatur Negara	Jumlah Orang	0	595	595	595	595	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Dokumen Usulan Evaluasi RB dan Pelayanan Publik (Dokumen)	2	2	2	2	2	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rancangan Peraturan tentang JF Binaan Komdigi (Rancangan Peraturan)	2	4	2	2	2	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rancangan Regulasi Tentang Manajemen Jabatan (Rancangan Peraturan)	2	3	2	1	2	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rancangan Peraturan Tentang Kelembagaan Kementerian Komdigi dalam Kerangka Transformasi Digital (Rancangan Peraturan)	3	3	2	2	2	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pengelolaan Organisasi dan SDM	Nilai implementasi RB KKP (Nilai) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai)	86	86,5	87	87,5	88	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Indeks Reformasi Birokrasi KKP	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Jumlah instansi pemerintah yang dikoordinasikan pelaksanaan budaya kerja BerAKHLAK dan dievaluasi Indeks BerAKHLAK berakhir sampai 2025 (Nilai IB yg diambil dari tahun 2024)	550 instansi pemerintah	Indeks Sistem Merit (0,61)	To be determined (TBD)	To be determined (TBD)	0,65	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi	
		Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK di llingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan kegiatan BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Target: 1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Audit Ideologi Organisasi (*Ideological Mapping*) terhadap struktur birokrasi Lemdiklat Polri	Peta ideologi kelembagaan	100% unit Lemdiklat dipetakan nilai Pancasilanya					Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Revitalisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan integrasi nilai Pancasila (multikulturalisme, keadilan, persatuan)							Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Pelatihan Keteladanan dan Kepemimpinan Pancasilais bagi Instruktur dan Pejabat Struktural							Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Penerapan Sistem Reward dan Disinsentif Berbasis Nilai Pancasila (komitmen pada keadilan, pelayanan, dan kemanusiaan)							Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Evaluasi Institusionalisasi Nilai Pancasila dan Replikasi di Satuan Wilayah (Satwil)							Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		pengukuran pelembagaan Pancasila	rekomendasi kebijakan hasil pengukuran pelembagaan Pancasila	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN										
Terbangunnya kesadaran dan praktik kehidupan berkebinekaan	Menguatkan wawasan kebangsaan dan kebinekaan yang berbasis nilai-nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa yang dihasilkan	1	1	1	1	1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa)	Kemenpora, BPIP
		Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Jumlah Masyarakat yang menerima penguatan Nilai Pancasila	12 Daerah Prov/Kab/Kota	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri	
		Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Masyarakat yang menerima penguatan Wawasan Kebangsaan	38 Daerah Prov/Kab/Kota	38 Daerah Prov/Kab/Kota	38 Daerah Prov/Kab/Kota	38 Daerah Prov/Kab/Kota	38 Daerah Prov/Kab/Kota	Kementerian Dalam Negeri	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pendidikan di Kota Mataram Prov NTB		600					Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup Masyarakat di Kota Kota Palembang Prov Sumsel		600					Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup Pekerja di Kota Ambon		600					Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Ambon Prov. Maluku			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Bangkalan Prov. Jawa Timur			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Bengkulu Prov. Bengkulu			5700				Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Giri Terawangan Prov. NTB			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan Kota Gorontalo di Prov. Gorontalo			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kab. Subang Prov. Jawa Barat			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Tegal Prov. Jawa Tengah			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Madiun Prov. Jawa Timur			5700				Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Jambi Prov. Jambi			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Prov Nusa Tenggara Barat			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Benngkulu Prov. Bengkulu			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Giri Terawangan Prov. NTB			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman Kota Gorontalo di Prov. Gorontalo			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kab Banyuwangi Provinsi Jawa Timur			5700				Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konjen di Negara Republik Rakyat Tiongkok (China)			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konjen di Negara Korea Selatan			5700				Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Bandar Lampung Prov. Lampung				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Tarakan Kalteng				5601			Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Prov Aceh				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Balikpapan Prov. Kaltim				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Manado Prov. Sulawesi Utara				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman Kota Ciamis Provinsi Jawa Barat				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Prov. Babel (Pangkal Pinang)				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Palangkarya Kalteng				5601			Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Prov Aceh				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kepri (Tanjung Pinang)				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Ambon Prov Maluku				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup PemukimanKota Bandung Provinsi Jawa Barat				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman Kota Mamuju di Prov. Sulawesi Barat				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kota Jayapura Provinsi Papua				5601			Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kab Malang Provinsi Jawa Timur				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Provinsi Jawa tengah				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konjen di Jepang				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konjen di Negara Singapore				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di				5601			Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Daerah di Prov. Kalimantan Selatan								
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konjen di Jepang				5601			Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Bali Prov. Bali					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Masyarakat di Kota Bima Provinsi NTB					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Masyarakat di Kab. Sambas Provinsi Kalbar					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan					6100		Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Kota Sorong Provinsi Papua Barat								
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Jambi Provinsi Jambi					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Palembang. Prov. Sumatera Selatan					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim					6100		Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukimandi Kab. Sambas Provinsi Kalbar					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman Kota Sabang Provinsi Aceh					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Garut Provinsi Jawa Barat					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kab Banyuwangi Provinsi Jawa Timur					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kota Ambon Provinsi Maluku					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kab Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat					6100		Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kab. Purwokerto Provinsi Jawa tengah					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konj en di Arab Saudi					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konj en di Negara Australia					6100		Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Bitung Prov. Sulut						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di						6700	Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Kab. Semarang Provinsi Jawa tengah								
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kab Raja Ampat Provinsi Papua Barat						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Yogyakarta Provinsi DIY						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kota Giri Terawangan Prov. NTB						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan di Kab Malang Provinsi Jawa Timur						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Jayapura Provinsi Papua						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kab Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat						6700	Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kab. Purwokerto Provinsi Jawa tengah						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukimandi Kab Raja Ampat Provinsi Papua Barat						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Yogyakarta Provinsi DIY						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman di Kota Giri Terawangan Prov. NTB						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pemukiman Kab Malang Provinsi Jawa Timur						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kab Raja Ampat Provinsi Papua Barat						6700	Kementerian Pertahanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kab. Wonosobo Provinsi Jawa tengah						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekerjaan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konjen di Dubai						6700	Kementerian Pertahanan	
		Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan di Luar Negeri pada Kedutaan Besar/Perwakilan/Konjen di Negara Taiwan						6700	Kementerian Pertahanan	
		Warga negara yang mendapatkan penanaman nilai sosial dasar	Jumlah warga negara yang mendapatkan penanaman nilai sosial dasar	10	10	10	10	10	Kementerian Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional	Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan (Dokumen)	-	10	10	10	10	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Bimbingan Teknis Implementasi Sub Urusan Komunikasi dan Informasi (Orang)	2	2	2	2	2	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Pengembangan Ekosistem Media, Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi Publik	Pedoman kemitraan lembaga informasi dan kehumasan (Pedoman)	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Pengembangan kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN) (Lembaga)	-	135	135	135	135	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Pengembangan kemitraan komunikasi strategis (Lembaga)	-	1000	1000	1000	1000	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN)	Jumlah Pemuda yang mengikuti dan lulus PKPBN	30	35	40	45	50	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Tentara Nasional Indonesia
		Program Profesionalisme SDM Polri	Penyusunan kurikulum dengan memasukan mata pelajaran Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Kebhinneka Tunggal ikaan dalam jenis pendidikan pengembangan umum (Dikbangum)	90%	100%	100%	100%	100%	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Program penggalangan terhadap tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini	Terciptanya tokoh masyarakat yang resiliens terhadap ideologi yang mengancam ideologi pancasila dan turut	73 giat (100%)	74 giat (100%)	75 giat (100%)	76 giat (100%)	77 giat (100%)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		terhadap ancaman radikalisme terorisme	serta berkontribusi dalam pencegahan penyebaran ideologi yang mengancam Pancasila							
		Program penggalangan terhadap kelompok masyarakat/pegiat media sosial/influencer untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ancaman radikalisme terorisme dalam upaya membentuk daya tangkal dan daya tahan terhadap ideologi yang mengancam pancasila di masyarakat dan ruang digital	Terciptanya masyarakat yang resiliens terhadap ideologi yang mengancam ideologi pancasila dan produk konten yang edukatif dan informatif untuk disebarkan dan sebagai kontra narasi radikal di ruang digital	73 giat (100%)	74 giat (100%)	75 giat (100%)	76 giat (100%)	77 giat (100%)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Deradikalisasi Luar Lapas	Jumlah Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Narapidana Terorisme, Mantan Narapidana Terorisme, serta Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme	45 Orang					Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	
		Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme	206 Kegiatan					Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	
		komunikasi pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah layanan dan peserta sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila	5 layanan	1.000.000.000 orang	1.100.000.000 orang	1.200.000.000 orang	1.300.000.000 orang	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
	Mendorong dan menguatkan dialog antar-masyarakat berbasis nilai-nilai	Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan pembahasan isu strategis Bidang Bina	Jumlah Daerah	20 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/Kota)	Kementerian Dalam Negeri	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	Pancasila demi terbangunnya integrasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat	Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI								
		Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional	Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional (Rancangan Perpres)	1	1	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Manajemen pengelolaan komunikasi strategis pemerintah (Kegiatan)	-	38	38	38	38	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Pengelolaan krisis komunikasi nasional (Kegiatan)	-	50	50	50	50	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Sosialisasi dan Bimtek Kebijakan Standardisasi Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik (orang)	1000	1000	1000	1000	1000	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rancangan Revisi UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Rancangan Revisi UU)	1	1	1	1	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			NSPK Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah (dokumen)	1	1	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			NSPK Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik (dokumen)	1	1	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Konten informasi publik program prioritas pemerintah (Kegiatan)	-	500	500	500	500	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Pengelolaan konten kontra narasi (Kegiatan)	-	25	25	25	25	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik (Kegiatan)	1	20	20	20	20	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas (Rancangan PerMen)	1	1	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	7 layanan	20.000 orang	25.000 orang	30.000 orang	35.000 orang	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
		Pembinaan pengarusutamaan nilai Pancasila dan pembudayaan gotong royong pada masyarakat	Pembinaan pengarusutamaan nilai Pancasila dan pembudayaan gotong royong pada masyarakat		16.000 orang	17.000 orang	18.000 orang	19.000 orang	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
		Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan (Perkara/Berkas Perkara)	100	105	110	115	120	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Badan Publik Pemerintah yang Informatif (Lembaga)	135	140	145	150	155	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Sistem Informasi Terintegrasi Komisi Informasi (Layanan)	-	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Fasilitasi Pembentukan KI Provinsi Baru (Provinsi)	-	4	4	4	4	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Program Profesionalisme SDM Polri	Peningkatan Pemahaman dan Internalisasi Nilai Pancasila dengan memasukan mata pelajaran Implementasi Penghayatan dan Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam jenis pendidikan pengembangan umum (Dikbangum)	15 giat (100%)	17 giat (100%)	18 giat (100%)	18 giat (100%)	18 giat (100%)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Program Profesionalisme SDM Polri	Penguatan Kohesi Sosial Dialog antar-masyarakat yang berbasis Pancasila mendorong terciptanya rasa saling percaya, menghormati keberagaman, dan mengurangi konflik sosial berbasis suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA). di implementasikan dalam mata pelajaran hubungan antar suku	15 giat (100%)	17 giat (100%)	18 giat (100%)	18 giat (100%)	18 giat (100%)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			bangsa pada jenis pendidikan pengembangan umum (Dikbangum)							
		Program Profesionalisme SDM Polri	Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Pencegahan Maladministrasi	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi	34	34	34	34	34	Ombudsman	
Terwujudnya kehidupan keberagamaan yang inklusif, moderat, dan toleran	Mendorong terbentuknya kepemimpinan politik yang mampu melahirkan kebijaksanaan publik yang inklusif dengan berbasis pada nilai-nilai kebinekaan	Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	Jumlah kelompok masyarakat Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	150 kelompok masyarakat	100 kelompok masyarakat	100 kelompok masyarakat	100 kelompok masyarakat	100 kelompok masyarakat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
	Menyiapkan dan mengembangkan pendidikan kewargaan yang berisi prinsip-prinsip moralitas publik berdasarkan Pancasila demi perawatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat	Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	Jumlah Daerah	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	Kementerian Dalam Negeri	
		Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	11000 Orang	11500 Orang	12000 Orang	12500 Orang	13000 Orang	Kementerian Kebudayaan	Lembaga Sensor Film
		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan di Polbangtan	6	6	6	6	6	Kementerian Pertanian	
			Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III di Polbangtan/PEPI	3	3	3	3	3	Kementerian Pertanian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	3	3	3	3	3	Kementerian Pertanian	
		Pelatihan Manajerial (PPSDM)	Jumlah peserta pelatihan dasar						Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas	80 Peserta	320 Peserta	320 Peserta	480 Peserta	480 Peserta	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator	40 Peserta	160 Peserta	160 Peserta	40 Peserta		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB
		Pembinaan purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Jumlah purnapaskibraka yang dibina	6.732 orang	6.903 orang	7.594 orang	8.353 orang	9.188 orang	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
Pengarusutamaan keteladanan Pancasila dalam ruang-ruang publik	Menumbuhkan apresiasi di masyarakat terhadap berbagai bentuk praktik kebaikan nilai-nilai Pancasila	Warakawuri/ warga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda duda perintis kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan kehormatan/tunjangan keberlanjutan	Jumlah warakawuri/ warga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda duda perintis kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan kehormatan/tunjangan keberlanjutan	487	487	487	487	487	Kementerian Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II	Jumlah Perempuan Potensial di Perdesaan yang dilatih tentang Kepemimpinan	-	360	360	480	360	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kemendes, KPU, dll,
		Pelayanan Arsip Nasional	Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	497.413 Orang	497.413 Orang	601.868 Orang	662.055 Orang	728.26 Orang	Arsip Nasional Republik Indonesia	
		Pengolahan Data dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan Nasional	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	65.000 Arsip	108.476 Arsip	148.612 Arsip	204.599 Arsip	278.931 Arsip	Arsip Nasional Republik Indonesia	
		Pemberian penghargaan pembinaan ideologi Pancasila	Event penghargaan pembinaan ideologi Pancasila		3 Event	3 Event	3 Event	3 Event	Badan pembinaan ideologi Pancasila	
	Mempromosikan teladan pemerintahan dan masyarakat sebagai best practices pengamalan nilai-nilai Pancasila	Dialog Interaktif terkait Anti Hoax dan Isu SARA	Jumlah Daerah	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri	
Terciptanya gelombang budaya populer Indonesia sebagai sarana hegemoni Pancasila	Menciptakan konten-konten hegemoni Pancasila dalam produk-produk budaya populer generasi muda	Penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila	Jumlah Orang	500 orang	4000 orang	800 orang	1000 orang	800 orang	Kementerian Dalam Negeri	
		Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50	55	60	65	70	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Akselerasi sub sektor Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio	Produk Kreatif subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio yang mendapat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			pendampingan dan inkubasi							
		Akselerasi Subsektor Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen	Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Akselerasi sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa	Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang mendapat pendampingan dan inkubasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Fasilitasi Proses Produksi subsektor Film	Pendampingan Pengembangan Produk Unggulan Kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Sosialisasi dan Fasilitasi Pelindungan HKI dan Komersialisasi Produk Kekayaan Intelektual	Produk Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Kegiatan Kontra Radikalisasi	Jumlah Operasi Kontra Radikalisasi	26 Operasi					Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	Mendorong riset dan inovasi seni-budaya daerah untuk menghasilkan konten-konten budaya populer Indonesia yang berdaya saing global	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (Indeks)	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	97	97,5	98	98,5	99	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK)	Produk Kreatif subsektor Ekonomi Kreatif. Target: 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Kebijakan atau kegiatan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembuatan konten-konten di seluruh own media Kementerian Ekraf/Badan Ekraf. Target: 1 Dokumen	Jumlah kebijakan dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di own media Kemen Ekraf/Badan Ekraf	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Riset dan Inovasi tentang Budaya Berkelanjutan	Jumlah Publikasi yang dihasilkan	1	1	1	1	1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	
	Membangun lembaga dan ekosistem industri yang mendukung terciptanya gelombang budaya populer Indonesia	Fasilitasi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Pembentukan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Daerah	20 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	Kementerian Dalam Negeri	
		Penyusunan/Implementasi Kerjasama Luar Negeri Untuk Peningkatan Ekonomi Kreatif	Lembaga/Komunitas/ Asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
		Subsektor Kuliner, Desain, Arsitektur	Lembaga/komunitas/ asosiasi industri kreatif Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur,Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Fesyen yang difasilitasi							
		Music Corner, Fasilitasi dan pendukungan industry kreatif subsector music, film, periklanan, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa	Lembaga/komunitas/ asosiasi industri kreatif Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
ISU SISTEM PENDIDIKAN SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI										
Terwujudnya pengembangan pemahaman Pancasila secara ilmiah	Meluruskan pengetahuan masyarakat mengenai sejarah Pancasila secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan otentik	Fasilitasi Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Dalam Rangka Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Daerah	20 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	Kementerian Dalam Negeri	
		Sosialisasi dan Edukasi Publik	Peningkatan Literasi Pancasila						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Pembinaan Karakter Kebhayangkaraan	Mendorong pemimpin formal (pejabat negara) dan informal (tokoh masyarakat) untuk menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Penguatan Kebijakan Berbasis Pancasila	Materi edukasi berbasis digital, seperti video, infografis, dan platform pembelajaran online, yang menjelaskan sejarah Pancasila secara						Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			otentik dan menarik bagi generasi muda							
	Mengembangkan studi-studi ilmiah tentang Pancasila secara intradisiplin, multidisiplin dan transdisiplin dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pengembangan Kurikulum Berbasis Pancasila	Penguatan Pemahaman Pancasila dalam Pendidikan Kepolisian, Studi intradisiplin berfokus pada pengembangan ilmu kepolisian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, melalui mata pelajaran tentang etika profesi kepolisian						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Penelitian dan Pengembangan	Modul dan Materi Pelatihan Berbasis Pancasila						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Pengembangan Kebijakan dan Regulasi	Dokumen kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi di kepolisian						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Riset dan Inovasi tentang Keindonesiaan	Jumlah Model yang dihasilkan/Jumlah Publikasi yang dihasilkan	-	1	1	1	1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	
Terwujudnya pendidikan dan pelatihan dalam kehidupan nasional yang mendorong pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka	Mengembangkan materi dan metode pembelajaran Pancasila dalam lingkup pendidikan formal, nonformal dan informal	Layanan Penguatan Karakter Peserta Didik	Jumlah layanan terkait penguatan karakter peserta didik	6	6	6	6	6	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal
		Layanan Penguatan Karakter Inklusivitas Satuan Pendidikan	Jumlah layanan terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	2	2	2	2	2	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
mencerdaskan kehidupan bangsa		SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Jumlah SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	514	514	514	514	514	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Direktorat SD, Ditjen Pauddasmen
		SMP yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Jumlah SMP yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	514	514	514	514	514	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Direktorat SMP, Ditjen Pauddasmen
		SMA yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Jumlah SMA yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	74	74	74	74	74	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Direktorat SMA, Ditjen Pauddasmen
		SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	Jumlah lembaga (SMK) yang mendapatkan pendampingan mutu	72					Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
		Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	38	38	38	38	38	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Direktorat PK PLK, Ditjen Diksi dan PK PLPLK
		Buku Pendidikan yang Disusun, Dikembangkan dan Dinilai	Jumlah Buku Pendidikan yang Disusun, Dikembangkan dan Dinilai	2000	2200	2400	2600	2600	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pusat Perbukuan, BSKAP
		Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan	500	700	800	1000		Kementerian Kebudayaan	
		Fasilitasi Peningkatan Layanan Pelindung Kebudayaan	Jumlah Fasilitasi peningkatan layanan pelindungan kebudayaan	200	400	600	800	1000	Kementerian Kebudayaan	
		Pendidikan multimedia dan digital	Jumlah peserta pendidikan multimedia dan digital yang kompeten (orang)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (orang)	7.615	7.186	7.186	7.186	7.186	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pendidikan Vokasi (STPN)	Jumlah siswa Prodi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral						Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	(* penutupan program studi Diploma I sesuai dengan kebijakan Kementerian dan kebutuhan pasar kerja)
			Jumlah siswa Prodi Diploma IV Pertanahan	400	400	400	400	400	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerin Pendiikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek)
		Pengembangan Materi Pembelajaran	Penguatan kompetensi peserta didik dalam berpikir kritis, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sudah tertuang dalam kurikulum Dikbangum	15 giat (100%)	17 giat (100%)	18 giat (100%)	18 giat (100%)	18 giat (100%)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Pembelajaran melalui mentoring atau bimbingan langsung oleh senior di Polri untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan	Pembentukan karakter anggota Polri yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui interaksi sehari-hari di lingkungan kerja						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Penyusunan rekomendasi standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	rekomendasi standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	Mendorong regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan nasional serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk karakter serta peradaban bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Berbasis HAM bagi Perguruan Tinggi	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Berbasis HAM	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial	Jumlah Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial	9	10	10	10	10	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP
		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan di Polbangtan	6	6	6	6	6	Kementerian Pertanian	
			Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III di Polbangtan/PEPI	3	3	3	3	3	Kementerian Pertanian	
		Penguatan Kurikulum Berbasis Pancasila di Lemdiklat Polri	Pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah dan kebhinekaan global						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Naskah Kebijakan Aktual Strategis (Bidang Kebijakan Pembangunan)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan	-	1	-	1	-	Badan Riset dan Inovasi Nasional	
		Riset dan Inovasi tentang Keindonesiaan (Tema Riset: Sistem Pendidikan Nasional Untuk Anak Usia Dini)	Jumlah Publikasi yang dihasilkan	1	1	1	1	1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan	Jumlah NSPK standar nasional bidang perpustakaan yang diterbitkan	4	4	4	4	4	Perpustakaan Nasional	
		Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum yang diakreditasi	1	1	1	1	1	Perpustakaan Nasional	
		Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan	Jumlah perpustakaan khusus yang diakreditasi	50	50	50	50	50	Perpustakaan Nasional	
		Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan	Akreditasi perpustakaan sekolah/madrasah	3.4	3.835	4.28	4.72	5.155	Perpustakaan Nasional	
		Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan	Jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang diakreditasi	100	100	100	100	100	Perpustakaan Nasional	
		Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional	Jumlah NSPK bidang perpustakaan yang ditetapkan	8	8	8	8	8	Perpustakaan Nasional	
		Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Memastikan Sekolah Rakyat tercantum dalam rencana Induk percepatan Pengentasan Kemiskinan	100%					Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
Terwujudnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila	Mewujudkan institusionalisasi Pancasila dalam penyusunan program pembangunan nasional berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	1	9	10	11	12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari	35	40.1	44.3	48	53	Kementerian Kelautan dan Perikanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Penyuluh Kelautan dan Perikanan (Kelompok Masyarakat)							
		Penyusunan rekomendasi kajian kebijakan strategis Peta Jalan PIP	rekomendasi kajian kebijakan strategis Peta Jalan PIP	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
		Penyusunan rekomendasi hasil kajian implementasi PIP	rekomendasi hasil kajian implementasi PIP	2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
Terwujudnya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Mendorong penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang berbasis kearifan lokal	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (paket)	1	9	10	11	12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village*) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)	1	10	10	12	14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi	Jumlah Pusat Kolaborasi Terfasilitasi	35	40	45	50	55	Badan Riset dan Inovasi Nasional	
ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI										
Terwujudnya sistem demokrasi berdasarkan Pancasila	Mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap kebijakan	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Kebijakan Bidang Politik	2 Draf	2 Draf	2 Draf	2 Draf	2 Draf	Komisi Pemilihan Umum	Kementerian Hukum, Bawaslu, DKPP, Kemendagri
		Koordinasi Teknis Sistem MEL untuk Penguatan & Pemberdayaan Ekonomi melaui Skema	Rapat dan diskusi mengenai sistem MEL untuk Penguatan & Pemberdayaan Ekonomi melaui Skema SCLSC di	1	2	2	2	2	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	K/L, Mitra dan Pemda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		SCLSC di masing-masing wilayah	masing-masing wilayah							
		Koordinasi berkala mengenai Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Rapat koordinasi secara berkala dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, Lembaga Donor	1	3	3	3	3	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	K/L, Mitra dan Pemda
	Menjamin hadirnya ruang-ruang partisipasi publik dalam sistem politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	Jumlah Partai Politik pemenang pemilu 2024	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	Kementerian Dalam Negeri	Lemhanas
		Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Jumlah Kader dan pengurus partai politik yang mendapatkan pendidikan politik pemenang pemilu 2024	400 Orang	1000 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	Kementerian Dalam Negeri	Lemhanas
		Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	553 Satker	553 Satker	553 Satker	553 Satker	553 Satker	Komisi Pemilihan Umum	Komisi II DPR, NGO, Kemendagri, Kemendikbud
		Pendataan DPT Berkelanjutan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	553 Satker	553 Satker	553 Satker	553 Satker	553 Satker	Komisi Pemilihan Umum	Kemendagri
		Pengendalian di Ruang Digital	Jumlah Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal (Konten)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kementerian Komunikasi dan Digital	
	Mengoptimalkan peran partai-partai politik di Indonesia dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik, kaderisasi, pendidikan politik, dan menciptakan	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kader dan pengurus partai politik yang mendapatkan pendidikan politik pemenang pemilu 2024	2000 Orang	3450 Orang	3000 Orang	3500 Orang	4000 Orang	Kementerian Dalam Negeri	BRIN, Bappenas, Akademisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa									
	Menumbuhkembangkan peran masyarakat sipil dalam proses pendalaman demokrasi substansial bagi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Pengembangan Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital bagi Masyarakat	Fasilitasi literasi digital untuk kelompok rentan (Orang)	-	200	200	200	200	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Fasilitasi literasi digital untuk anak (Orang)	-	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	0 Satker	0 Satker	553 Satker	553 Satker	553 Satker	Komisi Pemilihan Umum	Kemendagri, LAN, NGO
Terwujudnya hubungan luar negeri yang berdasarkan Pancasila	Membangun hubungan luar negeri yang mengedepankan prinsip kemerdekaan adalah hak setiap bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila	Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	Indeks kemajuan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga	69,75	71,96	73,34	74,59	76,21	Kementerian Luar Negeri	
		Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	87	87,50	88	88,50	90	Kementerian Luar Negeri	
		Koordinasi Pelindungan dan Pemenuhan kebutuhan HAM WNI di luar negeri	Kegiatan	0	3	4	6	8	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Layanan Pelindungan dan pemenuhan kebutuhan HAM WNI di luar negeri	Layanan	0	20	20	20	20	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Pengelolaan Administrasi dan Kerjasama Internasional	Layanan Dukungan Penyelenggaraan Sidang Internasional (Kesepakatan)	6	7	7	7	7	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	Layanan Kerjasama Internasional	2	2	2	2	2	Kementerian Kehutanan	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
										Hidup, Bappenas, Kementerian Keugangan.
	Meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi-organisasi Internasional dalam rangka menjaga ketertiban dunia	Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja Sama Multilateral	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	Kementerian Luar Negeri	
		Pengelolaan Administrasi dan Kerjasama Internasional	Pertemuan Kelembagaan Internasional (Kesepakatan)	12	12	12	12	12	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri (Dokumen)	2	7	7	7	7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93	94	95	95,5	96	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
	Sinkronisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam formulasi dan implementasi kebijakan diplomasi ekonomi	Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi	76	77	78	79	80	Kementerian Luar Negeri	
		Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan Ekspor Produk	4,23	6,64	7,15	7,82	8,71	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatkan peran perwakilan negara dalam mempromosikan Indonesia di luar negeri berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	Indeks citra Indonesia di dunia internasional	4,10	4,12	4,14	4,16	4,18	Kementerian Luar Negeri	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Tujuan 1: Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong										
Diterapkannya Asas kekeluargaan dan gotong royong oleh setiap badan usaha	Menciptakan atau membentuk ekosistem badan usaha yang mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha	Orang	153	40.5	40.5	40.5	40.5	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Fasilitasi Sosialisasi Pembentukan Koperasi dari Kelompok Strategis	Pembinaan dan/atau Sosialisasi yang dilaksanakan	2	5	5	5	5	Kementerian Koperasi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota
		Pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan ekosistem rantai pasok semi tertutup (*Semi Closed-Loop Supply Chain*, SCLSC)	Adanya pengembangan model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kartu Usaha	5 Pemda	5 Pemda	5 Pemda	5 Pemda	5 Pemda	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
		Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat melalui Kelembagaan Berbasis Lahan TORA	Jumlah Koperasi Produktif berbasis TORA	10	20	30	40	50	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
			Jumlah Kelompok Tani Mengakses Pembiayaan dan Pasar	15	25	35	45	55	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Pembentukan Koperasi dan Kelompok Usaha TORA	Jumlah Koperasi yang terbentuk & aktif	200	300	400	500	600	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
			Jumlah Kelompok Usaha akses pembiayaan	100	200	300	400	500	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	Melakukan evaluasi terhadap seluruh aturan yang ada terkait kesesuaian dengan asas kekeluargaan dan gotong royong	Penyusunan design & Implementasi Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran/ MEL untuk penguatan & pemberdayaan ekonomi melalui Industrialisasi dalam skema SCLSC	Dokumen Kerangka Kerja MEL, Dokumen Panduan Teknis (SOP) MEL, Sosialisasi SOP MEL untuk penguatan & pemberdayaan ekonomi melalui skema SCLSC di masing-masing wilayah, serta tersedia Sistem Digital (*Dashboard*) Pemantauan Terintegrasi berbasis data realtime	1					Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Nasional, Daerah
Tersedianya regulasi yang mendorong penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong	Memasukkan unsur kekeluargaan dan gotong royong ke dalam setiap peraturan yang akan disusun oleh pemerintah/badan usaha	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha	Orang	153	40.5	40.5	40.5	40.5	Kementerian Hak Asasi Manusia	
Terciptanya pemahaman dan kesadaran bersama akan pentingnya penerapan Sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong	Mengkampanyekan pembudayaan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha	Orang	153	40.5	40.5	40.5	40.5	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan), (Promosi)	174	190	190	190	190	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri (Promosi)	4	5	6	7	38	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional yang diikuti (Promosi)	1	7	7	7	7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	Memasukkan konsep sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dalam kurikulum pembelajaran mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha	Orang	153	40.5	40.5	40.5	40.5	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	2.507	1.97	2.187	2.187	2.187	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Tujuan 2: Semakin menguatnya peran koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sistem perekonomian nasional										
Meningkatnya akses koperasi, serta usaha mikro,kecil, dan menengah terhadap sumber daya ekonomi	Pengadaan akses finansial bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang mudah dan terjangkau	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Nilai Penyaluran KUR	300 Triliun					Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendag, Kemenaker, Kementan, Kemen KP, Kemen BUMN, Kemendagri, Kemen Pariwisata, Sekretaris Kabinet, BP2MI, Bappenas
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina (UMKM)	-	600	700	800	1400	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan (bidang)	1	1	1	1	2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Fasilitasi Permodalan dan Penjaminan Konvensional	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pendampingan dalam Pengembangan akses pembiayaan	2	2	2	2	2	Kementerian Koperasi	LPDB, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perbankan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pendampingan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Jumlah UMK yang difasilitasi Pendampingan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil/Sentra	Jumlah UMK yang difasilitasi Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil/Sentra						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Pembentukan Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Penyusunan kajian komprehensif tentang urgensi Pembentukan Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta sosialisasinya		1				Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
			Pembentukan Forum Pembelajaran Learning Loop untuk Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan			1			Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
Meningkatnya daya saing koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pendampingan pengembangan usaha, insentif pajak rendah dan adopsi teknologi untuk menciptakan efisiensi bagi usaha mikro dan kecil	Penyelenggaraan Program Kewirausahaan pada Klien Pemasyarakatan melalui Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Program Kewirausahaan pada Bapas	5 Bapas	5 Bapas	5 Bapas	5 Bapas	5 Bapas	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Layanan Yang Mendukung Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	IKM yang mendapatkan Layanan Desain Kemasan dan Merek	50	50	175	175	175	Kementerian Perindustrian	
			IKM yang mendapatkan Layanan HKI	180	200	375	375	375	Kementerian Perindustrian	
		Bimtek Pengembangan Produk dan Kemasan	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan produk dan kemasan	500 UMKM					Kementerian Perdagangan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengelolaan keuangan	400 UMKM					Kementerian Perdagangan	
		Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya UMKM yang Dilayani Permodalan Usaha Kelautan dan Perikanan (UMKM)	1851	1851	1851	1851	1851	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pendidikan Usaha Kecil Berbasis SKKNI	Jumlah Usaha Kecil yang mendapatkan pendidikan pengembangan kompetensi kapasitas SDM berbasis SKKNI						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
Meningkatnya akses koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah kepada pasar	Penyediaan pasar bagi usaha mikro dan kecil	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan)	174	190	190	190	190	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Fasilitasi Perluasan Akses Pasar/ Promosi bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diFasilitasi Perluasan akses pasar/ promosi Usaha Mikro bisa melalui LKPP, *E-Commerce*, Pameran , Promosi Kawasan Wisata						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Peningkatan Jaringan Pemasaran Luar Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi Peningkatan Jaringan Pemasaran Luar Negeri						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Peningkatan Jaringan Pemasaran Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi Peningkatan Jaringan Pemasaran Dalam Negeri						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Peningkatan jumlah UMKK yang on boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	Penyedia UMKK yang on boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	500 UMKK	500 UMKK	500 UMKK	500 UMKK	500 UMKK	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKK dalam PBJ	Pelaku usaha UMKK yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas usaha dalam PBJ	500 UMKK	500 UMKK	500 UMKK	500 UMKK	500 UMKK	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
		Penguatan kapasitas Koperasi Modern Multi-Pihak berbasis industrialisasi	Penerapan ekosistem *Semi Closed-Loop Supply Chain* (SCLSC)	1	1	1	1	1	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
Tujuan 3: Terciptanya ekosistem usaha yang adil										
Terciptanya iklim usaha yang memberdayakan kemandirian ekonomi rakyat sehingga ikut berperan dalam pembangunan nasional	Pemberian bantuan/insentif bagi ekspansi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	Program penyelenggaraan jaminan produk halal	N/A						Kementerian Agama	
		Akses dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Promosi usaha dan investasi Kelautan dan Perikanan	-	5	6	6	9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Terciptanya iklim usaha yang mengutamakan potensi lokal	Pendampingan dan pengembangan pemain lokal (local champion) yang memimpin pasar dalam negeri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	IKM berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi	22	32	44	44	44	Kementerian Perindustrian	
			Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan	5	12	36	37	38	Kementerian Perindustrian	
		Tata Kelola Pengembangan Ekosistem Digital Nasional	RPP Ekosistem Digital (RPP)	-	-	-	1	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rekomendasi Kebijakan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Ekosistem Digital (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	1	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pengembangan Ekosistem untuk Startup Digital dan Gim Nasional	Fasilitasi Digital Technopreneur (*Startup*)	7	-	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Startup Digital Terakselerasi (*Startup* Digital)	-	150	150	150	150	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Ekosistem Startup Digital Kota (Kumulatif) (6 Kota)	2	4	6	8	10	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Pengukuran Ekosistem *Startup* Digital (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Fasilitasi Akselerasi Startup Game (*Startup*)	20	-	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Akselerator dan inkubator gim (*Startup* Gim)	-	40	40	40	40	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Layanan klasifikasi gim (Layanan)	-	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Regulasi dan kebijakan strategis terkait industri gim (Rekomendasi Kebijakan)	-	2	2	2	2	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Rekomendasi Kebijakan Implementasi Klasifikasi Gim (Rekomendasi Kebijakan)	1	-	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I	Jumlah SDM Potensial yang diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan	0	360	360	480	360	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kemenko Ekonomi, Kementerian UMKM, dll.
		Penguatan Ekonomi Wilayah dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pelibatan Kelembagaan Ekonomi yang berjejaring dalam satu ekosistem SCLSC pada Wialayah Rintisan	2	2				Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
			Pelibatan Kelompok Miskin dalam Ekosistem SCLSC	2	2				Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
		Pelibatan Pengusaha Daerah/ Nasional	Jumlah Dokumen Pemetaan Pengusaha Daerah/Nasional yang Memiliki Komitmen untuk Mendukung Pengusaha Mikro dan Kecil	2	5	5	5	5	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
			Jumlah Pengusaha Daerah/Nasional yang Memiliki Komitmen untuk Mendukung Pengusaha Mikro dan Kecil	2	5	5	5	5	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
			Jumlah Pengusaha Mikro yang telah Memiliki Akses dari Pengusaha Daerah/Nasional	50	100	110	110	110	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
			Peningkatan Pelatihan dan Pembinaan untuk Kelompok Usaha Masyarakat Miskin	5	12	12	12	12	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	Mendorong kemitraan koperasi dan UMKM lokal dengan usaha besar dan pengaturan penyerapan konten lokal	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	IKM yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya	9	10	20	20	20	Kementerian Perindustrian	
		Sosialisasi dan Aktivasi Kecintaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Peserta yang tersosialisasikan Kecintaan Produk Dalam Negeri	3 Promosi, Kegiatan					Kementerian Perdagangan	
		Fasilitasi Kemitraan Pemasaran	Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan pemasaran	500 UMKM					Kementerian Perdagangan	
		Promosi Pameran Produk Dalam Negeri	Menjembatani peningkatan akses pemasaran produk UMKM melalui penyelenggaraan pameran dalam negeri	6 Promosi, Kegiatan					Kementerian Perdagangan	
		Pengembangan Industri Pos Logistik dan Penyiaran	Fasilitasi Kerjasama Penyelenggara Pos dengan UMKM (UMKM)	15	-	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Pengembangan Ekosistem untuk Startup Digital dan Gim Nasional	Kemitraan dan investasi gim (*Startup* Gim)	-	10	10	10	10	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	1510	400	500	500	1000	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Kemitraan Usaha Nasional	Jumlah Kemitraan Usaha Nasional	0	1000 Kemitraan	1000 Kemitraan	1000 Kemitraan	1000 Kemitraan	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pendampingan Kemitraan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pendampingan kemitraan						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Pembinaan Peningkatan Hilirisasi Produksi Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pembinaan peningkatan hilirisasi produksi usaha mikro						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Fasilitasi Perluasan Kemitraan bagi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi perluasan kemitraan bagi usaha menengah						Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Implementasi skema SCLSC dalam perekonomian	Adanya pengembangan model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	0,97%	3%	3%	3%	3%	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Penyusunan NSPK pemberdayaan ekonomi	Industrialisasi berbasis koperasi modern dan kartu usaha	1					Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Kemenkop, Kemendesa PDT
Terciptanya iklim usaha yang terhindar dari pemusatan sumber daya oleh perseorangan/kelompok	Pengawasan terhadap penguasaan pasar	Kajian Pelaku Usaha dan Struktur Pasar Pengawasan Persaingan Usaha	Jumlah kajian struktur pasar pengawasan persaingan usaha (Kajian)	2	-	-	-	-	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
		Pemetaan pelaku usaha dan struktur pasar di sektor prioritas	Jumlah kajian pemetaan pelaku usaha dan struktur pasar di sektor prioritas (Kajian)	-	3	3	3	3	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
		Kajian Kebijakan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga	Jumlah kajian Analisa kebijakan persaingan pada Kementrian/Lembaga (Kajian)	2	-	-	-	-	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
		Analisis kebijakan persaingan usaha padaKementerian/Lembaga	Jumlah analisis kebijakan persaingan usaha pada Kementrian/Lembaga (Kaijan)	-	3	3	3	3	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Persaingan Usaha	Jumlah rekomendasi kebijakan Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Persaingan Usaha (Rekomendasi Kebijakan)	4	4	4	4	4	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
		Sosialisasi dan Diseminasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha (Orang)	750	681	681	681	681	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
Tujuan 4: Terpenuhinya hak dasar warga negara										
Meningkatnya kesempatan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan	Penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang tersedia	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Diberdayakan	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri Pemula	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	Kementerian Ketenagakerjaan	Ditjen Binapenta dan PKK
			Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Muda	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Kementerian Ketenagakerjaan	Ditjen Binapenta dan PKK
			Jumlah Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	Kementerian Ketenagakerjaan	Ditjen Binapenta dan PKK
		Meningkatnya Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang di tempatkan	250.000 Orang	250.000 Orang	250.000 Orang	250.000 Orang	250.000 Orang	Kementerian Ketenagakerjaan	Ditjen Binapenta
		Penumbuhan Wirausaha baru	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	32	40	50	60	70	Kementerian Perindustrian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Komdigi	Pelatihan Bidang Komdigi (Orang)	500	400	400	400	400	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Peserta Didik Perguruan Tinggi Bidang Komdigi (mahasiswa)	2454	2224	2104	2104	2104	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja	2134	1675	1859	1859	1859	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
	Reviu terkait peraturan ketenagakerjaan untuk mencari formulasi kebijakan yang tepat dan berimbang yang dapat meningkatkan martabat tenaga kerja Indonesia									
	Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan	Pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian Norma dan/atau Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diberikan layanan Pembinaan, Pemeriksaan dan/atau Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	100 Perusahaan	125 Perusahaan	150 Perusahaan	175 Perusahaan	200 Perusahaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Ditjen Binwasnaker
		Penanganan Pengaduan atas Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	Persentase Pengaduan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang Ditindaklanjuti pada Tahun 'N'	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Ketenagakerjaan	Ditjen
		Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah unsur *tripartite* yang memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan	1.100 Orang	1.200 Orang	1.300 Orang	1.400 Orang	1.500 Orang	Kementerian Ketenagakerjaan	Ditjen PHI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Hubungan Industrial Pancasila							
Meningkatnya jaminan sosial yang layak	Reforma program jaminan kesejahteraan sosial	Pelayanan Kesehatan dan JKN	Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibayarkan iurannya	96.800.000 Jiwa	96.800.000 Jiwa	96.800.000 Jiwa	96.800.000 Jiwa	96.800.000 Jiwa	Kementerian Kesehatan	Kemensos dan BPJS Kesehatan
			Jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) Kelas III yang dibayarkan iurannya	49.603.175 Jiwa	49.603.175 Jiwa	49.603.175 Jiwa	49.603.175 Jiwa	49.603.175 Jiwa	Kementerian Kesehatan	Kemensos dan BPJS Kesehatan
		Program Kartu Sembako	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan pangannya.	18,8 juta	18,2 juta	18,2 juta	18,2 juta	18,2 juta	Kementerian Sosial	
		Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah penerima bantuan sosial bersyarat pendidikan dan kesehatan	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta	Kementerian Sosial	
		Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	Persentase Jumlah Korban Bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	530	50	630	700	800	Kementerian Sosial	
		Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam, sosial dan non alam.	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	8%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Sosial	
		Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Terlaksananya bantuan sosial bantuan papan	Jumlah penerima bantuan papan	1.5	0	45.5	46	46.5	Kementerian Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar kelompok masyarakat rentan	Jumlah kelompok rentan yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen	6.5	10.326	24	28	11.48	Kementerian Sosial	
		Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen	64.1	15.03	70.8	74.4	129.2	Kementerian Sosial	
		Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen	37.37	14.5	41.3	43.4	63.86	Kementerian Sosial	
		Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar Anak	Jumlah Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen	41.84	14.5	46.2	48.6	57.927	Kementerian Sosial	
		Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen	4.3	-	-	-	-	Kementerian Sosial	
		Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar Yatim Piatu (Yapi)	Jumlah Yapi yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup	270	10	270	270	150	Kementerian Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			layak sesuai hasil asesmen							
		Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV	Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen	14.73	5.5	21	22	23	Kementerian Sosial	
		Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kelompok pekerja bukan penerima upah yang mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50 Lembaga	75 Lembaga	100 Lembaga	125 Lembaga	150 Lembaga	Kementerian Ketenagakerjaan	Ditjen PHI dan Jamsos
		Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	Jumlah Perlindungan usaha budi daya skala kecil (orang)	-	600	600	600	900	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100	100	100	100	100	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan yang dihasilkan (layanan)	-	4	4	4	4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Perluasan Program Bantuan Sosial yang disalurkan melalui Kartu Kesejahteraan	Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha	5%	10%	10%	10%	10%	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Bappenas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
Meningkatnya derajat tingkat pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas aspek kesehatan dan pendidikan	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	1	1	1	1	1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan)	Kemenkes, Kemendukbangga
		Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	1	1	1	1	1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan)	Kemendikdasmen Kemenag, dan Kemendiktisaintek.
		Perbaikan Data Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar bagi santri	Data terintegrasi EMIS, Dapodik, DTKS						Kementerian Agama	
		Penyaluran Bantuan Program Indonesia Pintas bagi Santri	Penerima tepat sasaran Program Indonesia Pintar pada Pesantren						Kementerian Agama	
		Program Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	65%	70%	76%	83%	90%	Kementerian Kesehatan (Ditjen Farmalkes)	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
			Persentase Kab/Kota dengan puskesmas mampu PONED sesuai standar	20%	30%	50%	65%	80%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase Kab/Kota dengan puskesmas mampu PONED sesuai standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Persentase Pustu Sesuai standar						Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase Pustu Sesuai standar
			Persentase laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya (IKP)	30%	70%	90%	95%	100%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya (IKP)
			Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	25%	35%	45%	65%	80%	Kementerian Kesehatan (Ditjen Kesprimkom)	Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif
			Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	80%	82%	85%	88%	90%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)
			Cakupan antenatal care (ANC) sesuai standar (12T)	63%	66%	69%	72%	75%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Cakupan antenatal care (ANC) sesuai standar (12T)
			Persentase persalinan di Fasyankes	88%	89%	91%	93%	95%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase persalinan di Fasyankes
			Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar (IKP)	35%	45%	55%	70%	85%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar (IKP)
			Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Skrining Kesehatan	355	40%	55%	75%	90%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Skrining Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan perkembangan	50%	55%	60%	65%	70%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan perkembangan
			Persentase kab/kota dengan cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80%	40%	60%	70%	80%	90%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase kab/kota dengan cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80%
			Persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan	50%	55%	60%	65%	70%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesga)	Persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja (IKP)	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Kesehatan (Ditjen Kesprimkom)	Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja (IKP)
			Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	50%	55%	60%	65%	70%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesren)	Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar
			Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapat pelayanan Kesehatan (IKP)	30%	40%	50%	60%	70%	Kementerian Kesehatan (Ditjen Kesprimkom)	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapat pelayanan Kesehatan (IKP)
			Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	10%	15%	20%	25%	30%	Kementerian Kesehatan (Dit Kesren)	Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa
			Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan						Kementerian Kesehatan (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Persentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi Rutin						Kementerian Kesehatan (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Persentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi Rutin
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (IKP)	80%	85%	90%	93%	95%	Kementerian Kesehatan (Ditjen Pencegahan Penyakit)	Cakupan imunisasi bayi lengkap (IKP)
		Pendidikan dan Program Vokasi	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	15%	20%	25%	30%	35%	Kementerian Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan
			Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya (IKP)	65%	70%	75%	80%	85%	Kementerian Kesehatan	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya (IKP)
			Persentase kab/kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan terakreditasi	30	45	60	80	95	Kementerian Kesehatan	Persentase kab/kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan terakreditasi
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Tanpa Puskesmas						Kementerian Kesehatan (Dit Fasyankes)	Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Tanpa Puskesmas
		Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	17%	22%	30%	40%	50%	Kementerian Kesehatan (Dit Gun Nakes)	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar
			Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes	61 Orang	62 Orang	63 Orang	64 Orang	65 Orang	Kementerian Kesehatan (Dit Gun Nakes)	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Primer di Wilayah Papua							Fasyankes Primer di Wilayah Papua
		Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri dalam penumbuhan sektor industri manufaktur	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler	2.551	10.5	11	11.5	12	Kementerian Perindustrian	
			Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerjasama Industri	34	250	280	310	340	Kementerian Perindustrian	
			SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	1.352	6.5	6.75	7	7.25	Kementerian Perindustrian	
		Melaksanakan pelatihan vokasi industri	Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	500	550	600	650	700	Kementerian Perindustrian	
		Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah nelayan yang difasilitasi perlindungannya (orang)	-	100	200	300	400	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten (orang)	7.615	7.186	7.186	7.186	7.186	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Unit)	5	10	10	10	10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pembinaan Ketahanan Remaja	Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan GenRe (Generasi Berencana) Dalam Rangka Pembentukan Karakter Remaja	38	38	38	38	38	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
									Berencana Nasional	
			Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	384	384	384	384	384	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	
		Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Jumlah langganan jurnal elektronik, e-tool, pangkalan data elektronik	10	10	10	10	10	Perpustakaan Nasional	
		Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah perpustakaan yang tergabung jejaring	654	676	697	711	747	Perpustakaan Nasional	
		Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah koleksi perpustakaan yang tergabung jejaring	950.609	1.140.730	1.330.852	1.520.937	1.711.095	Perpustakaan Nasional	
		Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Jumlah bantuan bahan bacaan bermutu	10	10	10	10	10	Perpustakaan Nasional	
		Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Jumlah bantuan perpustakaan keliling	48	148	198	248	298	Perpustakaan Nasional	
		Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	40	70	90	110	130	Perpustakaan Nasional	
		Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Jumlah titik baca yang terbangun dan terselenggara di daerah	100	100	100	100	100	Perpustakaan Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Peningkatan akses Pendidikan Alternatif bagi anak	Peningkatan Jumlah Sekolah Rakyat Aktif	10	20	35	50	65	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan akses Pendidikan Alternatif bagi anak
			Fasilitasi Anak Rumah Tangga Miskin melalui Sekolah Rakyat	125	250	50	750	1000	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pendidkan	Peningkatan jumlah Fasilitator bersertifikat	500	800	1200	1500	2000	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pendidkan
			Peningkatan Forum Fasilitator Aktif	100	150	200	250	300	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Pemetaan Wilayah Prioritas dan anak usia sekolah	Peningkatan Jumlah Desa terpetakan	125	250	500	750	1000	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemetaan Wilayah Prioritas dan anak usia sekolah
			Peningkatan Jumlah Lokasi diverifikasi	125	250	500	750	1000	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Terbentuknya Sekolah Rakyat Aktif dengan Dukungan Legal	Peningkatan Jumlah SK Operasional Sekolah Rakyat	500	800	1200	1500	2000	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Terbentuknya Sekolah Rakyat Aktif dengan Dukungan Legal
			Peningkatan Jumlah MoU dengan Pemerintah Daerah/CSR	125	250	500	750	1000	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Penyediaan Fasilitator Komunitas Bersertifikat	Jumlah Fasilitator yang Dilatih	500	800	1200	1500	2000	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan Fasilitator Komunitas Bersertifikat
			Jumlah Fasilitator yang Memperoleh Pembinaan Lanjutan/Pengembang	125	250	500	750	1000	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			an Kapasitas Setiap Tahun							
		Akses pendidikan merata untuk semua anak	Akses pendidikan yang baik bagi anak-anak pemulung						Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Akses pendidikan merata untuk semua anak
Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu dan bergizi baik bagi setiap warga negara	Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, bermutu dan bergizi baik, untuk memenuhi konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan	Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional	Pengelolaan komunikasi publik Makan Bergizi Gratis (Orang)	13.818.750	13.818.750	13.818.750	13.818.750	13.818.750	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Menyusun neraca pangan sebagai instrumen memastikan ketersediaan pangan	Tersusunnya neraca pangan pusat dan daerah (rekomendasi kebijakan)	39	39	39	39	39	Badan Pangan Nasional	Kemenko Bidang Pangan, Kementan, Kemendag, Kemenperin, BPS, Bulog/BUMN Pangan, Pemda
		Pengelolaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras (juta ton)	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5	Badan Pangan Nasional	Kemenko Bidang Pangan
	Melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan guna menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat sampai pada tingkat perseorangan	Melaksanakan Gerakan Pangan Murah	Terlaksananya Gerakan Pangan Murah di Pusat dan Daerah (lokasi)	375	514	514	514	514	Badan Pangan Nasional	BULOG/BUMN Pangan dan Pemda
		Penyediaan data dan informasi harga pangan yang akurat	Tersedianya informasi panel harga pangan yang akurat (aplikasi)	1	1	1	1	1	Badan Pangan Nasional	Pemda
		Fasilitasi Distribusi Pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit	Jumlah pangan yang terdistribusi (ton)	1,000.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	35,000.00	Badan Pangan Nasional	BULOG/BUMN Pangan dan Pemda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Pemantauan dan pengendalian harga pangan strategis	Inflasi harga bergejolak (%)	3-5	3-6	3-7	3-8	3-9	Badan Pangan Nasional	Kemenko Bidang Pangan - Satgas Pangan POLRI BULOG dan Pemda
	Melaksanakan penganekaragaman pangan yang bermutu dan bergizi baik dengan berbasis pada potensi sumber daya dan kearifan lokal	Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya promosi pangan B2SA di pusat dan daerah (kegiatan)	39	39	39	39	39	Badan Pangan Nasional	Kemenko Bidang Pangan, Kemendikdasmen, Kemenag, BGN, Pemda
		Pembinaan pelaku usaha pangan lokal	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan (unit)	10	77	115	153	191	Badan Pangan Nasional	Kementerian UMKM, dan Pemda
		Pengembangan Rumah Pangan B2SA	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan (kelompok masyarakat)	101	517	1.032	1.547	2.062	Badan Pangan Nasional	Kemenko Bidang Pangan, BGN, dan Pemda
	Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bantuan pangan, pangan bersubsidi, atau pangan lain yang dibutuhkan untuk kelompok rawan pangan dan gizi guna mencapai ketercukupan gizi nasional	Penyaluran bantuan pangan terfortifikasi	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan (%)	20	40	60	80	100	Badan Pangan Nasional	BULOG/BUMN Pangan dan Pemda
		Penyaluran bantuan pangan	Terdistribusikannya bantuan pangan pemerintah (KK)	18.277.083	20.258.089	18.375.089	16.392.089	14.456.089	Badan Pangan Nasional	BULOG/BUMN Pangan dan Pemda
		Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	Terdistribusikannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan (KK)	64.8	64.8	71.28	86.249	86.249	Badan Pangan Nasional	Pemda
Terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur, perumahan dan	Memudahkan dan/atau memfasilitasi masyarakat secara	Peningkatan Kepemilikan Legal atas Tanah oleh Rumah Tangga Miskin	Persentase Peningkatan Kepemilikan Lahan oleh	2%	3%	4%	4%	4%	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
kawasan permukiman yang menjamin kebutuhan setiap warga negara untuk menempati atau memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam kawasan permukiman yang mendukung perikehidupan dan penghidupan	administrasi, pendanaan, dan/atau pembiayaan untuk menempati atau memiliki rumah yang layak dan terjangkau	Distribusi Bidang Tanah Legal kepada Rumah Tangga Miskin	Persentase Peningkatan Luas Tanas yang Didistribusikan secara Legal	2%	3%	4%	4%	4%	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
			Penerbitan Sertifikat Bidang Tanah	15%	25%	35%	45%	50%	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
			Penerbitan Sertifikat Hak Milik	12%	20%	28%	32%	40%	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
	Meningkatkan kualitas rumah dan kawasan kumuh sehingga menjadi lebih layak dan sehat									
	Menyediakan dan/atau memfasilitasi pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana, dan utilitas umum yang mendukung perikehidupan dan penghidupan warga negara	Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (RPerpres)	Rancangan Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi kebijakan	-	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Rekomendasi Modernisasi Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Reviu Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi kebijakan	1	3	2	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Rekomendasi Kebijakan Kerjasama *Over-The-Top* (OTT) Dengan Penyelenggara Jaringan (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi kebijakan	1	-	-	-	-	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Rekomendasi Kebijakan Strategi Gigabit City (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi kebijakan	1	2	2	2	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
		Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penerapan Pentarifan, Interkoneksi Dan Kompetisi (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	1	Kementerian Komunikasi dan Digital	
	Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, sarana, prasarana, serta utilitas umum agar tetap berfungsi dengan baik dan dapat terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal	Operational Maintenance (OM) BTS 4G/Lastmile (Titik/Lokasi)	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Operational Maintenance (OM) BTS 4G/Lastmile Papua dan Papua Barat (Titik/Lokasi)	3,539	3,539	3,539	3,539	3,539	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Operational Maintenance (OM) Akses Internet (Titik/Lokasi)	33,018	32,818	32,618	32,418	32,155	Kementerian Komunikasi dan Digital	
			Operational Maintenance (OM) Akses Internet Papua dan Papua Barat (Titik/Lokasi)	3,812	4,312	4,812	5,312	5,747	Kementerian Komunikasi dan Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Operational Maintenance (OM) SATRIA-1 (Unit)	150	150	150	150	150	Kementerian Komunikasi dan Digital	
Tujuan 5: Terwujudnya kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai pokok kemakmuran rakyat yang berwawasan lingkungan										
Terwujudnya kedaulatan negara atas penguasaan sumber daya alam	Penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan SDA di Indonesia yang berorientasi pada Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945	Revisi Regulasi Mineral dan Batubara	Draft Perundang-undangan Bidang Mineral dan Batubara	8	1	1			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditjen Binapenta dan PKK
		Revisi Regulasi Energi Baru Terbarukan	Draft Perundang-undangan Bidang Energi Baru Terbarukan	10	1	3		2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditjen Binapenta dan PKK
		Revisi Regulasi Ketenagalistrikan	Draft Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	8	4				Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditjen Binapenta dan PKK
		Revisi Regulasi Minyak dan Gas Bumi	Draft Perundang-undangan Bidang Minyak dan Gas Bumi	4				1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditjen Binapenta dan PKK
		Revisi Regulasi Kegeologian	Draft Perundang-undangan Bidang Kegeologian	3		1	1	2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	4	4	4	4	4	Kementerian Kehutanan	ATR/BPN, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial.
			Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	100 Kelompok Masyarakat	250 Kelompok Masyarakat	250 Kelompok Masyarakat	250 Kelompok Masyarakat	250 Kelompok Masyarakat	Kementerian Kehutanan	BIG, BRIN, Bappenas, ATR/BPN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Strengthening Social Forestry in Indonesia Project	4	0	0	0	0	Kementerian Kehutanan	Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN.
			Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat*	252 Kelompok Masyarakat	252 Kelompok Masyarakat	252 Kelompok Masyarakat	252 Kelompok Masyarakat	252 Kelompok Masyarakat	Kementerian Kehutanan	ATR/BPN, BIG, BRIN.
		Pengendalian Perhutanan Sosial	Layanan Pengendalian Perhutanan Sosial	4	4	4	4	4	Kementerian Kehutanan	Bappenas, Kementerian Desa PDT, Kementerian Koperasi/ Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian.
			Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial	1.600 Orang	2.463 Orang	3.326 Orang	4.189 Orang	5.052 Orang	Kementerian Kehutanan	Bappenas, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi/ Kementerian UMKM.
			Evaluasi pemberian persetujuan kelola kawasan hutan oleh masyarakat	30 Kelompok Masyarakat	210 Kelompok Masyarakat	420 Kelompok Masyarakat	630 Kelompok Masyarakat	840 Kelompok Masyarakat	Kementerian Kehutanan	Kementerian ATR/BPN, BRIN, BIG, Kementerian Hukum.
		Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	2	4	4	4	4	Kementerian Kehutanan	
			Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	1	1	1	1	Kementerian Kehutanan	
			Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	21	20	20	20	20	Kementerian Kehutanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			KPH yang masuk kategori efektif	20	140	160	180	200	Kementerian Kehutanan	
		Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Usaha Pemanfaatan Hutan	1	3	3	3	3	Kementerian Kehutanan	
			Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	40	45	50	55	60	Kementerian Kehutanan	
			Badan Usaha yang ditingkatkan investasinya	40	64	100	153	231	Kementerian Kehutanan	
			Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	40	75	139	251	442	Kementerian Kehutanan	
		Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	1	3	3	3	3	Kementerian Kehutanan	
			Layanan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	50	60	65	70	75	Kementerian Kehutanan	
			Penguatan peran bisnis dalam pengelolaan hutan	16	23	31	43	58	Kementerian Kehutanan	
			Modeling pengembangan produk bioekonomi	2	4	6	8	10	Kementerian Kehutanan	
			Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	28	56	84	112	140	Kementerian Kehutanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	20	279	296	320	354	Kementerian Kehutanan	
			Produksi kayu bulat berkelanjutan	272	280	280	300	310	Kementerian Kehutanan	
			Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	24	37	56	84	124	Kementerian Kehutanan	
			Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	272	280	290	300	310	Kementerian Kehutanan	
		Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1	3	3	3	3	Kementerian Kehutanan	
			Layanan Pembayaran Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penatausahaan Hasil Hutan	295	300	305	310	315	Kementerian Kehutanan	
			Pembinaan Pembayaran Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak	30	50	60	70	80	Kementerian Kehutanan	
			Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional	30	50	60	70	80	Kementerian Kehutanan	
			Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	295	300	305	310	315	Kementerian Kehutanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	2	4	4	4	4	Kementerian Kehutanan	
			Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	2.5	2.6	2.65	2.7	2.75	Kementerian Kehutanan	
			Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	40	45	50	55	60	Kementerian Kehutanan	
			UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian Oleh Direktorat	25	30	35	40	45	Kementerian Kehutanan	
			UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	75	100	125	150	165	Kementerian Kehutanan	
			Pembinaan hilirisasi industri pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Kecil dan Menengah	200	205	210	215	230	Kementerian Kehutanan	
			Pembinaan hilirisasi industri pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Besar	150	155	160	165	170	Kementerian Kehutanan	
		Pengendalian Kebakaran Hutan	Kelompok Masyarakat yang Terlibat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan	1	1.8	2	2.2	2.4	Kementerian Kehutanan	
			Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Melalui Pemadaman Darat	925	926	927	928	929	Kementerian Kehutanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Melalui Pemadaman dari Udara	50	50	52	52	54	Kementerian Kehutanan	
			Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	26	30	35	40	45	Kementerian Kehutanan	
		Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan	Masyarakat yang terlibat pencegahan kerusakan hutan	500	1.5	1.6	1.7	1.8	Kementerian Kehutanan	
			Peta Kerawanan Kawasan Hutan	1	1	1	1	1	Kementerian Kehutanan	
			Penanganan aduan atas usaha dan/atau kegiatan bidang kehutanan	80	82	84	86	88	Kementerian Kehutanan	
		Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Kehutanan	Layanan Hukum	1	1	1	1	1	Kementerian Kehutanan	
			Layanan Bantuan Hukum	22	58	63	68	72	Kementerian Kehutanan	
	Meningkatkan kepemilikan negara dalam usaha pengelolaan barang tambang dan mineral yang bersifat strategis melalui BUMN	Partisipasi Interest Kepemilikan Saham Peserta Nasional di Perusahaan Asing yang ada di Indonesia	Peningkatan Kepemilikan Saham Nasional Minimal 51 Persen di Perusahaan PMA	1	1	1	1	1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Pelaksanaan transfer teknologi dan keterampilan di bidang	Proses Persetujuan Plan of Development (POD) Migas	Jumlah POD Migas	1	1	1	1	1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	pertambangan dan energi oleh perusahaan-perusahaan asing terkait sebagai syarat investasi									
Meningkatnya akses rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam	Menumbuhkan koperasi sebagai unit usaha pengelolaan barang tambang di berbagai daerah di Indonesia	Kerjasama Pengelolaan Lahan Bekas PETI melalui Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)	Jumlah Koperasi yang Terlibat dalam Pengelolaan Wilayah Bekas PETI	10	10	10	10	10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Penunjukan BUMDes sebagai Pengelola Koperasi Pertambangan	Jumlah BUMDes yang Mengelola Koperasi Pertambangan	3	3	3	3	3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Peningkatan peran masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di daerahnya	Penyusunan AMDAL Sektor ESDM	Persetujuan Lingkungan: AMDAL, UKL, UPL	1	1	1	1	1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Layanan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	4	4	4	4	4	Kementerian Kehutanan	
			Forest Programme V - *Social Forestry Support Programme*	4	4	0	0	0	Kementerian Kehutanan	
			Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan	10	55	55	55	55	Kementerian Kehutanan	
			Penetapan Hutan Adat	7	20	20	20	20	Kementerian Kehutanan	
		Pendayagun aan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Nilai Kemandirian MasyarakatHukum Adat (Nilai)	50	55	60	65	70	Kementerian Kelautan dan Perikanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau - pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kelompok masyarakat,kumulatif)	2	3	4	5	6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
	Penguatan regulasi terkait Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dalam pengelolaan tambang di Indonesia	Permen KESDM 32 Tahun 2021 Tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Inspeksi Keselamatan Lingkungan	2X	2X	2X	2X	2X	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
Tujuan 6. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup sebagai penyangga ekonomi berkelanjutan										
Terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan	Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kehutanan	Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan	Aparat Perlindungan Hutan dan Penegak Hukum Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	150	170	190	210	230	Kementerian Kehutanan	
			Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum Kehutanan	2	14	14	14	14	Kementerian Kehutanan	
		Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan	Kasus Keperdataan Hutan yang Ditangani	7	7	7	9	12	Kementerian Kehutanan	
			Usaha dan/atau kegiatan pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang diberikan sanksi	5	12	13	13	14	Kementerian Kehutanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
			Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	10	11	11	12	12	Kementerian Kehutanan	
			Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perizinan bidang kehutanan	4	4	5	5	4	Kementerian Kehutanan	
		Penindakan Pidana Kehutanan	Penanganan peredaran hasil hutan ilegal	60	63	65	68	70	Kementerian Kehutanan	
			Pengamanan Kawasan Hutan	25	30	32	32	35	Kementerian Kehutanan	
		Penyediaan Dokumen Study dan kajian tentang Proyek Carbon Sequestration Site	Dokumen Kajian Pemetaan Lokasi-lokasi Potensial untuk dijadikan CSS (Wilayah: Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua)	1					Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
			Dokumen Kajian Study dan Lokakarya tentang skema pengelolaan berbagai jenis CSS	1					Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda
		Penyusunan Desain dan Implementasi Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran (MEL) untuk Isu Strategis dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Kawasan Hutan dan Reforma Agraria, Perdagangan Karbon, Infrastruktur Energi	Dokumen Kerangka Kerja MEL, Dokumen Panduan Teknis (SOP) MEL, Sosialisasi SOP MEL, Dokumen Laporan, Dokumen Rekomendasi Kebijakan Hasil, Dokumen Praktik Baik untuk Isu Strategis dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui		1				Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	K/L, Mitra dan Pemda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Baru Terbarukan, Sekolah Rakyat, dan Pengentasan Kemiskinan Pemulung	Kawasan Hutan dan Reforma Agraria, Perdagangan Karbon, Infrastruktur Energi Baru Terbarukan, Sekolah Rakyat, dan Pengentasan Kemiskinan Pemulung							
	Memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dan adat dalam aktivitas ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Layanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	4	4	4	4	4	Kementerian Kehutanan	
			Kawasan Agroforestry yang difasilitasi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi	4.013	20	26	46	56	Kementerian Kehutanan	
			Pengembangan Mitra Perhutanan Sosial	10	348	348	348	348	Kementerian Kehutanan	
			Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat Penerima Akses Kelola Kawasan Hutan	165	2.109	3.678	6.816	6.816	Kementerian Kehutanan	
			Pengembangan Hutan Adat	6	10	10	10	10	Kementerian Kehutanan	
			Peningkatan Kemandirian Usaha KUPS	390	2.119	2.119	2.12	2.12	Kementerian Kehutanan	
		Peningkatan Akses legal & Produktif masyarakat terhadap Kawasan	Keterlibatan Rumah Tangga Miskin yang memanfaatkan KHDPK	5	12.5	20	30	37.5	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
		Hutan melalui Skema KHDPK	Kelompok Usaha Berbasis Hail Hutan Bukan Kayu (HHBK)	50	150	250	350	500	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kegiatan Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan secara berkelanjutan di wilayah KHDPK	Peningkatan jumlah unit usha masyarakat berbasis HHBK & Ekowisata yang aktif	30	90	180	250	320	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
			Peningkatan jumlah kelompok yang memperoleh akses pasar dan pembiayaan (KUR, CSR, dsb)	50	120	200	300	400	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Pengadaan Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta Penyusunan Rencana Kerja Tata Kelola KHDPK	Peningkatan Jumlah SK IPHPS yang diterbitkan	100	250	400	600	750	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
			Adanya Dokumen Tata Kelola Kawasan	50	125	200	300	375	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Pemberdayaan Ekonomi melalui terbentuknya Usaha HHBK & Ekowisata	Jumlah Pelatihan	100	200	300	400	500	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
			Jumlah Kontrak Pasar HHBK	30	60	90	120	150	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Pelaksanaan Proyek *Carbon Sequestration Site*	Pemberdayaan Masyarakat pada pelaksanaan Proyek *Carbon Sequestration Site* (Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua)				1	2	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Peningkatan Akses legal & Produktif masyarakat terhadap Kawasan Hutan melalui Skema KHDPK	Keterlibatan Rumah Tangga Miskin yang memanfaatkan KHDPK	5	12.5	20	30	37.5	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	Memperbesar dukungan mitra lintas elemen dalam proses konservasi hutan	Peningkatan jumlah Studi kolaboratif dalam evaluasi partisipasif							Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
		Peningkatan jumlah akademisi/ CSO yang terlibat dalam Evaluasi Partisipasif							Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	
Terciptanya tata kelola pemerintahan sinergis dalam mewujudkan NZE	Evaluasi regulasi di tingkat pusat dan daerah yang bertentangan dengan NDC									
	Memperkuat kapasitas Pemda dalam mendukung pencapaian NDC									
	Memperluas sumber pendanaan non APBN dan APBD untuk mendukung program-program pengurangan GRK									
Terbangunnya ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah nasional	Mengefektifkan penerapan Extended Producer Responsibilty (EFR) dan insentif bagi perusahaan-perusahaan dalam sistem ekonomi sirkular									
	Perluasan upaya pembinaan dan fasilitasi bank sampah									
	Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam	Transformasi kondisi Ekonomi Sosial	Pemulung menjadi bagian dari Skema pengelolaan Sampah Modern	1	1	1	1	1	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pemda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
	proses pengelolaan daur ulang sampah									

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

MATRIKS PETA JALAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	2.075.893.750,00	2.118.462.160,00	1.493.902.778,00	1.475.907.878,00	1.473.837.953,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	350,00	360,00	300,00	250,00	250,00	595.000.000,00	612.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	200,00	250,00		150,00	150,00	436.079.855,00	437.553.505,00	428.509.988,00	370.700.642,00	368.934.393,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10	10,00	5,00	5,00	5,00	553.873.000,00	548.180.000,00	276.935.000,00	271.935.000,00	276.935.000,00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6,00	9,00	14,00	17,00	20,00	930.143.898,00	951.356.924,00	697.543.837,00	655.762.868,00	675.360.066,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6,00	9,00	14,00	17,00	20,00	336.079.855,00	337.553.505,00	258.509.988,00	290.700.642,00	268.934.393,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH														
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	700,00	700,00	580,00	575,00	575,00	2.870.020.958,00	2.968.922.061,00	2.417.855.119,00	2.376.046.758,00	2.375.590.919,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	1.850,00	1.855,00	1.860,00	1.865,00	1.870,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	30,00	31,00	25,00	25,00	25,00	1.661.620.579,00	1.707.008.131,00	1.395.857.695,00	1.384.077.658,00	1.375.283.500,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL														
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF														
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	118.479.631,00	120.602.407,00	89.457.258,00	88.559.899,00	88.356.943,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	14.721.724.480,00	15.069.341.270,00	7.532.067.890,00	7.426.619.809,00	7.924.770.508,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	150,00	100,00	50,00	50,00	50,00	2.244.798.548,00	1.785.018.152,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja										
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia		V								
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	290,00	240,00	240,00	240,00	240,00	315.400.000,00	320.000.000,00	250.000.000,00	245.000.000,00	243.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	550,000,000	380,000,000	380,000,000	380,000,000	380,000,000
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	190,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	400.00	600.00	700.00	800.00	900.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.		1.00	1.00	1.00	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	2,026,393,711.00	2,049,657,648.00	2,073,154,220.00	2,096,885,767.00	2,120,854,625.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,208,298,000	4,418,713,000	4,639,649,000	4,871,631,000	5,115,213,000
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,208,298,000	4,418,713,000	4,639,649,000	4,871,631,000	5,115,213,000
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,208,298,000	4,418,713,000	4,639,649,000	4,871,631,000	5,115,213,000

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	25,349,954,300.00	35,605,453,840.00	35,864,508,380.00	36,127,153,465.00	36,393,425,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	250.00	275.00	300.00	350.00	400.00	1,352,318,747	1,176,365,122	1,157,392,425	1,155,440,273	1,135,549,078
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	150.00	250.00	350.00	450.00	550.00	2,476,159,373.00	2,525,682,561.00	2,576,196,212.00	2,627,720,136.00	2,680,274,539.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	250.00	300.00	350.00	400.00	450.00	2,476,159,374.00	2,525,682,561.00	2,576,196,213.00	2,627,720,137.00	2,680,274,539.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,352,318,747	1,176,365,122	1,157,392,425	1,155,440,273	1,135,549,078
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	500,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00	725,000,000.00	750,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00	2,476,159,374.00	2,525,682,561.00	2,576,196,213.00	2,627,720,137.00	2,680,274,539.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00	2,476,159,373.00	2,525,682,561.00	2,576,196,212.00	2,627,720,136.00	2,680,274,539.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.00	75.00	100.00	125.00	150.00	300,000,000	350,000,000	400,000,000	425,000,000	450,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH														
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	1,475,000,000.00	1,500,000,000.00	1,525,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	1,961,735,580	2,500,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	2,650,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	60.00	100.00	150.00	200.00	250.00	3,152,422,320	650,000,000	670,000,000	700,000,000	725,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	500,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00	725,000,000.00	750,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL														
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF														
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85,041,450	86,742,279	88,477,124	90,246,667	92,051,600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	50.00	75.00	100.00	125.00	150.00	300,000,000.00	325,000,000.00	345,000,000.00	350,000,000.00	375,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	1,000.00	1,050.00	1,075.00	1,100.00	1,125.00	539,896,427.00	561,494,355.00	579,224,242.00	580,108,727.00	600,549,078.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	4,131,908,919.00	4,214,547,097.00	4,298,838,039.00	4,384,814,800.00	4,472,511,096.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	128,569,900.00	131,141,296.00	133,764,124.00	136,439,406.00	139,168,195.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	600	10,600	18,600	20,600	25,000	397,980,000.00	405,939,600.00	414,058,392.00	422,339,560.00	430,786,351.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	160,201,000.00	163,405,020.00	166,673,120.00	170,006,583.00	173,406,714.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	31,560,000.00	32,191,200.00	32,835,024.00	33,491,724.00	34,161,559.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	204,658,700.00	208,751,874.00	212,926,911.00	217,185,450.00	221,529,159.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	247,614,500.00	252,566,790.00	257,618,126.00	262,770,488.00	268,025,898.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	100.00	110.00	120.00	130.00		4,000,000,000.00	4,950,000,000.00	5,700,000,000.00	6,000,000,000.00	
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,208,298.00	4,418,713.00	4,639,649.00	4,871,631.00	5,115,213.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,208,298.00	4,418,713.00	4,639,649.00	4,871,631.00	5,115,213.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,208,298.00	4,418,713.00	4,639,649.00	4,871,631.00	5,115,213.00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	92,983,000	102,281,300	112,509,430	123,760,373	136,136,410

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	400.00	420.00	360.00	340.00	300.00	280,000,000.00	294,000,000.00	252,000,000.00	240,000,000.00	200,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	120.0000	120.0000	60.0000	60.0000	60.0000	56,200,000.0000	56,200,000.0000	28,100,000.0000	28,100,000.0000	28,100,000.0000
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	55,000,000.0000	60,000,000.0000	60,000,000.0000	62,000,000.0000	63,000,000.0000
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	55,000,000.0000	60,000,000.0000	60,000,000.0000	60,000,000.0000	63,000,000.0000
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	1,592,879,555.00	1,443,652,862.00	1,390,587,938.00	1,391,681,924.00	1,406,490,023.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	2,700.00	3,100.00	3,300.00	3,600.00	3,900.00	5,110,879,200.00	5,338,902,260.00	155,468,902,260.00	230,663,902,260.00	5,793,902,260.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16,360,832.00	15,446,786.00	14,510,213.00	14,441,936.00	14,287,136.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16,360,832.00	15,446,786.00	14,510,213.00	14,441,936.00	14,287,136.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	150.00	130.00	100.00	90.00	70.00	700,000,000.00	630,000,000.00	527,738,112.00	537,370,356.00	492,762,346.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	495,894,566	472,635,344	444,283,108	441,889,298	436,852,771
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	2,144.0000	2,650.0000	3,156.0000	3,662.0000	4,168.0000	850,000,000.00	875,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	150.00	155.00	160.00	160.00	160.00	600,000,000	650,000,000	750,000,000	750,000,000	800,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	36.00	40.00	41.00	42.00	47.00	505,311,472.00	472,635,344.00	443,673,757.00	441,889,299.00	437,452,772.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	300.00	300.00	350.00	350.00	375.00	600,000,000	600,000,000	700,000,000	700,000,000	731,339,709

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	500.00	450.00	400.00	350.00	300.00	817,513,103.00	771,392,261.00	723,395,493.00	722,709,406.00	714,817,792.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	550,000,000.00	650,000,000.00	675,000,000.00	700,000,000.00	750,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	400.00	420.00	440.00	460.00	480.00	83,927,185.00	80,169,089.00	79,908,521.00	35,197,919.00	80,893,715.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	69,000,000.00	69,000,000.00	60,000,000.00	39,000,000.00	54,000,000.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	64,000,000.00	64,000,000.00	47,000,000.00	18,000,000.00	36,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50,000,000	53,500,000	57,245,000	62,969,500	69,266,450

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	75.00	75.00	75.00	85.00	100.00	100,000,000.00	98,000,000.00	100,000,000.00	125,000,000.00	140,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	60,000,000.00	60,000,000.00	85,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	15,161,276.00	15,000,000.00	15,161,276.00	15,161,276.00	15,500,000.00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,500,000.00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	400,000,000.00	395,000,000.00	400,000,000.00	Rp400,000,000	410,000,000.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	1,850,000,000.00	1,840,000,000.00	1,869,842,941.00	1,919,951,611.00	1,925,852,662.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,196,210,744.00	1,185,661,881.00	1,239,480,237.00	1,249,918,024.00	1,335,199,994.00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	212,759,102.00	220,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	41,528,120.00	41,161,902.00	43,030,281.00	44,954,881.00	46,353,325.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi		30.00	30.00	30.00	30.00	41,528,120.00	41,161,901.00	43,030,280.00	44,954,880.00	46,353,325.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	123,470,163.00	122,381,333.00	127,936,342.00	133,658,505.00	137,816,318.00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	39,590,571.00	39,241,438.00	41,022,646.00	42,857,451.00	44,190,649.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5.00	5.00	5.00	5.00	39,590,570.00	39,241,438.00	41,022,646.00	42,857,451.00	44,190,649.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150,475,835.00	148,266,997.00	149,536,080.00	151,144,257.00	149,578,941.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120,913,032.00	64,010,450.00	32,861,170.00	51,231,669.00	64,579,964.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM		25.00	25.00	25.00	25.00		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	123,470,163.00	122,381,334.00	127,936,342.00	133,658,505.00	137,816,318.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	80.00	30.00	35.00	50.00	55.00	230,000,000	100,000,000	120,000,000	150,000,000	165,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	49,014,866.00	49,014,866.00	50,906,511.00	49,014,866.00	52,000,000.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	146,285,000.00	137,867,193.00	237,867,193.00	237,867,193.00	237,867,193.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	164.00	164.00	184.00	194.00	199.00	1,365,000,000.00	1,349,435,231.00	1,428,843,813.00	1,510,641,852.00	1,570,077,598.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	350,000,000.00	306,629,484.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90,633,070.00	90,000,000.00	100,000,000.00	90,633,070.00	90,633,070.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	575,000,000.00	565,520,042.00	613,885,042.00	663,705,378.00	649,905,619.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	152,868,448.00	80,000,000.00	85,000,000.00	90,000,000.00	95,000,000.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	136,286,360	137,718,730	143,129,699	148,694,581	152,985,907

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	936,889,491.00	1,124,267,389.20	1,349,120,867.04	1,618,945,040.45	1,942,734,048.54

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	3,500,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	100,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	155,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	100,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	145,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	51.00	55.00	59.00	63.00	67.00	150,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	2.00	2.00	2.00	2.00	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	250,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	220,000,000	275,000,000	290,000,000	295,000,000	320,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00	250,000,000.00	260,000,000.00	270,000,000.00	280,000,000.00	300,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	20	20	20	20	20	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	150,000,000	170,000,000	190,000,000	210,000,000	230,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI														
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	100,000,000.00	120,000,000.00	140,000,000.00	160,000,000.00	180,000,000.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	44.00	49.00	54.00	59.00	65.00	140,000,000.00	165,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	200,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5,260,000,000.00	5,260,000,000.00	5,260,000,000.00	5,385,000,000.00	5,385,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA														
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA														
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI														
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	352.00	404.00	424.00	508.00	528.00	6,800,000,000.00	6,890,000,000.00	6,970,000,000.00	7,050,000,000.00	7,140,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA														
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja										
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	200,000,000.00	205,000,000.00	210,000,000.00	215,000,000.00	220,000,000.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	97.00	107.00	127.00	137.00	147.00	500,000,000.00	540,000,000.00	580,000,000.00	600,000,000.00	650,000,000.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	200,000,000.00	210,000,000.00	220,000,000.00	240,000,000.00	270,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	335,000,000	368,000,000	405,000,000	445,000,000	490,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		100,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	4,350,000,000.00	4,260,609,650.00	4,302,356,946.00	4,302,356,000.00	4,302,356,814.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	120,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	28,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi		30.00	100.00	100.00	100.00		85,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi		30.00	100.00	100.00	100.00		125,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM		17.00	17.00	17.00	17.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional		50.00	50.00	50.00	50.00		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100.00	100.00	100.00	100.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		20.00	20.00	20.00	20.00		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH														
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	20.00	200.00	400.00	400.00	500.00	500,000,000.00	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	6,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	102,400,000	2,000,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000	3,500,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi		100.00	100.00	100.00	100.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya		20.00	20.00	20.00	20.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM		15.00	15.00	15.00	15.00		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97,600,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah		100.00	100.00	100.00	100.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL														
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF														
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya		100.00	100.00	100.00	100.00		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	110.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100,000,000.00	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,700,000,000.00	2,200,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	48.00	64.00	80.00	80.00	80.00	490,000,000.00	600,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00	750,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja			250.00	250.00	250.00			20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	175,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	205,000,000.00	225,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang teraselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	275,000,000.00	1,294,550,316.00	1,277,896,347.00	1,297,859,679.00	1,355,864,515.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	220,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	325,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	506,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil							1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60,000,000.00	60,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	80,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	400,000,000.00	430,000,000.00	1,500,000,000.00	1,550,000,000.00	1,600,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,150,000,000.00	2,250,000,000.00	2,300,000,000.00	2,500,000,000.00	2,600,000,000.00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	3,800,000,000.00	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	4,100,000,000.00	4,200,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	50,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	50,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	100,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	50,000,000	60,000,000	70,000,000	80,000,000	90,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	140.00	160.00	180.00	200.00	220.00	175,000,000.00	195,000,000.00	220,000,000.00	240,000,000.00	260,000,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	140.00	160.00	180.00	200.00	220.00	175,000,000.00	195,000,000.00	220,000,000.00	240,000,000.00	260,000,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	140.00	160.00	180.00	200.00	220.00	175,000,000.00	195,000,000.00	220,000,000.00	240,000,000.00	260,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	140.00	160.00	180.00	200.00	220.00	175,000,000	195,000,000.00	220,000,000.00	240,000,000.00	260,000,000.00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal		10.00	50.00	50.00	50.00		100,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI														
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace		50.00	55.00	60.00	65.00	500,000,000.00	600,000,000.00	700,000,000.00	800,000,000.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya									
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM									
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA														
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA														
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI														
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	48.00	96.00	128.00	144.00	176.00	215,000,000.00	450,000,000.00	520,000,000.00	600,000,000.00	700,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA														
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	50.00	100.00	110.00	130.00	150.00	25,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	75,000,000.00	100,000,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	150.00	170.00	200.00	230.00	300.00	100,000,000.00	130,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	350,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia		15.00	15.00	15.00	15.00	30,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang teraselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia		15.00	15.00	15.00	15.00	30,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	45.00	60.00	75.00	90.00	120.00	60,000,000.00	106,000,000.00	116,000,000.00	126,000,000.00	226,000,000.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	20,000,000.00	33,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00	31,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	150.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	350,000,000.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	2,550,000,000.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	415.00	150.00	150.00	150.00	150.00	61,815,000.00	98,150,000.00	98,150,000.00	98,150,000.00	98,150,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	188,468,740.00	1,284,687,400.00	1,284,687,400.00	1,284,687,400.00	1,284,687,400.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	200,000,000.00	202,000,000.00	206,040,000.00	210,160,800.00	214,364,016.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	200,000,000.00	202,000,000.00	206,000,000.00	210,160,800.00	214,364,016.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	1,500.00	150.00	150.00	150.00	150.00	682,555,500.00	82,555,500.00	82,555,500.00	82,555,500.00	82,555,500.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	90.00	35.00	35.00	35.00	35.00	170,000,000.00	75,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	90.00	35.00	35.00	35.00	35.00	170,000,000.00	75,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00	5,000,000	5,000,000	25,000,000	50,000,000	75,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	65,000,000.00	65,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	77,500,000	130,583,649	130,000,000	130,000,000	130,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	310,000,000.00	270,000,000.00	300,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00	9,264,873,900.00	9,624,327,705.00	9,899,224,697.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	250.00	300.00	350.00	400.00	400.00	40,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja										
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	20,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95,119,000.00	86,592,729.00	94,133,483.00	85,114,670.00	83,653,876.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	29,881,000.00	21,781,540.00	20,071,359.00	33,374,269.00	39,204,842.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL														
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI														
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	50,000,000.00	250,000,000.00	257,500,000.00	262,650,000.00	267,903,000.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS														
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	2,000.00	2,020.00	2,060.00	2,102.00	2,144.00	200,000,000.00	202,000,000.00	206,040,000.00	210,160,800.00	214,364,016.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN														
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	2,000.00	2,020.00	2,060.00	2,102.00	2,144.00	200,000,000.00	202,000,000.00	206,040,000.00	210,160,800.00	214,364,016.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS														
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI														
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	21,000,000.00	22,050,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	550.00	575.00	600.00	625.00	650.00	1,621,307,000.00	1,645,567,015.00	2,206,178,760.00	2,315,959,631.00	2,391,242,867.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100,000,000.00	101,496,325.00	136.074.091	142,845,225.00	147,488,592.00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	-								
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	-								
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,333,472,709.00	1,353,425,789.00	1,814,510,866.00	1,904,802,091.00	1,966,720,124.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	-								
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	-								
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	283997896	288,247,426.00	386447555	405,677,433.00	418,864,498.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	25,209,250.00	25,209,250.00	25,209,250.00	25,209,250.00	25,209,250.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	150,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	330.00	360.00	400.00	420.00	450.00	7,483,374,000.00	7,515,780,000.00	35,190,780,000.00	73,940,780,000.00	23,490,780,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	139,806,705.00	150,000,000.00	175,000,000.00	200,000,000.00	225,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	50,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	75,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00					
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50,000,000.00	65,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	115,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,277,435,527.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	150,000,000	160,000,000	200,000,000	225,000,000	250,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400,000,000.00	400,000,000.00	425,000,000.00	450,000,000.00	475,000,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	120,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90,000,000	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	40.00	34.00	42.00	-	50.00	160,000,000	103,496,041	168,100,000	-	276,610,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI														
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	8.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100,000,000.00	200,000,000.00	225,000,000.00	250,000,000.00	275,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	3,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	820,147,000.00	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	1,650,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA														
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA														
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI														
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,150,000,000.00	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00	2,325,000,000.00	2,320,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA														
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		75,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	5,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00	210,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia									
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia									
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	100.00	210.00	285.00	285.00	290.00	69,000,000.00	256,112,562.00	300,000,000.00	323,185,462.00	343,713,722.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50,000,000.00	150,000,000.00	170,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	38.00	33.00	65.00	67.00	67.00	824,400,950.00	724,400,914.00	1,374,400,914.00	1,424,400,914.00	1,424,400,914.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15,000,000.00	500,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50,000,000.00	72,614,990.00	70,502,035.00	67,909,256.00	60,126,693.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.		1.00	1.00	1.00	1.00		71,626,360.00	69,681,937.00	71,122,850.00	61,258,514.00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022		35.00	35.00	35.00	35.00		129,844,317.00	127,872,775.00	25,401,018.00	20,419,505.00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	1.00	1.00	1.00	1.00		47,750,907.00	55,745,549.00	58,422,341.00	53,090,712.00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	125,000,000.00	119,377,267.00	125,427,486.00	127,005,089.00	110,265,325.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	71,875,000.00	119,377,267.00	122,640,209.00	119,384,784.00	102,097,523.00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		138,797,612.00	141,809,162.00	43,181,740.00	38,797,059.00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	1,600,000,000.00	2,015,959,505.00	2,114,910,985.00	2,114,910,978.00	1,839,297,210.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	6,114.00	6,200.00	6,300.00	6,400.00	6,500.00	427,608,394,730.00	52,137,340,300.00	74,109,071,800.00	74,290,789,700.00	65,693,400,200.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	60.00	60.00	60.00	30.00	30.00	20,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	27,500,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	10,000,000,000.00	15,000,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	10,000,000,000.00	15,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	30.00	30.00	30.00	23.00	23.00	40,000,000,002.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	30,000,000,000.00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	10,000,000,000.00	15,000,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	10,000,000,000.00	15,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	558,950,552,500.00	283,950,552,500.00	283,950,552,500.00	293,950,552,500.00	313,950,552,500.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	318,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	260,000,000,000.00	30,000,000,000.00	35,000,000,000.00	50,000,000,000.00	60,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	12,000,000,000	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal		100.00	100.00	100.00	100.00		22,500,000,000.00	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,136,668,920,910.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	60,000,000,000.00	80,000,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	200.00	21.00	200.00	200.00	534.00	480,974,400,000.00	190,092,000,000.00	155,262,776,900.00	248,690,165,400.00	548,192,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	500.00	500.00	500.00	500.00	750.00	3,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15,000,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	15,000,000,000.00	20,000,000,000.00	27,500,000,000.00	28,500,000,000.00	28,500,000,000.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL														
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI														
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	850.00	2,040.00	4,670.00	6,292.00	8,885.00	20,128,800,000.00	49,528,513,300.00	116,377,026,600.00	160,951,226,600.00	233,437,569,300.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS														
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN														
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS														
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI														
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	5	5	3	7	7	155,000,000,000.00	80,000,000,000.00	90,000,000,000.00	93,170,000,000.00	120,000,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,854,063,234.00	19,145,766,396.00	20,071,469,557.00	20,998,172,719.00	21,923,875,881.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	407,409,705.00	427,780,190.00	448,150,676.00	468,521,161.00	488,891,646.00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022		7.00	7.00	7.00	7.00		5,145,000,000.00	5,390,000,000.00	5,635,000,000.00	5,880,000,000.00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,138,447,621.00	1,195,370,002.00	1,252,292,383.00	1,309,214,764.00	1,366,137,145.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022		7.00	7.00	7.00	7.00		1,543,500,000.00	1,617,000,000.00	1,690,500,000.00	1,764,000,000.00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022		7.00	7.00	7.00	7.00		3,675,000,000.00	3,850,000,000.00	4,025,000,000.00	4,200,000,000.00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	12,251,420,628.00	12,863,991,659.00	13,476,562,691.00	14,089,133,722.00	14,701,704,754.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	258,040,000.00	258,559,000.00	233,808,380.00	234,317,000.00	234,836,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	3,200.00	3,200.00	5,000.00	4,000.00	3,200.00	6,013,086,110.00	6,089,890,416.00	10,566,694,721.00	7,143,499,027.00	6,221,303,332.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	4,860,000.00	6,480,000.00	8,100,000.00	9,720,000.00	11,340,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	25,321,238.00	27,359,564.00	29,446,851.00	31,534,137.00	33,621,423.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)									
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi									
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	338.00					11,103,497,114.00	-	-	-	-
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	827,277,442.00	868,641,314.00	912,073,380.00	957,677,049.00	1,005,560,901.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	1,298,231,949.00	946,189,105.00	1,118,498,560.00	1,174,423,488.00	1,283,144,662.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	30.00	40.00	50.00	75.00	100.00	7,550,000.00	8,200,000.00	8,850,000.00	10,475,000.00	12,100,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	36,701,052,914.00	40,371,158,205.00	44,408,274,026.00	48,849,101,428.00	53,734,011,571.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	8,268.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	76,685,185,071.00	76,353,703,578.00	81,376,448,976.00	88,806,655,559.00	96,091,900,206.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	1,732.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	3,718,484,436.00	9,090,332,880.00	9,499,366,168.00	9,949,302,784.00	10,444,233,063.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	259,400,000.00	285,340,000.00	313,874,000.00	345,261,400.00	379,787,540.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	126,780,000.00	139,458,000.00	153,403,800.00	168,744,180.00	185,618,598.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	59,292,000.00	61,070,760.00	62,902,883.00	64,789,969.00	66,733,668.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	180,600,000.00	186,018,000.00	191,598,540.00	197,346,496.00	203,266,891.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	219,252.00	219,252.00	219,252.00	219,252.00	219,252.00	802,462,320,000.00	802,462,320,000.00	802,462,320,000.00	802,462,320,000.00	802,462,320,000.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partiaipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	54.00	60.00	65.00	72.00	79.00	3,900,000,000.00	4,290,000,000.00	4,719,000,000.00	5,190,900,000.00	5,709,990,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenldatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	34,108,830.00	34,449,918.00	34,794,418.00	35,142,362.00	35,493,785.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	2,992.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	7,946,174.00	8,025,637.00	8,105,893.00	8,186,925.00	8,268,822.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	172,843,522.00	8,025,637.00	8,105,893.00	8,186,952.00	8,268,822.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	130,922,100.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	393.00	453.00	513.00	573.00	633.00	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	25,000.00	28,500.00	32,000.00	35,500.00	39,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	393.00	453.00	513.00	573.00	633.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200,000,000	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	1,000.00	25,773.00	28,350.00	31,185.00	34,304.00	3,022,111,100.00	38,321,000,000.00	38,321,000,000.00	38,321,000,000.00	38,321,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	1,113.00	1,224.00	1,347.00	399.00	439.00	9,661,073,659.00	10,627,181,024.00	11,689,899,127.00	1,258,889,039.00	14,144,777,943.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	109,999,999.00	120,999,999.00	133,099,999.00	146,409,999.00	161,050,998.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja										
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	146,278,548.00	160,906,403.00	176,997,043.00	194,696,747.00	214,166,422.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	31,096,890.00	34,206,579.00	37,627,237.00	41,389,961.00	45,528,957.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1,451,569,896.00	1,451,569,896.00	1,756,399,573.00	1,932,039,531.00	2,125,243,485.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	323,792,751.00	323,792,751.00	323,792,751.00	323,792,751.00	323,792,751.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	5,531,678.00	5,531,678.00	5,531,678.00	5,531,678.00	5,531,678.00	109,461,629.00	109,461,629.00	109,461,629.00	109,461,629.00	109,461,629.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partiaipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	500.00	670.00	670.00	670.00	840.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70,000,000,000.00	85,000,000,000.00	110,000,000,000.00	110,000,000,000.00	110,000,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenldatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500.00	500.00	570.00	800.00	1,170.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	40,000,000,000.00	47,500,000,000.00	70,000,000,000.00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	36,000,000,000.00	35,000,000,000.00	47,940,000,000.00	61,224,000,000.00	65,556,400,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	291.00	291.00	290.00	290.00	290.00	36,000,000,000.00	35,500,000,000.00	51,140,000,000.00	55,924,000,000.00	58,756,400,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	12,000,000,000.00	14,000,000,000.00	24,670,000,000.00	30,402,000,000.00	31,668,200,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	300.00	320.00	330.00	340.00	350.00	69,038,400,000.00	109,038,400,000.00	129,038,400,000.00	138,038,400,000.00	149,038,400,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	150.00	180.00	200.00	220.00	230.00	81,075,300,000.00	111,075,300,000.00	96,075,300,000.00	171,317,050,000.00	161,075,300,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	50.00	70.00	90.00	120.00	150.00	10,210,600,000.00	21,210,600,000.00	15,210,600,000.00	25,210,600,000.00	30,210,600,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	225.00	225.00	270.00	300.00	255.00	39,333,500,000.00	69,333,800,000.00	99,333,800,000.00	129,333,800,000.00	110,333,800,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	160.00	180.00	180.00	190.00	200.00	96,472,300,000	119,472,300,000	105,472,300,000	180,230,550,000	131,988,800,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	1,000.00	1,700.00	1,400.00	1,500.00	1,600.00	6,149,200,000.00	15,350,900,000.00	13,394,900,000.00	12,479,700,000.00	13,816,100,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	270.00	510.00	660.00	540.00	630.00	64,287,300,000.00	88,085,600,000.00	110,041,600,000.00	90,956,800,000.00	99,620,400,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	150.00	180.00	200.00	220.00	230.00	81,075,300,000.00	111,075,300,000.00	96,075,300,000.00	171,317,050,000.00	161,075,300,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	300.00	600.00	400.00	600.00	600.00	30,000,000,000.00	60,000,000,000.00	40,000,000,000.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	5.00	7.00	9.00	12.00	12.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	20.00	35.00	60.00	60.00	100.00	9,000,000,000.00	15,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	83,483,500,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	205.00	265.00	325.00	385.00	445.00	25,000,000,000.00	40,000,000,000.00	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00	125,000,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	2,462.00	2,434.00	2,376.00	3,073.00	4,452.00	827,490,300,000.00	831,689,000,000.00	855,604,200,000.00	1,140,355,100,000.00	1,784,801,200,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	200.00	200.00	200.00	220.00	220.00	35,008,000,000.00	40,130,600,000.00	40,271,100,000.00	46,311,800,000.00	50,743,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1,119.00	1,119.00	1,120.00	1,130.00	1,150.00	84,622,000,000.00	84,918,200,000.00	85,215,500,000.00	93,737,100,000.00	103,110,900,000.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	92.00	95.00	95.00	95.00	100.00	26,830,500,000.00	26,924,500,000.00	27,018,800.00	28,369,800,000.00	31,206,800,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partiaipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	80.00	80.00				462,500,000.00	380,000,000.00			
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	38.00	38.00				139,600,000.00	145,000,000.00			
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2.00	2.00				400,100,000.00	450,000,000.00			
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00				443,800,000.00	475,000,000.00			
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	38.00	38.00				2,505,000,000.00	2,600,000,000.00			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenldatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	3,150.00	3,150.00				12,209,573,000.00	12,396,973,000.00			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi										
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	13.00	13.00				58,000,000.00	62,000,000.00			
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.00	5.00				24,200,000.00	26,500,000.00			
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	1,110.00	1,110.00				1,277,300,000.00	1,277,300,000.00			
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	60.00	60.00	N/A	N/A	N/A	470,000,000	480,000,000	N/A	N/A	N/A
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	3.00	3.00				230,000,000.00	235,000,000.00			
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	250.00	300.00				750,000,000.00	900,000,000.00			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	5.00	5.00				1,253,000,000.00	1,253,000,000.00			
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	1,400.00	1,420.00				22,500,000,000.00	22,500,000,000.00			
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	8,000.00	9,000.00				86,586,000.00	112,565,000.00			
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	150.00	180.00				266,200,000.00	292,820,000.00			
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	250.00	250.00				120,000,000.00	130,000,000.00			
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	10.00	10.00				20,000,000.00	22,000,000.00			
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1,068.00	1,135.00				339,330,000.00	439,263,000.00			
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	1,990.00	1,990.00	N/A	N/A	N/A	1,201,586,700.00	1,201,586,700.00	N/A	N/A	N/A
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partiaipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	3,890.00	3,990.00	3,990.00	5,640.00	8,640.00	9,700,000,000.00	9,900,000,000.00	10,200,000,000.00	11,300,000,000.00	15,400,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	71.00	71.00	72.00	72.00	73.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,300,000,000.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	2,500,000,000.00	3,550,000,000.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	320,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenldatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,157,404,000.00	1,166,039,000.00	118,323,000.00	120,400,800.00	1,125,343,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	576,665,000.00	580,967,000.00	589,579,000.00	599,885,000.00	56,091,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	150.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	141,025,000.00	142,077,000.00	144,183,000.00	146,703,000.00	137,118,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	2,750.00	2,900.00	2,900.00	3,200.00	6,200.00	168,292,547,500.00	168,292,547,500.00	268,542,547,500.00	1,273,756,730,000.00	228,856,730,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	200.00	240.00	240.00	240.00	300.00	350,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	350.00	350.00	375.00	380.00	390.00	1,800,000,000.00	1,860,000,000.00	1,960,000,000.00	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	350.00	360.00	375.00	375.00	390.00	1,600,000,000.00	1,700,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	2,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	2,475.00	1,534.00	1,610.00	1,750.00	1,950.00	7,868,250,000.00	4,934,625,000.00	5,082,750,000.00	5,260,500,000.00	6,208,500,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.00	320.00	330.00	340.00	350.00	1,500,000,000.00	1,600,000,000.00	1,700,000,000.00	1,800,000,000.00	2,000,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	600,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	300.00	320.00	350.00	350.00	350.00	2,000,000,000.00	2,150,000,000.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,400,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	210.00	250.00	260.00	300.00	350.00	2,500,000,000	2,800,000,000	2,850,000,000	3,100,000,000	3,400,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	60.00	60.00	70.00	70.00	80.00	100,000,000	100,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	38.00	150.00	150.00	150.00	150.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	2,362.00	2,512.00	2,615.00	2,720.00	2,930.00	38,287,104,550.00	38,415,375,000.00	38,517,250,000.00	38,639,500,000.00	39,291,500,000.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya									
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM									
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	6,758.00	6,054.00	6,054.00	6,054.00	6,278.00	50,496,467,292.00	51,442,227,443.00	52,793,801,745.00	52,920,707,141.00	55,345,707,141.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	1,055.00	1,315.00	1,265.00	1,300.00	1,575.00	5,955,000,000.00	2,829,000,000.00	2,754,000,000.00	3,174,000,000.00	2,394,000,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	1,000.00	700.00	700.00	700.00	800.00	1,200,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	950,000,000.00	1,300,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	55.00	50.00	50.00	50.00	50.00	321,865,312.00	220,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	45.00	40.00	40.00	40.00	40.00	336,700,560.00	380,000,000.00	360,000,000.00	310,000,000.00	530,000,000.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,450,000,000.00	1,533,186,000.00	1,333,186,000.00	1,533,186,000.00	1,833,186,000.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	25.00	40.00	40.00	30.00	25.00	998,942,696.00	1,389,086,641.00	1,289,086,641.00	1,139,086,641.00	1,489,086,641.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	150.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	141,025,000.00	142,077,000.00	144,183,000.00	146,703,000.00	137,118,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	141,025,000.00	142,077,000.00	144,183,000.00	146,703,000.00	137,118,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partiaipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	300.00	350.00	400.00	450.00	500.00	337,436,000.00	887,436,000.00	987,436,000.00	1,587,436,000.00	987,436,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	210,000,000.00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	210,000,000.00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1,108,099,000.00	1,907,237,000.00	1,948,102,000.00	2,541,572,000.00	2,041,572,000.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	210,000,000.00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	210,000,000.00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	500.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenldatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	400.00	500.00	650.00	700.00	750.00	31,576,794,000.00	34,370,908,000.00	36,342,864,000.00	693,791,282,000.00	40,993,185,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	39,225,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.000.000	1,299,943,000.00	1,299,943,000.00	1,485,674,000.00	1,524,566,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	75,000,000.00	50,657,000.00	139,807,000.00	139,807,000.00	139,807,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	39,225,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	39,225,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	39,225,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	27,000,000.00	660,446,000.00	768,346,000.00	993,137,000.00	1,040,209,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	39,225,000	57,041,000	82,177,000	134,542,000	145,507,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	26,150,000.00	1,296,000,000.00	1,325,737,000.00	1,375,737,000.00	1,375,737,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	104,600,000.00	200,699,000.00	250,699,000.00	318,903,000.00	318,903,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	26,150,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	39,225,000.00	57,040,000.00	57,040,000.00	57,040,000.00	57,040,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	26,150,000	25,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	98,219,000.00	97,447,000.00	109,620,000.00	118,314,000.00	141,074,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	39,225,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	26,150,000.00	100,699,000.00	100,699,000.00	168,903,000.00	168,903,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	600.00	650.00	700.00	750.00	800.00	400,000,000.00	2,450,000,000.00	3,500,000,000.00	4,550,000,000.00	5,600,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	1,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	400,000,000.00	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	250,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23,645,508,000.00	24,285,288,000.00	24,977,827,000.00	27,028,739,000.00	26,995,648,000.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partiaipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	994,201,443.00	1,460,122,152.00	1,562,663,772.00	1,751,367,650.00	1,939,297,544.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	3,500,000,000.00	3,600,000,000.00	3,700,000,000.00	3,800,000,000.00	3,900,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenldatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	18,589,346,661.00	20,013,915,973.00	120,298,845,976.00	170,630,082,484.00	20,437,541,405.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78,341,327.00	101,572,634.00	113,133,189.00	125,073,927.00	128,460,487.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	100,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00	175,000,000.00	200,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	5.00	7.00	9.00	11.00	13.00	21,272,102.00	31,048,422.00	40,434,186.00	50,051,749.00	60,871,024.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	208,276,899.00	231,887,160.00	240,723,644.00	257,583,168.00	264,956,097.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	110.00	115.00	120.00	125.00	130.00	146,014,389.00	181,225,898.00	201,085,466.00	237,627,524.00	243,929,754.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	50,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	393,623,022.00	456,641,269.00	509,110,108.00	570,184,818.00	655,894,632.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	48.00	64.00	80.00	96.00	112.00	670,824,350.00	856,063,238.00	979,690,568.00	1,124,048,036.00	1,310,972,359.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	142,575,969.00	112,262,047.00	108,738,511.00	126,405,029.00	112,317,712.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5,566,000.00	6,500,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1,072.00	1,082.00	1,092.00	1,102.00	1,112.00	367,069,253.00	392,242,543.00	394,068,263.00	396,817,761.00	389,597,932.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	11,760,289,167.00	12,244,631,871.00	12,244,735,672.00	12,621,480,524.00	12,702,457,365.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partiaipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	600.00	700.00	800.00	900.00	1,000.00	350,000,000.00	450,000,000.00	550,000,000.00	650,000,000.00	750,000,000.00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	2,750,000.00	3,000,000.00	3,250,000.00	3,500,000.00	3,750,000.00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	1,500,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00	750,000.00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenldatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	169,491,000.00	176,271,000.00	183,322,000.00	190,655,000.00	192,562,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	117,270,000.00	121,961,000.00	126,839,000.00	131,913,000.00	133,232,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	264,807,000.00	275,399,000.00	286,415,000.00	297,872,000.00	300,851,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	15.00	17.00	19.00	21.00	23.00	1,085,236,000.00	1,193,759,000.00	1,313,135,000.00	1,444,449,000.00	2,888,896,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	25.00	30.00	60.00	90.00	100.00	185,000,000.00	300,000,000.00	557,840,000.00	1,083,010,000.00	2,106,890,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	50.00	70.00	100.00	130.00	150.00	115,000,000.00	276,500,000.00	550,000,000.00	1,050,000,000.00	2,000,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	68,345,000.00	75,179,500.00	82,697,000.00	90,967,000.00	100,063,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	330,000,000.00	363,000,000.00	399,300,000.00	493,270,000.00	483,153,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		30.00	60.00	65.00	90.00		150,000,000.00	300,000,000.00	450,000,000.00	90,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	44.00	48.00	53.00	59.00	60.00	73,040,000.00	80,344,000.00	88,378,000.00	97,216,000.00	106,937,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	30.00	60.00	90.00	100.00	120.00	100,000,000	256,160,000	750,180,000	979,240,000	1,000,000,000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	1,100.00	1,210.00	1,331.00	1,464.00	1,464.00	266,200,000.00	292,820,000.00	322,102,000.00	354,312,000.00	389,743,000.00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	44.00	48.00	53.00	59.00	69.00	73,760,500.00	81,136,000.00	89,250,000.00	98,175,000.00	107,992,000.00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	33.00	36.00	40.00	44.00	4.00	363,000,000.00	399,300,000.00	439,230,000.00	483,153,000.00	531,468,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	43,500,000.00	104,400,000.00	177,480,000.00	307,040,400.00	521,968,680.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	245,440,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	226,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	440.00	484.00	532.00	586.00	89.00	702,845,000.00	773,200,000.00	85,045,000.00	935,490,000.00	1,029,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	250.00	300.00	350.00	400.00	450.00	229,108,320.00	358,533,955.00	522,366,969.00	757,432,106.00	1,136,148,159.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25,000,000.00	38,750,000.00	60,062,500.00	93,096,875.00	119,300,156.00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	150.00	200.00	250.00	300.00	350.00	105,400,000.00	210,800,000.00	421,600,000.00	843,200,000.00	936,400,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	25,000,000.00	31,250,000.00	42,187,500.00	59,062,500.00	82,687,500.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	25,000,000.00	31,250,000.00	42,187,500.00	59,062,500.00	82,687,500.00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	117.00	127.00	137.00	147.00	157.00	111,350,000.00	167,025,000.00	267,240,000.00	427,584,000.00	684,134,400.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	88,400,000.00	132,600,000.00	198,900,000.00	298,350,000.00	447,525,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	419,735,000.00	436,524,000.00	453,985,000.00	472,144,000.00	476,865,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	276,736,000.00	287,805,000.00	299,317,000.00	311,290,000.00	314,403,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	75,000,000.00	78,000,000.00	81,120,000.00	84,365,000.00	85,209,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partiaipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.										
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1.00					2,000,000,000.00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenldatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602,000,000.00	602,000,000.00	602,000,000.00	602,000,000.00	602,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	2,709,000.00	2,709,000.00	2,709,000.00	2,709,000.00	2,709,000.00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	1.00					6,502,352,000.00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	44.00	46.00	49.00	50.00	54.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	150.00	180.00	210.00	240.00	270.00	1,505,000,000.00	1,535,000,000.00	1,566,000,000.00	1,597,000,000.00	1,629,000,000.00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	210.00	215.00	180.00	210.00	240.00	1,504,000,000.00	1,534,000,000.00	1,565,000,000.00	1,596,000,000.00	1,628,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	594.00	609.00	633.00	641.00	673.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	11.00	13.00	16.00	17.00	21.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.00	60.00	90.00	120.00	150.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90.00	120.00	125.00	130.00	150.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.00	15.00	18.00	19.00	23.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	129,000,000	129,000,000	129,000,000	129,000,000	
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	66.00	67.00	70.00	71.00	75.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	300.00	330.00	360.00	390.00	420.00	2,229,000,000.00	2,310,000,000.00	2,317,000,000.00	2,401,000,000.00	2,421,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	13.00	15.00	18.00	19.00	23.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	30.00	35.00	35.00	40.00	40.00	80,000,000.00	82,000,000.00	84,000,000.00	86,000,000.00	88,000,000.00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	10.00					75,000,000.00				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	20.00					-				
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	130,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	2,709,000,000.00	2,709,000,000.00	2,709,000,000.00	2,709,000,000.00	2,709,000,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	1,480,500,000.00	1,480,500,000.00	1,480,500,000.00	1,480,500,000.00	1,480,500,000.00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	150,000,000.00	524,184,523.81	799,702,380.95	1,075,000,000.00	1,383,333,333.33
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	20.00					5,000,000.00				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	820,00	830,00	2.430,00	4.080,00	7.340,00	230.000.000.000,00	260.000.000.000,00	1.052.500.000.000,00	1.062.500.000.000,00	1.062.500.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	8,00	12,00	26,00	46,00	84,00	45.000.000.000,00	60.000.000.000,00	140.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	100,00	100,00	300,00	500,00	900,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	75.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	3,00	5,00	9,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	52.500.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	3,00	5,00	9,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	75.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	3,00	5,00	9,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	75.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	3,00	5,00	9,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	75.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	28,00	28,00	84,00	140,00	252,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	400.000.000.000,00	550.000.000.000,00	550.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	15.000.000.000,00	16.500.000.000,00	18.500.000.000,00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	36.337.235.000,00	36.337.235.000,00	36.337.235.000,00	36.337.235.000,00	36.337.235.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	415,00	425,00	2.640,00	3.480,00	6.545,00	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00	280.000.000.000,00	280.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	6.645.000.000,00	6.977.250.000,00	7.326.112.500,00	7.692.418.100,00	8.077.039.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	10.098.150.000,00	11.139.000.000,00	11.695.900.000,00	12.280.600.000,00	12.894.600.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	10.596.400.000,00	11.126.200.000,00	11.682.500.000,00	12.266.600.000,00	12.879.900.000,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	9.803.600.000,00	10.293.700.000,00	10.808.300.000,00	11.348.700.000,00	11.916.100.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	12.983.000.000,00	16.783.410.000,00	17.622.580.500,00	18.503.709.500,00	19.428.895.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH														
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	31.699.369.600,00	42.248.288.000,00	44.435.702.400,00	46.682.487.500,00	49.017.611.900,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	-	54,00	56,00	58,00	60,00	-	48.191.396.500	50.660.966.300	53.204.014.600	55.914.215.400
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	2.255.400.000,00	2.368.170.000,00	2.486.578.500,00	2.610.907.400,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	25.586.000.000,00	26.874.943.500,00	28.190.340.700,00	29.599.857.800,00	31.079.850.600,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL														
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF														
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	37.000.000.000,00	30.000.000.000,00	31.000.000.000,00	32.000.000.000,00	33.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya		102,00	104,00	106,00	108,00	27.500.000.000,00	28.000.000.000,00	28.500.000.000,00	29.000.000.000,00	
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	38.343.000.400,00	47.013.894.200,00	49.374.589.000,00	51.889.318.400,00	54.582.984.300,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	1.051,00	1.166,00	1.202,00	1.360,00	1.480,00	241.000.000.000,00	256.000.000.000,00	311.000.000.000,00	357.000.000.000,00	409.100.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.750.000.000,00	3.025.000.000,00	3.327.500.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	30.000.000.000,00	40.000.000.000,00	44.000.000.000,00	48.400.000.000,00	53.240.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	120.000.000.000,00	75.000.000.000,00	82.500.000.000,00	90.750.000.000,00	99.825.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	250,00	225,00	202,00	180,00	160,00	50.000.000.000,00	110.000.000.000,00	121.000.000.000,00	127.100.000.000,00	131.810.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.830.000.000,00	2.830.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000	84.781.791	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	1,00									

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500.000.000,00	510.000.000,00	520.000.000,00	540.000.000,00	550.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	141.070.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	121.776.094,41	122.023.030,56
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	400.000.000,00	400.000.000,00	456.924.386,15	500.000.000,00	500.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	169.108.500,00	184.198.231,88	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	85,21	85,71	86,21	86,71	87,21	241.352.800,00	246.210.146,98	259.256.401,76	268.643.420,97	292.303.770,48
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	198.000.800,00	199.050.100,00	204.150.350,00	215.150.350,00	215.150.350,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	56,00	59,00	63,00	66,00	69,00	252.140.000,00	255.509.048,70	267.792.549,64	274.690.220,03	292.792.245,11
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	84.000.000,00	85.150.000,00	86.750.000,00	95.450.000,00	95.450.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	500,00	480,00	485,00	490,00	495,00	1.614.542.000,00	636.247.818,81	702.932.817,21	777.851.285,53	864.798.628,23
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	95,00	100,00	105,00	110,00	110,00	12.315.521.135,00	12.511.693.950,15	12.413.304.247,95	12.888.794.224,92	12.838.204.781,71
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal		20,00	25,00	30,00	35,00		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	300.000.000,00	315.000.000,00	330.750.000,00	350.000.000,00	367.500.000,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	450,00	450,00	525,00	600,00	650,00	2.250.350.000,00	2.250.000.000,00	2.950.000.000,00	3.150.400.000,00	3.985.400.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	104.674,00	105.800,00	106.150,00	106.450,00	106.750,00	7.087.415.950,00	7.140.563.673,00	7.279.600.739,74	7.654.436.831,16	7.948.644.921,78
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	256,00	281,00	301,00	326,00	356,00	2.200.000.000,00	2.229.577.000,00	2.320.444.000,00	2.422.530.000,00	2.541.006.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	350.000.000,00	354.706.000,00	369.162.000,00	385.403.000,00	404.252.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100.000.000,00	101.345.000,00	105.476.000,00	110.117.000,00	115.503.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	175.000.000,00	177.353.000,00	184.581.000,00	192.702.000,00	202.127.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil		1,00	1,00	1,00	1,00		50.000.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00	66.550.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

22. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	667,00	800,00	800,00	1.000,00	1.200,00	609.458.500,00	611.591.605,00	620.765.479,00	626.973.134,00	642.647.462,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	156.550.500,00	157.098.427,00	159.454.903,00	161.049.452,00	165.075.688,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	671.421.100,00	673.771.074,00	687.246.495,00	694.118.960,00	701.060.150,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	2.974.486.800,00	2.984.897.504,00	3.044.595.454,00	3.075.041.408,00	3.105.791.822,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	5.890.500.000,00	5.912.294.800,00	6.026.933.300,00	6.092.084.800,00	6.163.362.200,00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	211,00	1,00	1,00	1,00	1,00	317.583.400,00	500.782.000,00	501.565.000,00	502.349.000,00	503.135.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	5,00	5,00	13,00	13,00	13,00	577.690.000,00	577.690.000,00	4.514.079.000,00	4.521.135.000,00	4.528.202.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300.000.000,00	150.235.000,00	150.470.000,00	150.706.000,00	150.942.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	20.700.003.000,00	20.772.453.011,00	100.008.385.982,00	179.797.409.524,00	21.656.901.281,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	299.997.000,00	299.997.000,00	299.997.000,00	299.997.000,00	299.997.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	65,00	80,00	100,00	140,00	170,00	240.000.000,00	242.112.636,00	253.184.021,00	259.491.652,00	266.396.285,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	65,00	80,00	100,00	140,00	170,00	329.954.250,00	329.954.250,00	329.954.250,00	329.954.250,00	329.954.250,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	58.905.000,00	59.122.948,00	60.269.933,00	60.920.848,00	61.633.622,00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	339.988.900,00	339.988.900,00	339.988.900,00	339.988.900,00	339.988.900,00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25,00	34,00	43,00	59,00	73,00	269.723.300,00	269.723.300,00	269.723.300,00	269.723.300,00	269.723.300,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18,00	25,00	36,00	40,00	55,00	173.124.250,00	174.765.743,00	183.368.074,00	188.269.028,00	193.633.844,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	195,00	215,00	235,00	255,00	275,00	641.016.950,00	641.016.950,00	641.016.950,00	641.016.950,00	641.016.950,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	499.999.725	509.605.985	559.948.100	588.629.206	620.024.902
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	250,00	350,00	450,00	550,00	650,00	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	300,00	350,00	400,00	500,00	600,00	979.999.800,00	979.999.800,00	979.999.800,00	979.999.800,00	979.999.800,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	30,00	40,00	50,00	55,00	60,00	499.999.825,00	499.999.825,00	499.999.825,00	499.999.825,00	499.999.825,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00	49.994.600	49.994.600,00	49.994.600,00	49.994.600,00	49.994.600,00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	50.000.000,00	50.350.000,00	50.767.900,00	51.300.900,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	300.296.525,00	300.296.525,00	300.296.525,00	300.296.525,00	300.296.525,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	120,00	160,00	220,00	260,00	300,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	502,00	576,00	650,00	724,00	798,00	3.392.371.860,00	3.392.371.860,00	3.474.157.647,00	3.520.752.963,00	3.571.758.401,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	5.350,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00	5.550,00	490.660.500,00	490.660.500,00	490.660.500,00	490.660.500,00	490.660.500,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	200,00	300,00	400,00	450,00	500,00	335.049.500,00	335.049.500,00	335.049.500,00	335.049.500,00	335.049.500,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	808,00	862,00	916,00	970,00	1.024,00	760.042.400,00	765.042.400,00	790.042.400,00	821.671.971,00	856.295.198,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	45,00	49,00	54,00	54,00	53,00	291.333.800,00	296.927.599,00	327.444.970,00	327.444.970,00	327.444.970,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		650,00	650,00	650,00	650,00		325.508.000,00	326.017.000,00	326.527.000,00	327.038.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		650,00	650,00	650,00	650,00		325.508.000,00	326.017.000,00	326.527.000,00	327.038.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		520,00	520,00	520,00	520,00		52.082.000,00	52.164.000,00	52.246.000,00	52.328.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	280.176.232,00	281.214.761,00	286.657.195,00	289.757.880,00	293.152.045,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

23. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00	72.614.990,00	70.502.035,00	67.909.256,00	60.126.693,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	7.162.636.000,00	6.968.193.700,00	7.112.285.000,00	6.125.851.400,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	35,00	35,00	35,00	35,00	-	12.984.431.700,00	12.787.277.500,00	2.540.101.800,00	2.041.950.500,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022		1,00	1,00	1,00	1,00	-	4.775.090.700,00	5.574.554.900,00	5.842.234.100,00	5.309.071.200,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1	1,00	1,00	1,00	1,00	12.500.000.000,00	11.937.726.700,00	12.542.748.600,00	12.700.508.900,00	11.026.532.500,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1	1,00	1,00	1,00	1,00	7.187.500.000,00	11.937.726.700,00	12.264.020.900,00	11.938.478.400,00	10.209.752.300,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	13.879.761.200,00	14.180.916.200,00	4.318.174.000,00	3.879.705.900,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	35	35,00	35,00	35,00	35,00	160.000.000.000,00	201.595.950.500,00	211.491.098.500,00	211.491.097.800,00	183.929.721.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	6.114,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	427.608.394.730,00	52.137.340.300,00	74.109.071.800,00	74.290.789.700,00	65.693.400.200,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	60,00	60,00	60,00	30,00	30,00	20.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	27.500.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	30,00	30,00	30,00	23,00	23,00	40.000.000.002,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	13.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	60.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH														
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	558.950.552.500,00	283.950.552.500,00	283.950.552.500,00	293.950.552.500,00	313.950.552.500,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	318.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	260.000.000.000,00	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	12.000.000.000	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL														
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF														
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal		100,00	100,00	100,00	100,00		22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.136.668.920.910,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	60.000.000.000,00	80.000.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	200,00	210,00	200,00	200,00	534,00	480.974.400.000,00	190.092.000.000,00	155.262.776.900,00	248.690.165.400,00	548.192.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00	3.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	27.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	850	204,00	4.670,00	6.292,00	8.885,00	20.128.800.000,00	49.528.513.300,00	116.377.026.600,00	160.951.226.600,00	233.437.569.300,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	1.550.000.000,00	80.000.000.000,00	90.000.000.000,00	93.170.000.000,00	120.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	172.258.124,00	172.258.124,00	172.258.124,00	172.258.124,00	172.258.124,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.850.000.000,00	1.822.900.093,00	2.172.688.723,00	2.500.000.000,00	2.550.000.000,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		200,00	200,00	250,00	250,00	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	3,00	18,00	18,00	18,00	18,00	380.000.000,00	522.816.000,00	566.147.000,00	525.000.000,00	535.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	6,00	15,00	15,00	15,00	15,00	241.500.000,00	381.500.000,00	385.500.000,00	381.500.000,00	386.500.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	12.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2.975.250.000,00	2.975.250.000,00	2.975.250.000,00	2.975.250.000,00	2.975.250.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	24,00	25,00	30,00	35,00	40,00	300.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00		165.000.000,00	181.500.000,00	199.650.000,00	219.615.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	130.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00	146.410.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	5,00	7,00	9,00	12,00	15,00	200.000.000,00	210.000.000,00	270.000.000,00	360.000.000,00	450.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI														
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	75.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	200,00	220,00	240,00	280,00	300,00	600.000.000,00	412.500.000,00	453.750.000,00	499.125.000,00	549.037.500,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA														
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA														
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI														
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	16,00	36,00	36,00	36,00	36,00	234.900.000,00	2.651.260.406,00	2.970.352.807,00	3.400.297.908,00	3.740.327.698,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA														
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja		100,00	100,00	100,00	100,00		89.775.000,00	94.263.750,00	103.690.125,00	114.059.138,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100.241.103,00	182.867.454,00	192.010.827,00	211.211.909,00	232.333.100,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	5,00	5,00	8,00	10,00	10,00	71.161.938,00	75.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72.421.265,00	212.120.000,00	217.120.000,00	237.120.000,00	247.120.000,00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	100,00	12,00	1.526,00	1.425,00	1.625,00	240.000.543,00	279.950.000,00	306.600.000,00	283.950.000,00	316.600.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan		5,00	5,00	5,00	5,00		129.741.711,00	155.215.927,00	172.900.000,00	172.900.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	30,00	50,00	800,00	850,00	900,00	130.496.897,00	1.090.451.267,00	1.300.782.302,00	1.400.000.000,00	1.600.000.000,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	1.700.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

25. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	152.525.088.093,00	1.830.301.057,00	2.287.876.321,00	2.974.239.217,00	4.015.222.943,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.500.000,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	38.208.872,00	38.208.872,00	38.208.872,00	38.208.872,00	38.208.872,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	502.404.439,36	50.240.443.936,00	50.240.443.936,00	50.240.443.936,00	50.240.443.936,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	702.360.000,00	702.360.000,00	702.360.000,00	702.360.000,00	702.360.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.131.442.301,00	2.131.442.301,00	2.131.442.301,00	2.131.442.301,00	2.131.442.301,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4.925.400.101,00	4.925.400.101,00	4.925.400.101,00	4.925.400.101,00	4.925.400.101,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	124.508.948.823,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.499.226.000,00	25.000.000.000,00	25.625.000.000,00	26.137.500.000,00	2.655.266.300,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.813.582.600,00	1.994.940.900,00	2.194.434.900,00	2.413.878.400,00	2.655.266.300,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3.497.211.700,00	3.846.932.900,00	4.231.626.200,00	4.654.788.800,00	5.120.267.800,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12.500.000.000,00	62.608.559.700,00	67.007.191.650,00	81.511.401.600,00	17.500.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	11,00	11,00	11,00	18,00	20,00	5.499.970.000,00	5.499.970.000,00	5.499.970.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi										
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	15,00	20,00	20,00	35,00	50,00	5.922.556.800,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	11,00	11,00	11,00	18,00	20,00	5.499.970.000,00	5.499.970.000,00	5.499.970.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	1.951,00	2.146,00	2.361,00	2.597,00	2.857,00	57.845.142.000,00	57.845.142.000,00	57.845.142.000,00	75.000.000.000,00	70.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	14,00	10,00	15,00	15,00	20,00	6.986.484.300,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	10.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	15,00	15,00	15,00	30,00	30,00	3.954.973.200,00	3.954.973.200,00	3.954.973.200,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	48,00	256,00	272,00	288,00	304,00	13.609.729.000,00	144.544.994.500,00	160.029.712.600,00	163.839.008.300,00	170.789.751.100,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	850,00	860,00	870,00	880,00	890,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.200.000.000,00	5.300.000.000,00	5.500.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00					
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2.350.000.000,00	2.163.000.000,00	2.227.890.000,00	2.294.726.700,00	2.363.568.500,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	1.860.000.000,00	2.139.000.000,00	2.459.850.000,00	2.828.827.500,00	3.253.151.625,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		10,00	10,00	10,00	10,00		10.000.000.000,00	10.250.000.000,00	10.455.000.000,00	10.559.550.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		462,00	462,00	462,00	462,00		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		10,00	10,00	10,00	10,00		10.000.000.000,00	10.250.000.000,00	10.455.000.000,00	10.559.550.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

26. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	780.000.000	846.300.000	905.541.000	968.928.870	1.031.473.782
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000.000	162.750.000	174.142.500	186.332.475	201.239.073

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	100.000.000,00	115.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	200.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	65.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	35.000.000,00	35.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	1.000.000.000,00	1.082.550.858,00	2.128.686.161,00	2.172.644.192,00	2.200.879.286,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	2.587.838.634,22	2.709.887.204,88	2.905.240.355,31	3.109.282.124,54	3.336.588.087,39
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	2.720.369.453,77	2.848.668.490,30	3.054.026.249,51	3.268.517.597,22	3.507.464.566,26
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.478.764.933,84	1.548.506.974,22	1.660.137.345,89	1.776.732.642,59	1.906.621.764,22

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00	195.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	295.000.000,00	345.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	245.555.562,42	282.403.653,04	314.185.684,28	354.175.060,10	399.986.199,35
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	20,00	27,00	34,00	40,00	47,00	1.052.103.550,00	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00	1.204.179.587,00	1.300.000.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	25,00	30,00	32,00	36,00	39,00	154.002.913,20	234.034.572,64	277.171.295,03	329.580.053,14	355.892.300,82
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	350,00	355,00	360,00	365,00	370,00	245.555.562,42	282.403.653,04	314.185.684,28	354.175.060,10	399.986.199,35
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	368.333.343,00	423.605.476,04	471.278.526,42	531.262.588,64	599.979.299,02
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7,00	11,00	14,00	19,00	23,00	66.732.469,39	102.153.543,51	150.611.370,12	180.843.729,08	225.954.871,39
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7,00	10,00	12,00	15,00	18,00	89.649.999,58	151.293.844,80	173.503.131,51	224.144.250,44	271.700.771,82
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH														
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	330,00	260,00	150,00	200,00	250,00	921.364.810,58	865.263.258,02	1.023.427.438,44	1.116.321.506,69	1.223.276.319,77
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	100,00	40,00	45,00	50,00	75,00	368.333.344	121.913.613	191.678.015	251.624.334	320.368.412
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	8.814,00	11.186,00	13.735,00	16.796,00	20.407,00	101.901.397,00	130.149.499,05	149.780.653,86	129.094.015,31	141.242.426,50
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	245.555.562,42	282.403.653,04	314.185.684,28	354.175.060,10	399.986.199,35
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	120,00	100,00	160,00	200,00	240,00	58.932.691	58.346.399,19	103.974.811,47	130.065.979,65	160.006.019,26
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL														
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF														
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	259.287.660,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI														
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	203.130.850,00	53.131.000,00	56.043.500,00	58.000.000,00	67.551.000,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	5,00	6,00	7,00	9,00	11,00	206.555.562,00	282.403.653,04	314.185.684,28	354.175.060,10	399.986.199,35
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	270,00	320,00	350,00	400,00	460,00	151.326.935,27	149.821.456,18	266.985.760,09	333.982.469,60	410.862.281,31
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA														
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA														
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI														
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	1.500,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00	10.250.000.000,00	11.500.000.000,00	12.500.000.000,00	13.500.000.000,00	14.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA														
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	500,00	600,00	-	700,00	800,00	65.000.000,00	70.200.000,00	75.816.000,00	81.881.280,00	88.431.782,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.175.000.000,00	189.000.000,00	204.120.000,00	220.449.600,00	238.085.568,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	300,00	350,00	450,00	500,00	600,00	600.000.000,00	620.000.000,00	640.000.000,00	660.000.000,00	680.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	440,00	545,00	550,00	555,00	560,00	850.000.000,00	1.025.000.000,00	1.077.400.000,00	1.132.392.000,00	1.190.183.360,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.587.838.634,22	2.709.887.204,88	2.905.240.355,31	3.109.282.124,54	3.336.588.087,39
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.720.369.453,77	2.848.668.490,30	3.054.026.249,51	3.268.517.597,22	3.507.464.566,26
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.478.764.933,84	1.548.506.974,22	1.660.137.345,89	1.776.732.642,59	1.906.621.764,22
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	200.000.000,00	200.757.698,00	215.446.745,00	231.883.530,00	250.323.403,12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

27. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.										
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	1.250.000.000,00	1.250.306.110,00	1.250.306.110,00	1.250.306.110,00	1.250.306.110,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	500.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	24.250.000.000,00	24.700.000.000,00	24.700.000.000,00	24.700.000.000,00	24.700.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	19.749.500,00	29.676.900,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	19.927.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	2.753.711.525,00	2.753.711.525,00	30.850.000.000,00	30.850.000.000,00	30.850.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.291.390,00	6.291.390,00	6.291.390,00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.291.390,00	6.291.390,00	6.291.390,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.173.098.124,00	1.153.098.124,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	100,00	140,00	180,00	200,00	220,00		222.070.813,00	230.953.646,00	240.191.791,00	249.799.463,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	500,00	500,00	500,00	500,00	650,00	267.970.100,00	267.970.100,00	267.970.100,00	267.970.100,00	267.970.100,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	21.101.150,00	21.101.150,00	21.101.150,00	21.101.150,00	21.101.150,00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	170.929.238,00	179.475.699,00	188.449.484,00	197.871.959,00	207.765.556,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	115,00	110,00	105,00	100,00	95,00	20.998.478,00	22.048.401,00	23.150.821,00	24.308.363,00	25.523.781,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	100.458,00	100.458,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	21.327.653.276,00	21.327.653.276,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	750.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	165.431.000,00	165.431.000,00	165.431.000,00	165.431.000,00	165.431.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	12,00	12,00	12,00	12,00	8,00	8.577.677.200,00	8.577.677.200,00	8.577.677.200,00	8.577.677.200,00	8.577.677.200,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

28. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	36.465.188,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	36.465.188,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	36.465.188,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.205.000.000,00	2.315.250.000,00	2.431.012.500,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	36.465.188,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	36.465.188,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	300.000.000,00	315.000.000,00	330.750.000,00	347.287.500,00	364.651.875,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	4.117.791.761,00	4.117.791.761,00	4.117.791.761,00	4.117.791.761,00	4.117.791.761,00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH														
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL														
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI														
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF														
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	752.457.000,00	790.080.000,00	829.584.000,00	871.062.000,00	914.614.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	100,00	125,00	150,00	150,00	150,00	650.000.000,00	845.000.000,00	1.100.000.000,00	1.300.000.000,00	1.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	150.000.000,00	200.000.000,00	215.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	310.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	50,00	50,00	60,00	75,00	75,00	136.500.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00	175.000.000,00	200.000.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	25,00	25,00	25,00	25,00	40,00	78.750.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	500,00	600,00	650,00	650,00	700,00	525.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00	700.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	50,00	60,00	60,00	60,00	70,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	30,00	30,00	32,00	35,00	35,00	400.000.000,00	430.000.000,00	435.000.000,00	480.000.000,00	488.000.000,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	600.000.000,00	950.000.000,00	1.300.000.000,00	1.650.000.000,00	1.950.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

29. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila		24,00	24,00	24,00	24,00		131.250.000	137.812.500	144.703.125	151.938.280
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	131.250.000	137.812.500	144.703.125	151.938.281

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	185.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	766.572.742,00	810.572.742,00	810.572.742,00	960.572.742,00	810.572.742,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus			921,00	921,00	921,00			95.269.350,00	95.269.350,00	95.269.350,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.236.049.113,00	1.236.049.113,00	1.365.044.849,00	1.365.044.849,00	1.236.049.113,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	323.888.000,00	310.970.000,00	342.067.000,00	376.273.700,00	413.901.070,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	46.949.000,00	1.802.900.000,00	1.983.190.000,00	2.181.509.000,00	2.399.659.900,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	32.388.000,00	576.400.000,00	634.040.000,00	697.444.000,00	767.188.400,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00	4.967.178.000,00	2.926.000.000,00	3.218.600.000,00	3.540.460.000,00	3.894.506.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	155,00	220,00	220,00	220,00	220,00	432.212.000,00	1.650.000.000,00	1.660.000.000,00	1.670.000.000,00	1.680.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	12.903,00	12.903,00	12.903,00	12.903,00	12.903,00	123.000.000,00	195.210.500,00	195.210.500,00	195.210.500,00	195.210.500,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	283.929.000,00	283.929.000,00	283.929.000,00	283.929.000,00	283.929.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	4.845,00	5.065,00	5.285,00	5.505,00	5.725,00	100.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	1,00	7,00	6,00	5,00	4,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.581.964.632,00	3.138.575.000,00	3.169.960.750,00	3.201.660.357,00	3.233.676.960,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

30. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	153.349.000,00	153.349.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	2.850.000.000,00	2.950.000.000,00	2.996.651.000,00	2.996.651.000,00	2.996.651.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	150.646.183,00	200.448.515,00	250.893.558,00	300.187.630,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	2.362.987.000,00	2.462.987.000,00	2.462.987.000,00	2.562.987.000,00	2.462.987.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	400,00	415,00	430,00	450,00	465,00	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	260,00	290,00	325,00	350,00	365,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	65,00	85,00	100,00	120,00	130,00	1.300.000.000,00	1.550.000.000,00	1.600.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	150,00	200,00	230,00	255,00	265,00	7.200.000.000	9.700.000.000,00	10.400.000.000,00	11.500.000.000,00	12.000.000.000,00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	50.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	250,00	300,00	350,00	400,00	420,00	1.200.000.000,00	4.800.000.000,00	5.000.000.000,00	5.300.000.000,00	5.500.000.000,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	55,00	65,00	75,00	90,00	100,00	1.300.000.000,00	1.550.000.000,00	1.600.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	3.600,00	4.500,00	5.300,00	6.100,00	250,00	600.000.000,00	4.300.000.000,00	5.300.000.000,00	6.300.000.000,00	7.300.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	18,00	18,00	20,00	22,00	24,00	55.120.000,00	82.680.000,00	110.240.000,00	137.800.000,00	165.360.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	260,00	520,00	520,00	1.040,00	1.040,00	26.250.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	18,00	18,00	20,00	22,00	24,00	72.211.582,00	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

31. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100,00	150,00	160,00	175,00	200,00	2.000.000.000,00	1.845.934.900,00	2.078.516.750,00	2.229.049.462,00	2.387.631.640,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	1.800.000.000,00	2.157.193.600,00	2.138.037.500,00	2.211.749.000,00	2.288.777.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	395.679.600,00	395.679.600,00	395.679.600,00	395.679.600,00	395.679.600,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	2.715.000.000,00	2.870.260.400,00	119.275.302.280,00	299.628.572.009,00	3.132.237.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	100.000.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	12.500.000,00	140.000.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	50,00	70,00	100,00	130,00	150,00	100.000.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10,00	22,00	25,00	28,00	30,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5,00	3,00	4,00	4,00	5,00	100.000.000,00	110.000.000,00	112.000.000,00	115.000.000,00	120.000.000,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		30,00	60,00	65,00	90,00	-	150.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	90.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	40.000.000,00	41.562.083,00	43.362.670,00	45.299.500,00	47.483.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	30,00	60,00	90,00	100,00	120,00	100.000.000	256.160.000	750.180.000	979.240.000	1.000.000.000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,00	1.464,00	1.481.800.000,00	1.523.000.000,00	1.561.000.000,00	1.597.000.000,00	1.625.000.000,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	44,00	48,00	53,00	59,00	60,00	73.760.500,00	81.136.000,00	89.250.000,00	98.175.000,00	107.992.000,00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	15,00	20,00	20,00	25,00	30,00	320.200.000,00	330.000.000,00	335.000.000,00	340.000.000,00	345.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	10,00	20,00	40,00	43,00	45,00	67.500.000,00	70.058.414,00	97.446.000,00	100.765.000,00	104.068.190,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI														
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	405.000.000,00	420.816.000,00	739.046.900,00	770.865.000,00	809.272.900,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL														
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	245.440.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	226.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN														
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	291.200.000,00	293.000.000,00	295.000.000,00	310.000.000,00	315.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA														
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA														
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI														
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00	229.000.000,00	229.500.000,00	235.000.000,00	252.500.000,00	253.750.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA														
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	35,00		50,00		75,00	117.500.000,00		130.920.000,00		144.310.500,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja		200,00		250,00			128.076.000,00		136.987.000,00	
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI														
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	63.714.000,00	70.181.300,00	66.393.500,00	73.017.000,00	80.904.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	25.047.000,00	25.047.000,00	25.047.000,00	25.047.000,00	25.047.000,00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	621,00	621,00	621,00	633,00	639,00	150.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	180.000.000,00	190.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.210.000.000,00	1.331.000.000,00	1.397.550.000,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila		5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.300,00		423.500.000,00	465.850.000,00	512.435.000,00	563.678.500,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	8,00	6,00	5,00	4,00	3,00	800.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.537.500.000,00	1.750.000.000,00	1.837.500.000,00	1.889.375.000,00	1.983.843.750,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

32. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	510.000.000
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggraaan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	510.000.000

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	450.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	165.000.000,00	180.000.000,00	195.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	435.085.400,00	435.085.400,00	435.085.400,00	435.085.400,00	435.085.400,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	73.368.400,00	73.368.400,00	73.368.400,00	73.368.400,00	73.368.400,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	317.920.640,00	317.920.640,00	317.920.640,00	317.920.640,00	317.920.640,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	308.580.300,00	335.426.786,00	356.218.614,00	402.229.005,00	402.229.005,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	308.580.300,00	335.426.786,00	356.218.614,00	402.229.004,00	402.229.004,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	30,00	35,00	45,00	45,00	45,00	200.000.000,00	250.000.000,00	325.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	45,00	50,00	60,00	60,00	60,00	335.737.354,00	371.546.504,00	400.000.000,00	458.896.153,00	458.896.153,00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	150.000.000,00	165.000.000,00	165.643.213,00	180.000.000,00	190.000.000,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	50.108.460,00	52.517.896,00	65.357.788,00	65.357.788,00	70.837.865,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45,00	45,00	50,00	55,00	55,00	300.000.000,00	325.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	276.577.537,00	276.577.537,00	276.577.537,00	276.577.537,00	300.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	95,00	96,00	97,00	100,00	100,00	700.000.000	725.000.000	718.560.593	800.000.000	800.000.000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	669,00	864,00	894,00	1.109,00	1.109,00	271.946.091,00	295.605.401,00	317.439.633,00	333.439.633,00	354.476.957,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	669,00	864,00	894,00	1.109,00	1.109,00	271.946.091,00	295.605.401,00	317.439.633,00	333.439.633,00	354.476.957,00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	669,00	864,00	894,00	1.109,00	1.109,00	271.946.091,00	295.605.401,00	317.439.633,00	333.439.633,00	354.476.957,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	155.105.336,00	181.649.500,00	224.096.920,00	233.879.684,00	247.699.450,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	669,00	864,00	894,00	1.109,00	1.109,00	271.946.091	295.605.401,00	317.439.633,00	333.439.633,00	354.476.957,00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00	250.000.000,00	275.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	325.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	669,00	864,00	894,00	1.109,00	1.109,00	543.892.182,00	591.210.806,00	614.879.266,00	666.879.266,00	708.953.914,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00	146.410.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

33. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.										
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi										
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi										
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja										
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku										
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

34. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	200.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	286.513.210,00	300.838.871,00	324.381.963,00	331.674.855,00	348.258.598,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	286.513.210,00	300.838.871,00	315.880.814,00	331.674.855,00	348.258.598,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	286.513.210,00	300.838.871,00	315.880.814,00	331.674.855,00	348.258.598,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	286.513.210,00	300.838.871,00	315.880.814,00	331.674.855,00	348.258.598,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	286.513.210,00	300.838.871,00	315.880.814,00	331.674.855,00	348.258.598,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	684.933.940,00	815.071.389,00	1.742.474.875,70	898.616.206,00	943.547.017,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	41.063.819,75	48.117.010,74	55.522.861,27	63.299.004,34	71.463.954,55
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	39.951.151,55	46.948.709,13	54.296.144,58	62.010.951,81	70.111.499,40
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	30,00	40,00	50,00	50,00	60,00	572.000.000,00	676.000.000,00	868.000.000,00	1.107.000.000,00	1.350.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	140.000.000,00	145.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	151.375.600,00	199.136.964,00	255.972.987,16	273.607.854,72	304.093.347,12
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00	500.643.442,36	600.445.696,41	650.970.378,73	700.574.750,68	801.013.953,31
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00	1.100.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.400.000.000,00	1.500.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	6.542.852.620,00	6.869.995.251,00	7.213.495.013,55	7.574.169.764,23	7.952.878.252,44
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00	57.881.250,00	60.775.312,50
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00	57.881.250,00	60.775.312,50
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200.000.000,00	210.000.000,00	220.500.000,00	231.525.000,00	243.101.250,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00	57.881.250,00	60.775.312,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	1.300.000.000,00	1.365.000.000,00	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.205.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

35. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	273.000.000	280.000.000	292.000.000	298.000.000	298.000.000
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	285.000.000	291.000.000	305.000.000	315.000.000	320.000.000

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	162,00	54,00	54,00	54,00	54,00	200.000.000,00	81.000.000,00	91.800.000,00	108.000.000,00	118.800.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000.000,00	210.000.000,00	220.000.000,00	230.000.000,00	250.000.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	500.000.000,00	510.000.000,00	520.000.000,00	530.000.000,00	550.000.000,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	3.700.000.000,00	4.000.000.000,00	4.100.000.000,00	4.200.000.000,00	4.300.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	250,00	300,00	1.000,00	1.500,00	1.700,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi										
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	30,00	60,00	90,00	120,00	150,00	150.000.000,00	157.500.000,00	173.375.000,00	174.643.750,00	182.325.938,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace		4,00	4,00	4,00	4,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	150,00	200,00	250,00	300,00	300,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	100.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	262.000.000,00	275.000.000,00	289.000.000,00	303.000.000,00	317.000.000,00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	170,00	190,00	210,00	230,00	250,00	390.000.000,00	430.000.000,00	470.000.000,00	510.000.000,00	540.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	250.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	20.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	15.000.000.000,00	15.500.000.000,00	16.000.000.000,00	16.400.000.000,00	16.500.000.000,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	155,00	200,00	250,00	300,00	350,00	600.000.000,00	900.000.000,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

36. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggraaan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	75,00	75,00	80,00	95,00	100,00	200.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	200.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400.000.000,00	440.000.000,00	475.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	210.000.000,00	105.000.000,00	52.500.000,00	26.250.000,00	13.125.000,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.196.210.744,00	1.185.661.881,00	2.239.480.237,00	2.249.918.024,00	2.335.199.994,00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	266.200.000,00	292.820.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	266.200.000,00	292.820.000,00
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	266.200.000,00	292.820.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	250.000.000,00	275.000.000,00	302.500.000,00	332.750.000,00	366.025.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	41.528.120,00	41.161.902,00	43.030.281,00	44.954.881,00	46.353.325,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	800.000.000,00	850.000.000,00	875.000.000,00	900.000.000,00	1.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	123.470.163,00	122.381.333,00	127.936.342,00	133.658.505,00	137.816.318,00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.356.680.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00	1.850.000.000,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	39.590.570,00	39.241.438,00	41.022.646,00	42.857.451,00	44.190.649,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	150.475.835,00	148.266.997,00	149.536.080,00	151.144.257,00	149.578.941,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	793.413.000,00	800.413.000,00	825.413.000,00	850.413.000,00	900.000.000,00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM		25,00	25,00	25,00	25,00		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.418.803.000,00	5.518.803.000,00	5.718.803.000,00	6.000.000.000,00	6.150.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	250.000.000,00	250.000.000,00	280.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	500.000.000,00	780.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.800.000.000,00	2.900.000.000,00	300.000.000,00	3.100.000.000,00	3.200.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	164,00	164,00	184,00	194,00	199,00	40.193.132.500,00	41.241.649.000,00	51.552.061.250,00	67.017.679.625,00	90.473.867.494,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	350.000.000,00	306.629.484,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	90.633.070,00	90.000.000,00	100.000.000,00	90.633.070,00	90.633.070,00
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	575.000.000,00	565.520.042,00	613.885.042,00	663.705.378,00	649.905.619,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran	250,00	100,00	150,00	100,00	150,00	8.200.000.000,00	4.920.000.000,00	5.412.000.000,00	4.920.000.000,00	5.412.000.000,00
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

37. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila										

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.										
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.										
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT																
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus										

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi										
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM										
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional										
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi										
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya										
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah										
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace										
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya										
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM										
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi										
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja										
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja										
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku										
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

38. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

ISU PENYELENGGARAAN NEGARA

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERINTERNALISASI DAN TERINSTITUSIONALISASINYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA															
KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN/ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KEBIJAKAN															
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
KEGIATAN: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH															
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin akses masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan regulasi dan kebijakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	700.000.000	550.000.000	550.000.000	500.000.000	900.000.000
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya regulasi, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	650.000.000	750.000.000	750.000.000	500.000.000	750.000.000

ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERBANGUNNYA KESADARAN DAN PRAKTIK KEHIDUPAN BERKEBINEKAAN															
KEBIJAKAN: MENGUATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEBINEKAAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara rutin kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di daerah serta melakukan pembentukan dan pembinaan forum-forum bentukan Pemerintah (FPK, FKUB dan FKDM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam nomenklatur urusan ini dapat berupa sosialisasi, penguatan, pemberdayaan, pengawasan, pendataan, pembentukkan dan pembinaan forum bentukan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.	100,00	300,00	350,00	400,00	450,00	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ internalisasi Pancasila secara rutin dengan koordinasi dengan Kesbangpol kepada masyarakat di berbagai segmen dengan materi-materi yang bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dukungan survei untuk memonitor capaian kegiatan secara terukur.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	9.000.000.000,00	11.000.000.000,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	288,00	420,00	540,00	540,00	600,00	25.000.000.000,00	32.000.000.000,00	38.000.000.000,00	42.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10.500.000.000,00	15.700.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10.500.000.000,00	15.700.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.200.000.000,00	12.300.000.000,00	14.000.000.000,00	15.000.000.000,00	16.000.000.000,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000.000.000,00	11.500.000.000,00	12.500.000.000,00	13.700.000.000,00	15.000.000.000,00
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perpres 51 Tahun 2022	73,00	250,00	300,00	350,00	400,00	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: MENDORONG DAN MENGUATKAN DIALOG ANTAR-MASYARAKAT BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DEMI TERBANGUNNYA INTEGRASI SOSIAL DI TENGAH-TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	DINAS/BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomenklatur Urusan/Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK. Untuk mencapai manfaat kegiatan ini dapat menggunakan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Digabung sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan Urusan/Program Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

ISU SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN:TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL YANG MENDORONG PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA															
KEBIJAKAN: MENDORONG REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.															
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMA										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi SMK										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi bagi siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000.000,00	375.000.000,00	500.000.000,00	625.000.000,00	1.000.000.000,00

ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*					*(8)*				
SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA															
KEBIJAKAN: MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK, KADERISASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA															
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK															
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	60.000.000.000,00	70.000.000.000,00	80.000.000.000,00	95.000.000.000,00	105.000.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	BIDANG URUSAN	OPERASIONALISASI PETA JALAN PIP	TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (RP)				
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)				
SASARAN: TERCIPTANYA KEHIDUPAN PEREKONOMIAN YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG															
KEBIJAKAN: MENGKAMPANYEKAN PEMBUDAYAAN SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	150,00	200,00	250,00	300,00	300,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi penguatan tata kelola koperasi pada tingkat provinsi	100,00	150,00	200,00	250,00	250,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00
KEGIATAN: PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data terkait dengan kepatuhan, kesehatan, kinerja koperasi, dan lain sebagainya pada tingkat Provinsi	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi keluarga/kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas usaha ekonomi koperasi/UMKM	150,00	200,00	250,00	300,00	300,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
SASARAN: SEMAKIN MENGUATNYA PERAN KOPERASI SERTA UMKM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL															
KEBIJAKAN: PENGADAAN AKSES FINANSIAL BAGI KOPERASI SERTA UMKM YANG MUDAH DAN TERJANGKAU															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat membina dan/atau mendampingi Kelompok Masyarakat pada koperasi yang terpilih sesuai dengan data pada SIDT sebagai basis data nasional	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	60,00	90,00	120,00	150,00	90,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00
KEGIATAN: PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses perizinan cabang-cabang koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	60,00	90,00	120,00	150,00	90,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,00	150,00	200,00	250,00	250,00	700.000.000,00	1.200.000.000,00	1.400.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA, INSENTIF PAJAK RENDAH DAN ADOPSI TEKNOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI BAGI KOPERASI DAN UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH															
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan barang dan jasa serta dapat berkontribusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021 serta pemerintah daerah dapat mengalokasikan tempat promosi pada infrastruktur publik paling sedikit 30% sesuai amanat UU Ciptaker (Nomor 6 Tahun 2023)	30,00	60,00	90,00	120,00	120,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi bagi koperasi yang lingkup keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota di satu provinsi	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.400.000.000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data termutakhir (update) usaha kecil dan mikro (UKM) di level provinsi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pendampingan bagi UMK dalam penggunaan aplikasi/sistem informasi pencatatan keuangan dan lain sebagainya	150,00	200,00	250,00	300,00	300,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN PASAR BAGI KOPERASI SERTA UMKM															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau perlindungan bagi koperasi dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.	100,00	150,00	200,00	250,00	250,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Operasionalisasi sub-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan atau pendampingan bagi koperasi dan/atau UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
SASARAN: TERCIPTANYA EKOSISTEM USAHA YANG ADIL															
KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PEMAIN LOKAL (*LOCAL CHAMPION*) YANG MEMIMPIN PASAR DALAM NEGERI															
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan bagi UMKM lokal	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
KEGIATAN: PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Memfasilitasi kemitraan UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri dengan usaha retail besar, perhotelan dan jasa akomodasi, dan marketplace	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
KEBIJAKAN: MENDORONG KEMITRAAN KOPERASI SERTA UMKM LOKAL DENGAN USAHA BESAR DAN PENGATURAN PENYERAPAN KONTEN LOKAL															
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kodefikasi nomenklatur program kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh mitra dengan badan hukum lainnya	100,00	150,00	200,00	250,00	250,00	700.000.000,00	1.200.000.000,00	1.400.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
KEGIATAN: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN															
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Melaksanakan pelatihan dan/atau bimbingan yang bertujuan untuk peningkatan UKM	600,00	700,00	800,00	900,00	1,00	1.501.500.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
SASARAN: TERPENUHINYA HAK DASAR WARGA NEGARA															
KEBIJAKAN: PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENYERAP ANGKATAN KERJA INDONESIA YANG TERSEDIA															
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI															
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan diklat bagi calon tenaga kerja berdasarkan kompetensi	160,00	160,00	160,00	176,00	176,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.700.000.000,00	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
KEGIATAN: PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA															
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Melaksanakan sistem karir hub secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencara kerja dan pemberi kerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mengadakan kegiatan jobfair yang mampu menyerap calon tenaga kerja	300,00		450,00		450,00	1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00
KEGIATAN: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Keterangan Kepmen Naker No 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) HIP adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan Kebudayaan Nasional Indonesia										
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN															
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Perusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring /pengawasan terhadap aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	400,00	500,00	550,00	620,00	620,00	750.000.000,00	880.000.000,00	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	Kasus	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Subkegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEBIJAKAN: REFORMA PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
KEGIATAN: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memfasiltasi proses penyerahan bantuan sosial kepada KPM secara tepat sasaran										
KEBIJAKAN: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS ASPEK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMA terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi SMK terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS															
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memastikan akses siswa-siswi Sekolah Pendidikan Khusus terhadap Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila										
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
KEGIATAN: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil										

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN PETA JALAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. GAMBARAN UMUM

Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan pedoman yang disusun oleh Badan pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) atas program, kegiatan, dan subkegiatan PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga (k/l), dan pemerintah daerah (pemda) provinsi untuk mengaktualisasikan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (AK PIP) secara bertahap hingga tahun 2045. Secara substantif, Peta Jalan PIP memuat matriks program, kegiatan, dan subkegiatan PIP yang diusulkan oleh lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi berdasarkan tugas dan fungsi. Matriks tersebut bersifat terukur dengan menyertakan bentuk keluaran dan waktu pelaksanaan selama periode lima tahunan sesuai dengan sasaran dan kebijakan AK PIP yang terkelompok dalam 5 (lima) isu strategis, yaitu: (1) penyelenggaraan negara; (2) kebinekaan, keteladanan, dan kepribadian dalam kebudayaan; (3) sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); (4) sistem politik demokrasi dan hubungan luar negeri; serta (5) sistem ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Sasaran dan kebijakan dalam 5 (lima) isu strategis tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, khususnya Arah Kebijakan Nomor (iii) dalam Misi Pembangunan Jangka Panjang Nomor 4 yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, “pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan Arah Kebijakan Nomor (i) dalam Misi Pembangunan Jangka Panjang Nomor 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, “pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa”.

Tabel 1
Sasaran, Kebijakan, dan Isu Strategis AK PIP

SASARAN	KEBIJAKAN
ISU PENYELENGGARAAN NEGARA	
(1) Terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia;	(1) Penyelarasan rancangan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila; (2) Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan; (3) Meningkatkan pemahaman dan/atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan penyelenggara negara;	(4) Menyusun standar kompetensi, kualifikasi, dan orientasi ideologi dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan penyelenggara negara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
(3) Terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai dan penyelenggara negara; dan	(5) Menyelenggarakan diklat terkait ideologi Pancasila bagi pegawai dan penyelenggara negara; dan
(4) Terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam budaya birokrasi publik dari tingkat pusat sampai daerah.	(6) Menciptakan budaya kerja di seluruh lingkungan organisasi birokrasi publik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
ISU KEBINEKAAN, KETELADANAN DAN KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN	
(1) Terbangunnya kesadaran dan praktik kehidupan berkebinekaan;	(1) Menguatkan wawasan kebangsaan dan kebinekaan yang berbasis nilai-nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat; (2) Menyiapkan dan mengembangkan pendidikan kewargaan yang berisi prinsip-prinsip moralitas publik berdasarkan Pancasila demi perawatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat;
(2) Terwujudnya kehidupan keberagamaan yang inklusif, moderat, dan toleran;	(3) Mendorong dan menguatkan dialog antar-masyarakat berbasis nilai-nilai Pancasila demi terbangunnya integrasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat;
(3) Pengarusutamaan keteladanan Pancasila dalam ruang-ruang publik; dan	(4) Mendorong terbentuknya kepemimpinan politik yang mampu melahirkan kebijaksanaan publik yang inklusif dengan berbasis pada nilai-nilai kebinekaan; (5) Menumbuhkan apresiasi di masyarakat terhadap berbagai bentuk praktik kebaikan nilai-nilai Pancasila; (6) Mempromosikan teladan pemerintahan dan masyarakat sebagai *best practices* pengamalan nilai-nilai Pancasila;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(4) Terciptanya gelombang budaya populer Indonesia sebagai sarana hegemoni Pancasila.	(7) Menciptakan konten-konten hegemoni Pancasila dalam produk-produk budaya populer generasi muda; (8) Mendorong riset dan inovasi seni-budaya daerah untuk menghasilkan konten-konten budaya populer Indonesia yang berdaya saing global; dan (9) Membangun lembaga dan ekosistem industri yang mendukung terciptanya gelombang budaya populer Indonesia.
ISU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SERTA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
(1) Terwujudnya pengembangan pemahaman Pancasila secara ilmiah;	(1) Meluruskan pengetahuan masyarakat mengenai sejarah Pancasila secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan otentik; (2) Mengembangkan studi-studi ilmiah tentang Pancasila secara intradisiplin, multidisiplin dan transdisiplin dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK;
(2) Terwujudnya diklat dalam kehidupan nasional yang mendorong pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter serta peradaban bangsa yang bermar-tabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;	(3) Mengembangkan materi dan metode pembelajaran Pancasila dalam lingkup pendidikan formal, nonformal dan informal; (4) Mendorong regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan nasional serta IPTEK untuk membentuk karakter serta peradaban bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
(3) Terwujudnya IPTEK sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada ideologi Pancasila; dan	(5) Mewujudkan institusionalisasi Pancasila dalam penyusunan program pembangunan nasional berdasarkan IPTEK; dan
(4) Terwujudnya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.	(6) Mendorong penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang berbasis kearifan lokal.
ISU SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	
(1) Terwujudnya sistem demokrasi berdasarkan Pancasila; dan	(1) Mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap kebijakan; (2) Menjamin hadirnya ruang-ruang partisipasi publik dalam sistem politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila; (3) Mengoptimalkan peran partai-partai politik di Indonesia dalam melaksanakan fungsi rekrutmen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	politik, kaderisasi, pendidikan politik, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa; (4) Menumbuhkembangkan peran masyarakat sipil dalam proses pendalaman demokrasi substansial bagi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
(2) Terwujudnya hubungan luar negeri yang berdasarkan Pancasila.	(5) Membangun hubungan luar negeri yang mengedepankan prinsip kemerdekaan adalah hak setiap bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila; (6) Meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi-organisasi Internasional dalam rangka menjaga ketertiban dunia; (7) Sinkronisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam formulasi dan implementasi kebijakan diplomasi ekonomi; dan (8) Meningkatkan peran perwakilan negara dalam mempromosikan Indonesia di luar negeri berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
ISU SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tujuan 1: Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong	
(1) Diterapkannya asas kekeluargaan dan gotong royong oleh setiap badan usaha;	(1) Menciptakan atau membentuk ekosistem badan usaha yang mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong;
(2) Tersedianya regulasi yang mendorong penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong; dan	(2) Melakukan evaluasi terhadap seluruh aturan yang ada terkait kesesuaian dengan asas kekeluargaan dan gotong royong; (3) Memasukkan unsur kekeluargaan dan gotong royong ke dalam setiap peraturan yang akan disusun oleh pemerintah/badan usaha;
(3) Terciptanya pemahaman dan kesadaran bersama akan pentingnya penerapan sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.	(4) Mengampanyekan pembudayaan sistem ekonomi Pancasila; dan (5) Memasukkan konsep sistem ekonomi Pancasila dalam kurikulum pembelajaran mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
Tujuan 2: Semakin menguatnya peran koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sistem perekonomian nasional	
(1) Meningkatnya akses koperasi serta UMKM terhadap sumber daya ekonomi;	(1) Pengadaan akses finansial bagi koperasi serta UMKM yang mudah dan terjangkau;
(2) Meningkatnya daya saing koperasi serta UMKM secara berkelanjutan; dan	(2) Pendampingan pengembangan usaha, insentif pajak rendah, dan adopsi teknologi untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	menciptakan efisiensi bagi koperasi serta UMKM; dan
(3) Meningkatnya akses koperasi serta UMKM kepada pasar.	(3) Penyediaan pasar bagi koperasi serta UMKM.
Tujuan 3: Terciptanya ekosistem usaha yang adil	
(1) Terciptanya iklim usaha yang memberdayakan kemandirian ekonomi rakyat sehingga ikut berperan dalam pembangunan nasional;	(1) Pemberian bantuan/insentif bagi ekspansi koperasi serta UMKM;
(2) Terciptanya iklim usaha yang mengutamakan potensi lokal; dan	(2) Pendampingan dan pengembangan pemain lokal (*local champion*) yang memimpin pasar dalam negeri; (3) Mendorong kemitraan koperasi serta UMKM lokal dengan usaha besar dan pengaturan penyerapan konten lokal; dan
(3) Terciptanya iklim usaha yang terhindar dari pemusatan sumber daya oleh perseorangan/ kelompok.	(4) Pengawasan terhadap penguasaan pasar.
Tujuan 4: Terpenuhinya hak dasar warga negara	
(1) Meningkatnya kesempatan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan;	(1) Penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang tersedia; (2) Reforma program jaminan kesejahteraan sosial; (3) Reviu terkait peraturan ketenagakerjaan untuk mencari formulasi kebijakan yang tepat dan berimbang yang dapat meningkatkan martabat tenaga kerja Indonesia;
(2) Meningkatnya jaminan sosial yang layak; dan	(4) Reforma program jaminan kesejahteraan sosial; dan
(3) Meningkatnya derajat tingkat pendidikan dan kesehatan.	(5) Peningkatan akses dan kualitas aspek kesehatan dan pendidikan.
Tujuan 5: Terwujudnya kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai pokok kemakmuran rakyat yang berwawasan lingkungan	
(1) Terwujudnya kedaulatan negara atas penguasaan SDA;	(1) Penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan SDA di Indonesia yang berorientasi pada Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; (2) Meningkatkan kepemilikan negara dalam usaha pengelolaan barang tambang dan mineral yang bersifat strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
(2) Meningkatnya akses rakyat dalam pemanfaatan SDA; dan	(3) Menumbuhkan koperasi sebagai unit usaha pengelolaan barang tambang di berbagai daerah di Indonesia; (4) Pelaksanaan transfer teknologi dan keterampilan di bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pertambangan dan energi oleh perusahaan-perusahaan asing terkait sebagai syarat investasi;
(3) Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	(5) Penguatan regulasi terkait keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L) dalam pengelolaan tambang di Indonesia; dan (6) Peningkatan peran masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA di daerahnya.
Tujuan 6: Terpeliharanya Kelestarian Lingkungan Hidup sebagai Penyangga Ekonomi Berkelanjutan	
(1) Terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan;	(1) Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kehutanan; (2) Memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dan adat dalam aktivitas ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan; dan (3) Memperbesar dukungan mitra lintas elemen dalam proses konservasi hutan;
(2) Terciptanya tata kelola pemerintahan sinergis dalam mewujudkan *Net Zero Emission* (NZE); dan	(4) Evaluasi regulasi di tingkat pusat dan daerah yang bertentangan dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC); (5) Memperkuat kapasitas Pemda dalam mendukung pencapaian NDC; dan (6) Memperluas sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program-program pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK);
(3) Terbangunnya ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah nasional.	(7) Mengefektifkan penerapan *Extended Producer Responsibilty* (EFR) dan insentif bagi perusahaan-perusahaan dalam sistem ekonomi sirkular; (8) Perluasan upaya pembinaan dan fasilitasi bank sampah; dan (9) Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam proses pengelolaan daur ulang sampah.

Secara sistematis, pelaksanaan Peta Jalan PIP terbagi atas 4 (empat) tahapan hingga Tahun 2044 dengan mengikuti alur perencanaan pembangunan jangka menengah nasional. Adapun rumusan tema dan tujuan dalam tiap tahapannya sebagai berikut: *Kesatu*, Peta Jalan PIP 2025-2029. Pada tahap ini tema yang diangkat adalah "Transformasi" dengan tujuan "Terbangunnya kesadaran atas kebijakan dan pelembagaan PIP dalam lembaga negara, k/l, dan Pemda". Melalui tema dan tujuan tersebut, pelaksanaan Peta Jalan PIP 2025-2029 diharapkan dapat menghasilkan persetujuan bersama kepada seluruh pemangku kepentingan lembaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

negara, k/l, dan pemda provinsi bahwa nilai-nilai Pancasila bersama dengan kebijakan PIP merupakan sesuatu yang melekat dalam tugas dan fungsi setiap lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi. Dengan demikian, akan muncul kesadaran dari tiap-tiap penyelenggara negara untuk tidak saja memperkuat berbagai aktivitasnya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan PIP, tetapi juga mendukung penguatan pengorganisasian PIP dari mulai tingkat pusat hingga daerah.

Gambar 1
Tahapan dan Tujuan Peta Jalan PIP

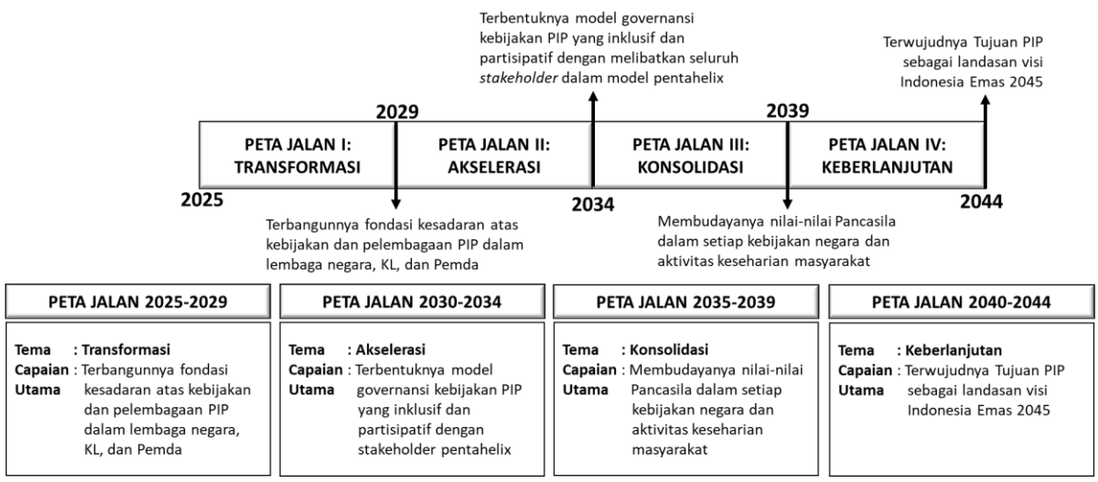

Kedua, Peta Jalan PIP 2030-2034. Tahapan kedua Peta Jalan PIP ini memiliki tema "Kolaborasi" dan tujuan "Terbentuknya model kolaborasi pelaksanaan kebijakan PIP yang infklusif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen negara dan masyarakat". Dalam tahap ini, akan dilakukan perluasan sistem korsindal kebijakan PIP dalam bentuk kolaborasi multipihak yang dapat menyentuh secara langsung seluruh pemangku kepentingan unsur negara, swasta, akademisi, media massa, organisasi masyarakat dalam model *multiple helix*. Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan pada tahapan Peta Jalan 2030-2034 akan mengarah pada pembentukan jejaring-jejaring pemerintahan (*governance network*) multipihak dalam rangka memperkuat serta sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan PIP yang telah dihasilkan dalam periode Peta Jalan PIP tahap kesatu (2025-2029).

Ketiga, Peta Jalan PIP 2035-2039 memiliki tema "Konsolidasi" dan tujuan "Membudayanya nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan negara dan aktivitas keseharian masyarakat". Dengan tema dan target tersebut, diharapkan pelaksanaan Peta Jalan PIP pada tahun-tahun tersebut akan menghadirkan proses kristalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap kebijakan organ negara (pusat dan daerah) beserta perilaku keseharian masyarakat melalui berbagai aktivitas demokratis dalam sistem governans yang telah dihasilkan dalam periode Peta Jalan PIP tahap kedua (2030-2034).

Keempat, Peta Jalan PIP 2040-2044 dengan tema "Keberlanjutan" dan tujuan "Terwujudnya Tujuan PIP sebagai landasan visi Indonesia Emas 2045". Pada tahapan akhir ini, diharapkan pelaksanaan Peta Jalan PIP tidak saja telah dapat memenuhi segala sasaran yang ditetapkan dalam AK PIP 2025-2045 dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, tetapi juga menciptakan berbagai upaya ekstensif dalam rangka menerapkan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa Indonesia pada era 100 tahun kemerdekaan dan selama-lamanya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. PELAKSANAAN PETA JALAN PIP 2025-2029

Peta jalan PIP tahap kesatu (2025-2029) mengambil tema "Transformasi" dengan tujuan "Terbangunnya kesadaran atas kebijakan dan pelembagaan PIP dalam lembaga negara, k/l, dan pemda". Secara substantif, rumusan tema dan tujuan tersebut merupakan penjabaran dari sasaran Kegiatan Prioritas (KP) 1 dalam Program Prioritas (PP) 1 pada Prioritas Nasional (PN) 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu, "Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara". Dengan bersandar pada hal ini, pelaksanaan Peta Jalan PIP tahap kesatu (2025-2029) tidak saja hendak menciptakan transformasi pelaksanaan kebijakan PIP menjadi bersifat lintas sektor dalam kerangka pembangunan nasional, melainkan juga menciptakan kesadaran bersama seluruh lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi di seluruh Indonesia untuk melaksanakan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila melalui pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu sebagaimana tertera dalam RPJMN 2025-2029, pelaksanaan Peta Jalan PIP 2025-2029 dinyatakan sebagai salah satu indikator KP1 dalam PP1 pada PN 1 dengan "persentase implementasi Peta Jalan PIP" secara berturut-turut dari 2025 hingga 2029 sebesar 40% sampai dengan 80%. Ini bermakna bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan oleh setiap lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi dalam Peta Jalan PIP 2025-2029 paling sedikit terealisasi tiap tahun dengan besaran persentase sebagaimana tercantum dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Rumusan Target Pelaksanaan Peta Jalan PIP 2025-2029
dalam RPJMN 2025-2029

Indikator	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
PN 1 PP 1 Kegiatan Prioritas 1: Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara					
Sasaran: Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara					
Persentase implementasi Peta Jalan PIP	40	50	60	70	80

Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal pencapaian target tersebut, pelaksanaan Peta Jalan PIP 2025-2029 akan mempergunakan alur *metapolicy* PIP dengan AK PIP sebagai kerangka acuan pelaksanaan. Melalui alur *metapolicy* ini, pelaksanaan korsindal atas berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan masing-masing lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi menjadi terstruktur dan terarah. Dalam hal ini, AK PIP menjadi pedoman bagi usulan program, kegiatan, dan subkegiatan setiap lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Untuk melaksanakan mekanisme korsindal terhadap berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga negara, k/l, maupun pemda provinsi, BPIP akan melaksanakan kegiatan forum korsindal Peta Jalan PIP yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Forum korsindal tersebut dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil forum korsindal ditindak lanjuti oleh seluruh lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi dengan melaporkan hasil program, kegiatan, dan subkegiatan, untuk mendapatkan masukan bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan PIP yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2
Alur *Metapolicy* Peta Jalan PIP

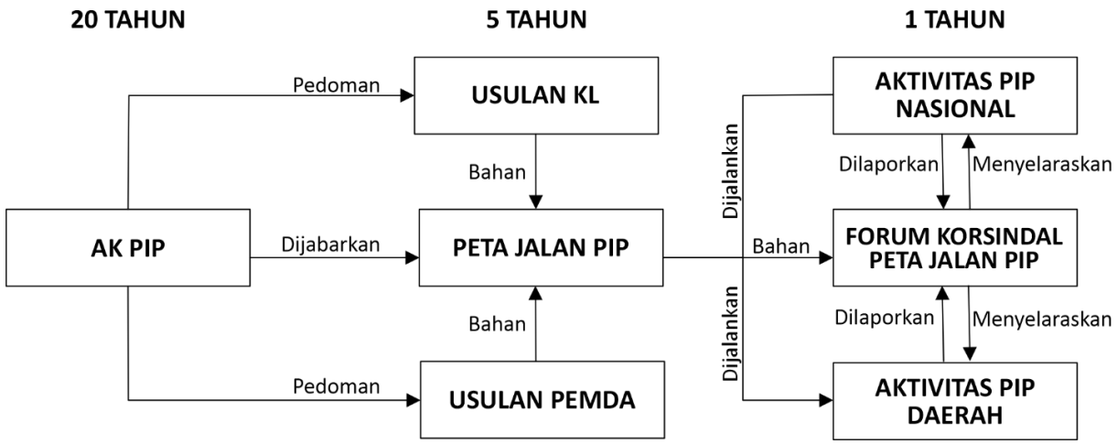

Dengan alur *metapolicy* tersebut, pelaksanaan korsindal Peta Jalan PIP 2025-2029 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Peta Jalan PIP serta penahapan sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Peta Jalan PIP

   Tim Koordinasi Peta Jalan PIP merupakan tim *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan korsindal Peta Jalan PIP. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.3 di bawah, tim ini tersusun atas ketua tim koordinasi, sekretaris tim koordinasi, ketua pelaksana, unit koordinasi dan sinkronisasi, unit pengendalian dan evaluasi, dan kelompok kerja (Pokja) dengan uraian keanggotaan dan tugas sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 3
Struktur Tim Koordinasi Peta Jalan PIP

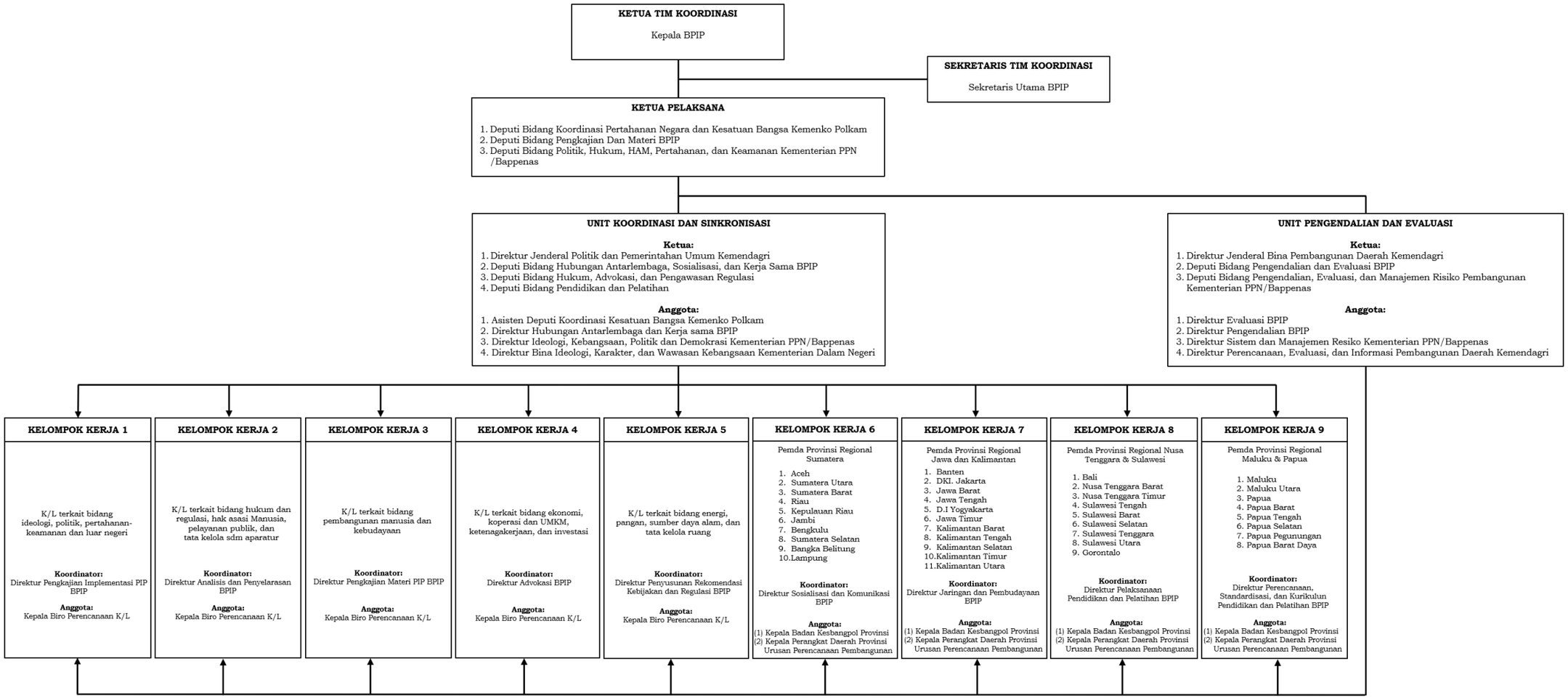

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Ketua Tim Koordinasi

Ketua Tim Koordinasi Peta Jalan PIP adalah Kepala BPIP. Tugas Ketua Tim Koordinasi Peta Jalan PIP adalah: (1) Memimpin pelaksanaan korsindal seluruh kegiatan dan subkegiatan dalam Peta Jalan PIP; (2) Memimpin koordinasi tingkat tinggi antar lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan PIP; (3) Memberikan arahan tugas pelaksanaan teknis Peta Jalan PIP kepada Ketua Pelaksana; dan (4) Menyampaikan laporan dan rekomendasi implementasi pelaksanaan Peta Jalan PIP setiap tahun kepada Presiden.

b. Sekretaris Tim Koordinasi

Sekretaris Tim Koordinasi Peta Jalan PIP adalah Sekretaris Utama BPIP yang memiliki tugas: (1) Menyelenggarakan dukungan administrasi, tata kelola persuratan, dan dokumentasi Tim Koordinasi Peta Jalan PIP; dan (2) Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi antar unsur dalam Tim Koordinasi Peta Jalan PIP.

c. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP dan Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas. Tugas Ketua Pelaksana adalah: (1) Mengoordinir pelaksanaan teknis tugas Unit Koordinasi dan Sinkronisasi serta Unit Pengendalian dan Evaluasi; (2) Memastikan seluruh kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP yang dilakukan seluruh lembaga negara, k/l dan pemda provinsi dalam Peta Jalan PIP dapat berjalan sesuai dengan AK PIP serta target yang ditetapkan; (3) Menetapkan kegiatan dan subkegiatan prioritas yang harus diintervensi lebih dalam oleh Tim Koordinasi Peta Jalan PIP; dan (4) Menyusun laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan Peta Jalan PIP setuap tahun yang akan dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Presiden.

d. Unit Koordinasi dan Sinkronisasi

Unit Koordinasi dan Sinkronisasi diketuai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemen dagri, Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, dan Kerja Sama BPIP, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP. Unit Koordinasi dan Sinkronisasi beranggotakan Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Direktur Hubungan Antarlembaga dan Kerja sama BPIP, Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, dan Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Tugas Tim Koordinasi dan Sinkronisasi adalah; (1) Mengoordinir pelaksanaan aktivitas Pokja, (2) Melakukan integrasi data rencana kerja kegiatan dan subkegiatan lembaga negara, k/l dan pemda provinsi tahunan yang dihimpun dari tiap Pokja ke dalam satu instrumen koordinasi sinkronisasi Peta Jalan PIP yang terukur, (3) Menyelaraskan kegiatan dan subkegiatan antar k/l dan pemda provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dan lebih terarah berdasarkan sasaran dan kebijakan AK PIP.

e. Unit Pengendalian dan Evaluasi

Unit Pengendalian dan Evaluasi diketuai oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, serta Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Unit Pengendalian dan Evaluasi beranggotakan Direktur Evaluasi BPIP, Direktur Pengendalian BPIP, Direktur Sistem dan Manajemen Resiko Kementerian PPN/Bappenas, dan Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri. Tugas Unit Pengendalian dan Evaluasi adalah: (1) Menyusun instrumen pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan PIP yang terukur,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Menerima dan melakukan verifikasi data hasil pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan yang diisi oleh setiap lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi Pokja pada instrumen yang disusun, (3) Mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi serta memberikan rekomendasi perbaikan.

f. Pokja

Pokja merupakan unit pelaksana korsindal terdepan dalam Tim Koordinasi Peta Jalan PIP. Pokja ini terbagi dalam dua klaster, yakni klaster k/l dan pemda provinsi dengan rician sebagai berikut:

1) Klaster k/l.

Dalam Klaster k/l, Pokja Peta Jalan PIP terbagi menjadi lima (5) Pokja, yaitu:

a) Pokja 1, terdiri dari lembaga negara dan k/l yang membidangi urusan ideologi, politik, pertahanan-keamanan dan luar negeri. Pokja 1 diketuai oleh Direktur Pengkajian Implementasi PIP BPIP dan beranggotakan para pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan unit kerja eselon II setingkat kepala biro yang menangani urusan perencanaan pada masing-masing k/l dalam lingkup Pokja 1;
b) Pokja 2, terdiri dari lembaga negara dan k/l terkait yang membidangi urusan hukum dan regulasi, hak asasi manusia, pelayanan publik, dan tata kelola SDM aparatur. Pokja 2 diketuai oleh Direktur Analisis dan Penyelarasan BPIP dan beranggotakan para pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan unit kerja eselon II setingkat kepala biro yang menangani urusan perencanaan pada masing-masing k/l dalam lingkup Pokja 2;
c) Pokja 3, terdiri dari lembaga negara dan k/l terkait yang membidangi urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Pokja 3 diketuai oleh Direktur Pengkajian Materi BPIP dan beranggotakan para pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan unit kerja eselon II setingkat kepala biro yang menangani urusan perencanaan pada masing-masing k/l dalam lingkup Pokja 3;
d) Pokja 4, terdiri dari lembaga negara dan k/l terkait yang membidangi urusan ekonomi, koperasi dan UMKM, ketenagakerjaan, dan investasi. Pokja 4 diketuai oleh Direktur Advokasi BPIP dan beranggotakan para pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan unit kerja eselon II setingkat kepala biro yang menangani urusan perencanaan pada masing-masing k/l dalam lingkup Pokja 4; dan
e) Pokja 5, terdiri dari lembaga negara dan k/l terkait yang membidangi urusan energi, pangan, sumber daya alam, dan tata kelola ruang. Pokja 5 diketuai oleh Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP dan beranggotakan para pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan unit kerja eselon II setingkat kepala biro yang menangani urusan perencanaan pada masing-masing k/l dalam lingkup Pokja 5.

Dalam hal ini, tugas koordinator dalam setiap Pokja klaster k/l adalah: (1) Memastikan lembaga negara dan k/l di Pokjanya menjalankan kegiatan peta jalan PIP sesuai dengan Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 k/l yang ditetapkan dalam tahap perencanaan; dan (2) Memimpin forum-forum koordinasi dengan lembaga negara dan k/l di tingkat Pokja. Sementara itu, tugas anggota Pokja adalah: (1) Memantau pelaksanaan kegiatan Peta Jalan PIP di masing-masing lembaga negara dan k/l; (2) Memimpin forum-forum korsindal pelaksanaan kegiatan Peta Jalan PIP dengan unit-unit kerja terkait dalam lingkup lembaga negara dan k/l nya; dan (3) Menyampaikan data-data terkait progres pelaksanaan kegiatan Peta Jalan PIP di masing-masing lembaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

negara dan k/l yang dibutuhkan oleh Unit Koordinasi dan Sinkronisasi serta Unit Pemantauan dan Evaluasi.

2) Klaster pemda provinsi. Dalam klaster ini, Pokja Peta Jalan PIP terbagi ke dalam empat (4) kelompok yang mewakili pembagian regional yaitu Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Pembagian masing-masing pemda provinsi dalam tiap kelompok adalah sebagai berikut.
   a) Pokja 6, terdiri dari 10 (sepuluh) pemda provinsi dari regional Sumatera, yaitu: Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung, dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pokja 6 diketuai oleh Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP dan beranggotakan para kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan pada masing-masing pemda provinsi di Regional Sumatera.
   b) Pokja 7, terdiri dari 11 (sebelas) pemerintah daerah provinsi dari regional Jawa dan Kalimantan, yaitu: Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Provinsi DKI. Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi D.I Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pokja 7 diketuai oleh Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP dan beranggotakan para kepala Badan Kesbangpol dan kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan pada masing-masing pemda provinsi di Regional Jawa dan Kalimantan.
   c) Pokja 8, terdiri dari 9 (sembilan) pemerintah daerah provinsi dari regional Nusa Tenggara dan Sulawesi, yaitu: Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Pokja 8 diketuai oleh Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP dan beranggotakan para kepala Badan Kesbangpol dan kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan pada masing-masing pemda provinsi di Regional Nusa Tenggara dan Sulawesi.
   d) Pokja 9, terdiri dari 8 (delapan) pemerintah daerah provinsi dari regional Maluku dan Papua, yaitu: Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan, dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Pokja 9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diketuai oleh Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulun Pendidikan dan Pelatihan BPIP dan beranggotakan para kepala Badan Kesbangpol dan kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan pada masing-masing pemda provinsi di Regional Maluku dan Papua.

Dalam hal ini, tugas koordinator dalam setiap Pokja pemda provinsi adalah: (1) Memastikan pemda-pemda provinsi di Pokjanya menjalankan subkegiatan peta jalan PIP sesuai dengan Matriks Peta Jalan PIP 2026-2030 Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dalam tahap perencanaan; dan (2) Memimpin forum-forum koordinasi di tingkat Pokja. Sementara itu, tugas anggota adalah: (1) Memantau pelaksanaan subkegiatan Peta Jalan PIP di masing-masing pemda provinsi; (2) Memimpin forum-forum korsindal pelaksanaan subkegiatan Peta Jalan PIP dengan OPD terkait dalam lingkup pemda provinsi masing-masing; dan (3) Menyampaikan data-data terkait progres pelaksanaan subkegiatan Peta Jalan PIP 2026-2030 Pemda Provinsi yang dibutuhkan oleh Unit Koordinasi dan Sinkronisasi serta Unit Pemantauan dan Evaluasi.

2. Pentahapan

Secara teknis, pentahapan pelaksanaan Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029 terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan korsindal sebagai berikut:

a. Perencanaan Korsindal

Tahap ini merupakan fondasi korsindal yang dilaksanakan dengan penyusunan matriks Peta Jalan PIP yang berisi usulan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan setiap lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi berdasarkan isu strategis, sasaran, dan kebijakan yang terdapat dalam AK PIP. Sesuai dengan periode perencanaan jangka menengah tingkat pusat dan daerah, periode Peta Jalan PIP lima tahun pertama pada tingkat lembaga negara dan k/l adalah 2025-2029, sementara itu tingkat pemda provinsi adalah 2026-2030. Keluaran (*output*) pada tahap ini adalah Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 Kementerian/Lembaga dan Matriks Peta Jalan PIP 2026-2030 Pemerintah Daerah Provinsi yang telah mendapat persetujuan bersama. Dalam penyusunan matriks tersebut, BPIP bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum).

Usulan program dan kegiatan yang diberikan oleh tiap lembaga negara dan k/l merupakan kegiatan yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) masing-masing lembaga negara dan k/l Tahun 2025-2029 yang diberikan keterangan nama/judul kegiatan, keluaran, indikasi target, penanggung jawab (k/l tersebut), serta instansi terkait yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dengan format Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 K/L sebagaimana tertera dalam Tabel 3 di bawah. Sementara itu, usulan subkegiatan pemda provinsi yang diterakan dalam Matriks Peta Jalan PIP 2026-2030 Pemda Provinsi merupakan subkegiatan yang tertera dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026-2030 dan Renstra tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masing-masing dan tertera dalam Matriks Hasil Identifikasi Peta Jalan PIP 2026-2030 Pemda Provinsi yang disusun oleh BPIP bersama dengan Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Polpum Kemendagri berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) termutakhir yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 sebagaimana tertera dalam Tabel 4 di bawah.

Dalam hal ini, proses pengisian Matriks Peta Jalan PIP 2026-2030 Pemda Provinsi dilakukan dengan mencantumkan satuan target subkegiatan dan pagu subkegiatan pada bagian kanan matriks seperti terlihat dalam Tabel 5 di bawah untuk menjelaskan keberadaan jumlah output dan anggaran atas subkegiatan tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2026 hingga 2030 sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2026-2030 maupun Renstra OPD terkait.

Tabel 3
Format Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 K/L

SASARAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKASI TARGET					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*					*(6)*	*(7)*
(sesuai AK PIP)	*(sesuai AK PIP)*	*(usulan k/l)*	*(usulan k/l)*	*(usulan k/l)*	*(usulan k/l)*	*(usulan k/l)*	*(usulan k/l)*	*(usulan k/l)*	*(usulan k/l)*	*(usulan k/l)*

Tabel 4
Matriks Identifikasi Peta Jalan PIP 2026-2030 Pemda Provinsi

Kebijakan AK PIP	Kegiatan	Subkegiatan
Isu Penyelenggaraan Negara		
Sasaran 1. Terinternalisasi dan Terinstitusionalisasinya Nilai-Nilai Pancasila dalam setiap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia		
Meningkatkan pemahaman dan/atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan perundang-undangan, dan kebijakan	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Isu Kebinekaan, Keteladanan, dan Berkrepribadian dalam Kebudayaan		
Sasaran 1. Terbangunnya Kesadaran dan Praktik Kehidupan Berkebinekaan		
Menguatkan wawasan kebangsaan dan kebinekaan yang berbasis nilai-nilai pancasila di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
		Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
		Pelaksanaan tugas Paskibraka
		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
		Pembentukan Paskibraka
Mendorong dan menguatkan dialog antar-masyarakat berbasis nilai-nilai pancasila demi terbangunnya integrasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antarkeluarga, warga, dan kelompok masyarakat
Isu Sistem Pendidikan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
Sasaran 2. Terwujudnya Diklat dalam Kehidupan Nasional yang Mendorong Pengembangan Kemampuan dan Pembentukan Karakter serta Peradaban Bangsa yang Bermartabat dalam rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa		
Menguatkan wawasan kebangsaan dan kebinekaan yang berbasis nilai-nilai pancasila di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Pemberian layanan pendampingan bagi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Isu Sistem Politik Demokrasi dan Hubungan Luar Negeri		
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Demokrasi berdasarkan Pancasila		
Mengoptimalkan peran partai-partai politik di Indonesia dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik, kaderisasi, pendidikan politik, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
Isu Sistem Ekonomi, Kesejahteraan, dan Lingkungan Hidup		
Tujuan 1. Terciptanya Kehidupan Perekonomian yang Berasaskan Kekeluargaan dan Gotong Royong		
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila		
Mengkampanyekan pembudayaan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	dalam 1 (satu) daerah provinsi	
Tujuan 2. Semakin Menguatnya Peran Koperasi serta UMKM dalam Sistem Perekonomian Nasional		
Sasaran 1. Meningkatnya Akses Koperasi serta UMKM terhadap Sumber Daya Ekonomi		
Pengadaan akses finansial bagi koperasi serta UMKM yang mudah dan terjangkau	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Fasilitasi akses permodalan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Fasilitasi izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemulihan usaha koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Sasaran 2. Meningkatnya Daya Saing Koperasi serta UMKM secara Berkelanjutan		
Pendampingan pengembangan usaha, insentif pajak rendah dan adopsi teknologi untuk menciptakan efisiensi bagi koperasi dan UMKM	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Penyusunan basis data usaha kecil
		pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemulihan usaha koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Sasaran 3. Meningkatnya Akses Koperasi serta UMKM kepada Pasar		
Penyediaan pasar bagi koperasi serta UMKM	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada infrastruktur publik
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha
	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah
Tujuan 3. Terciptanya Ekosistem Usaha yang Adil		
Sasaran 2. Terciptanya Iklim Usaha yang Mengutamakan Potensi Lokal		
Pendampingan dan pengembangan pemain lokal (*local champion*) yang memimpin pasar dalam negeri	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif
	Pelaksanaan pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Fasilitasi pemasaran penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah
Mendorong kemitraan koperasi dan UMKM lokal dengan usaha besar dan pengaturan penyerapan konten lokal	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan
Tujuan 4. Terpenuhinya Hak Dasar Warga Negara		
Sasaran 1. Meningkatnya Kesempatan Lapangan Kerja yang Layak dan Berkelanjutan		
Penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang tersedia	Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
	Pengelolaan informasi pasar kerja	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja daring
		Job fair/bursa kerja
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan
		Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan
Sasaran 2. Meningkatnya Jaminan Sosial yang Layak		
Reforma program jaminan kesejahteraan sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
Sasaran 3. Meningkatnya Derajat Tingkat Pendidikan dan Kesehatan		
Peningkatan akses dan kualitas aspek kesehatan dan pendidikan	Perlengkapan dasar buku teks dan nonteks peserta didik sekolah menengah atas	Perlengkapan dasar buku teks dan nonteks peserta didik
	Perlengkapan dasar buku teks dan nonteks peserta didik sekolah menengah kejuruan	Perlengkapan dasar buku teks dan nonteks peserta didik
	Perlengkapan dasar buku teks dan nonteks peserta didik pendidikan khusus	Perlengkapan dasar buku teks dan nonteks peserta didik
	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di DTPK (pelayanan kesehatan bergerak, gugus pulau, pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine,* dll.)

Tabel 5
Kolom Target Subkegiatan dan Pagu Subkegiatan Peta Jalan PIP
Pemda Provinsi

TARGET SUBKEGIATAN					PAGU SUBKEGIATAN (Dalam Rp)				
2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
(9)					*(10)*				
Diisi dengan jumlah output subkegiatan	*Diisi dengan jumlah output subkegiatan*	*Diisi dengan jumlah output subkegiatan*	*Diisi dengan jumlah output subkegiatan*	*Diisi dengan jumlah output subkegiatan*	*Diisi dengan anggaran subkegiatan*	*Diisi dengan anggaran subkegiatan*	*Diisi dengan anggaran subkegiatan*	*Diisi dengan anggaran subkegiatan*	*Diisi dengan anggaran subkegiatan*

b. Pelaksanaan Korsindal

Tahap pelaksanaan korsindal terdiri dari aktivitas koordinasi dan sinkronisasi, serta pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara paralel sebagai berikut.

1) Koordinasi dan sinkronisasi

Dalam tahap ini, korsindal diwujudkan melalui pelaksanaan bersama program, kegiatan, dan subkegiatan oleh masing-masing lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi sesuai dengan Matriks Peta Jalan PIP yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk menjamin alur *metapolicy* dapat berjalan secara optimal, pelaksanaan korsindal Peta Jalan PIP dilakukan oleh Tim Koordinasi Peta Jalan PIP yang akan dibentuk dan dikoordinasikan oleh BPIP dengan susunan serta uraian tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Sebagai bagian dari *alur metapolicy*, pelaksanaan Peta Jalan PIP pada tahap ini akan diisi dengan forum korsindal Peta Jalan PIP yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada awal tahun. Selain berfungsi sebagai wadah bagi masing-masing k/l dan pemda provinsi untuk melaporkan capaian pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan PIP yang diampunya selama satu tahun sebelum, forum ini juga berfungsi sebagai wahana diskusi untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan. Dengan demikian, forum ini menjadi instrumen vital untuk melakukan evaluasi kolaboratif dan penyempurnaan pelaksanaan Peta Jalan PIP kedepannya guna memastikan ketercapaian target secara konsisten. Dalam hal ini, Peran BPIP dalam forum ini adalah sebagai fasilitator yang menyintesis seluruh laporan dari Pokja menjadi sebuah gambaran besar pelaksanaan PIP secara nasional. Masukan-masukan yang dikumpulkan dari forum ini menjadi modal bagi BPIP untuk menyusun laporan Implementasi Peta Jalan PIP tahunan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta rekomendasi strategis terkait Peta Jalan PIP yang akan disampaikan kepada Presiden.

Selain itu, melalui forum tahunan ini BPIP juga dapat memberikan penghargaan atau apresiasi kepada lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi yang menunjukkan performa luar biasa dalam implementasi Peta Jalan PIP. Hal ini penting untuk menciptakan kompetisi positif antar-instansi dalam hal inovasi PIP. Dengan demikian, forum ini tidak sekadar menjadi instrumen korsindal yang kaku, tetapi juga menjadi instrumen motivasi bagi para penyelenggara negara di lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi untuk lebih kreatif dalam membumikan Pancasila di lingkungan kerjanya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan koorsindal pada tahap ini terdiri dari beberapa aktivitas utama yang dilaksanakan unsur-unsur dalam Tim Koordinasi Peta Jalan PIP sebagai berikut:

a) Ketua Tim Koordinasi:
   Memberikan arahan tugas pelaksanaan teknis Peta Jalan PIP kepada Ketua Pelaksana.
b) Sekretaris Tim Koordinasi:
   (1) Menyelenggarakan dukungan administrasi, tata kelola persuratan, dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam tahap koordinasi dan sinkronisasi; dan
   (2) Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi antar unsur dalam Tim Koordinasi Peta Jalan PIP.
c) Ketua Pelaksana:
   (1) Memimpin pelaksanaan aktivitas koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Unit Koordinasi dan Sinkorinisasi serta Pokja berdasarkan arahan Ketua Tim Koordinasi; dan
   (2) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas masing-masing unsur dalam Tim Koordinasi Peta Jalan PIP.
d) Unit Koordinasi & Sinkronisasi:
   (1) Menyusun instrumen yang mengintegrasikan seluruh rencana kerja kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP tahunan untuk diisi oleh setiap lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi dalam masing-masing Pokja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Menyelenggarakan forum korsindal lintas Pokja semesteran untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP dari setiap Pokja k/l dan provinsi setiap tahun;
(3) Menyelenggarakan forum korsindal Peta Jalan PIP tahunan pada setiap awal tahun sebagai sarana pelaporan, evaluasi dan penyempurnaan, serta pemberian apresiasi kepada lembaga negara, k/l, dan Pemda atas pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP pada tahun sebelum; dan
(4) Melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kepada Ketua Tim Koordinasi dan Ketua Pelaksana.

e) Pokja (Koordinator):
(1) Melaksanakan koordinasi dengan para anggota Pokja dalam periode triwulan (3 bulan) setiap tahun; dan
(2) Memimpin dan memastikan pengisian data rencana kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP oleh setiap lembaga negara, k/l, dan pemda sesuai dengan kebutuhan Unit Koordinasi dan Sinkronisasi.

f) Pokja (Anggota):
(1) Melaksanakan koordinasi di masing-masing lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi dengan unit kerja atau OPD terkait; dan
(2) Melakukan input data rencana kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP tahunan masing-masing lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi sesuai dengan instrumen yang disusun oleh Unit Koordinasi dan Sinkronisasi.

2) Pengendalian dan Evaluasi

Tahap ini mengonsolidasikan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP yang dilakukan oleh lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi secara menyeluruh. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap keluaran dan target disertai analisis atas kesenjangan antara rencana dan realisasi. Evaluasi dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, serta tingkat sinergi antar-entitas. Temuan dari tahap ini menjadi umpan balik bagi pelaksanaan tahap koordinasi dan sinkronisasi siklus berikutnya, sehingga menciptakan alur *metapolicy* Peta Jalan PIP 2025-2029 di tingkat pusat dan Peta Jalan PIP 2026-2030 di tingkat provinsi yang dinamis dan responsif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan koorsindal pada tahap ini terdiri dari beberapa aktivitas utama yang dilaksanakan unsur-unsur Tim Koordinasi Peta Jalan PIP sebagai berikut:

a) Ketua Pelaksana:
(1) Memimpin pelaksanaan aktivitas pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Unit Pengendalian dan Evaluasi serta Pokja berdasarkan arahan Ketua Tim Koordinasi; dan
(2) Menyusun laporan dan rekomendasi implementasi Peta Jalan PIP tahunan yang akan disampaikan kepada Presiden berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi.

b) Unit Pengendalian & Evaluasi:
(1) Menyusun instrumen pengendalian dan Evaluasi Peta Jalan PIP yang akan diisi oleh masing-masing lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi dalam setiap Pokja;
(2) Menerima dan melakukan verifikasi data realisasi kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP yang diisi oleh setiap lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi Pokja pada instrumen yang disusun;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) Mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi serta memberikan rekomendasi perbaikannya;
(4) Menyampaikan hasil pemantauan dalam forum korsindal Peta Jalan PIP semesteran dan tahunan; dan
(5) Melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Tim Koordinasi.

c) Pokja (Koordinator):
Memimpin dan memastikan isian data realisasi kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP lembaga negara, k/l, dan pemda sesuai dengan instrumen yang disusun Unit Pengendalian dan Evaluasi.

d) Pokja (Anggota):
Melakukan input data realisasi kegiatan dan subkegiatan Peta Jalan PIP masing-masing lembaga negara, k/l, dan pemda provinsi sesuai dengan instrumen yang disusun oleh Unit Pengendalian dan Evaluasi.

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).